

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PAPUA BARAT PADA MASA PEMERINTAHAN BELANDA

SKIRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Pendidikan Sejarah



Oleh

Logimus Pekey
NIM : 011314037

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2009

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

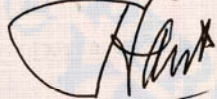
PAPUA BARAT PADA MASA PEMERINTAHAN BELANDA

Disusun Oleh:

Logimus Pekey
NIM: 011314037

Telah disetujui oleh

Dosen Pembimbing



Drs. A.K. Wiharyanto, M.M.

11 Juni 2009

SKRIPSI

PAPUA BARAT PADA MASA PEMERINTAHAN BELANDA

Telah dipersiapkan dan ditulis oleh:

Logimus Pekey
NIM : 011314037

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji

Pada 28 Juli 2009

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji

Nama Lengkap

Tandatangan

Ketua : Yohanes Harsoyo, S. Pd., M.Si.

Sekretaris : Drs. B. Musidi, M.Pd.

Anggota : Drs. B. Musidi, M.Pd.

Anggota : Drs. A.K. Wiharyanto, M.M.

Anggota : Dra. Th Sumini, M.Pd.

Yogyakarta, 28 Juli 2009
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sanata Dharma



Dekan,
Drs. Jansius Sarkim, M.Ed., Ph.D.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

MOTTO

“Pengetahuan akan kebenaran dan perjuangan akan kemanusiaan itu bagaikan samudra luas yang teduh, tidak dapat dibendung dan dibatasi oleh siapapun, tidak juga kau...”

--Longgi --

“ Belajar bukan untuk mencari nilai, gelar, dan ijazah, tetapi untuk hidup. Sementara hidup bukan untuk mencari kehormatan, tetapi untuk memperjuangkan kebenaran, keadilan dan kejujuran demi kemerdekaan”

--Odiyaipai --

“ ketahuilah, hidup yang punya arti tidak pernah dimiliki, ia harus direbut. Dan arti hidup tidak pernah dipunyai tapi harus diperjuangkan.”

--Y.B. Mangunwijaya --

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PERSEMBAHAN

Sikripsi ini kupersembahkan kepada:

Ayanda Ipouga Frans Pekey dan Ibunda Sofia Mote (alm) yang tercinta ,
sebagai tanda baktiku kepada mereka.

Kakak dan adik-adikku tercinta (Hendrika pekey, Frans Pekey (alm), Primus Pekey (alm), Patrisius Pekey (alm), Daniel Pekey (alm), Emanuel pekey (alm), Anton Pekey (alm), Natalis Pekey, Makdalena Pekey, Leonardus Pekey,

Keluarga besar Pekey-Mote dan seluruh masyarakat kecil di daerah Pania,
Tigi, Tage, Kamu dan Mapia.

Seluruh Generasi Papua Barat yang telah menjadi sumber motivasi dan
inspirasi

Para pecinta kemanusiaan dan yang mati
demi kemanusiaan.

Rekan-rekan para peminat Sejarah.

Para Dosenku, seluruh civitas akademi USD dan Almamaterku.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

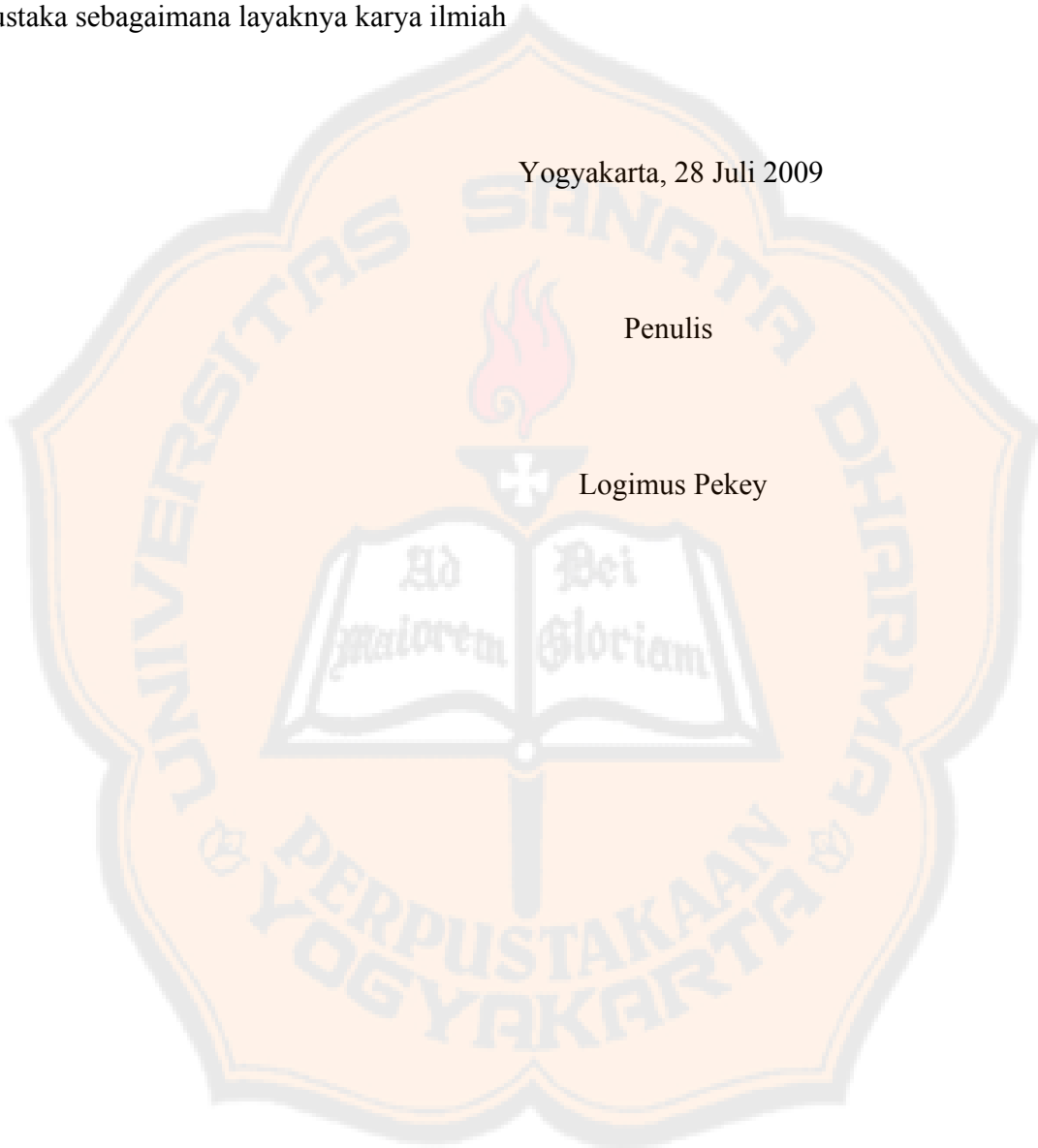
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya orang lain, terkecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka sebagaimana layaknya karya ilmiah

Yogyakarta, 28 Juli 2009

Penulis

Logimus Pekey



ABSTRAK

PAPUA BARAT PADA MASA PEMERINTAHAN BELANDA

Oleh:

Logimus Pekey

NIM: 011314037

Skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis 1) Penguasaan Belanda di Papua Barat. 2) Kondisi rakyat Papua Barat pada masa pemerintahan Belanda. 3) Pengaruh pendidikan di Papua Barat pada masa Belanda.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode sejarah, yang mencakup empat tahap euristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Pendekatan multidimensional (politik, sosial, ekonomi, dan sosial budaya). Penulisan skripsi ini bersifat deskriptif analitis.

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa:

a) Belanda mengenal Papua Barat pada awalnya melalui Portugis dan Spanyol. Kemudian para pelaut seperti Wiliam Janz, Le Maire dan Wiliam Schouten berlayar sampai ke Papua Barat. Pada tanggal 24 Agustus 1828, Belanda memproklamasikan Papua Barat sebagai wilayah kekuasaannya.

b) Penjajah Belanda telah merampas tanah-tanah subur milik penduduk bangsa Papua. Masyarakat Papua Barat pada masa pemerintahan Belanda hidup sangat menderita. Telah terjadi kerja paksa dan diskriminasi terhadap masyarakat Papua Barat. Masyarakat Papua Barat ketika itu hidup di dalam kondisi pangan dan kesehatan yang memprihatinkan, kondisi budaya dan pendidikan yang tidak diperhatikan.

c) Pada masa Belanda menguasai Papua Barat, pemerintah Belanda bersama Zending dan Misi telah berupaya keras dan berhasil membangun pendidikan modern dan berupaya membangun ekonomi masyarakat Papua Barat. Dampak dari pendidikan modern telah melahirkan kaum terpelajar Papua yang memiliki kesadaran nasional melawan penjajah yang menindas.

ABSTRACT

WEST PAPUA UNDER DUTCH COLONIALIZATION

By:

Logimus Pekey

NIM: 01131403

This minithesis aims to describe and analyze 1) Dutch governance in West Papua, 2) The condition of people in West Papua at the time of Dutch colonization, 3) the influence of Dutch colonialization toward to education in West Papua

The writing of this minithesis applies the four steps of historical method, that are heuristic, verification, interpretation, and historiography. The multidimensional approaches applied were the politics approach, social approach, economy approach, and social-culture approach. This writing applies an analytical descriptive.

The result of this research showed that:

a) Dutch recognized West Papua initially through Portugist and Spain sailor such as William Janz, Le Maire and Wiliam Schouten sailed to West Papua on August 24th 1828. After that, Dutch declared West Papua as its authority territorial,

b) Dutch colonialist had seized the fertile soils that belonged to the inhabitant of Papuan Nation. People of West Papua at the time of Dutch colonization lived in suffering so much. Forced labor and discrimination occurred at that time toward people of West Papua. They, at the time, lived in the hard condition to look for food and health, the uncared condition of culture and education.

c) At the time Dutch colonized West Papua, Dutch government along with Zending and Mission had tried hard and had been successful to build the modern education and they tried to build people's economy in West Papua. The impact of modern education had resulted in Papuan intellectuals who had the national consciousness against the suppressed colonialist.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma :

Nama : Logimus Pekey

Nomor Mahasiswa : 011314037

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul :

Papua Barat Pada Masa Pemerintahan Belanda

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal : 5 Oktober 2009

Yang menyatakan


(Logimus Pekey)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya yang telah memberikan anugrah dan kasih-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PAPUA BARAT PADA MASA PEMERINTAHAN BELANDA”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Universitas Sanata Dharma.

Selama menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak memperoleh bimbingan, dukungan, bantuan, dan perhatian dari semua pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tuaku: Ipouga Yulius Frans Pekey dan Sofia Mote Mabi Mote (alm) yang telah melahirkan dan membesarkanku dalam kasih sayang, serta telah mengenalkan saya kepada Tuhan Yesus Kristus.
2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma
3. Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pendidikan Sosial Universitas Sanata Dharma
4. Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma
5. Bapak Drs. A.K. Wiharyanto. M.M., selaku Dosen pembimbing yang dengan sabar telah membimbing, dan mengarahkan untuk penyusunan skripsi ini.
6. Pimpinan Serikat Jesus (SJ) Povinsiat Indonesia telah menjadi donator dalam menyelesaikan studi di USD dan juga kepada Rm Basilius Sudibyo SJ, dan Rm Muji Santara SJ, Rm Kristiono, Rm In Nugroho SJ, Rm Gandhi SJ Rm Ari SJ, Rm Prapta SJ, Bruder Hadi SJ, yang telah memberikan dukungan spiritual, mendidik, dan membimbing dalam proses belajar di USD.
7. Para Dosen Fakultas Sastra, Program Studi Ilmu Sejarah Universtas Sanata Dharma yang telah mendidik, mengajar, dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini diantaranya, Bapak Silverio (Indonesiana) Bapak Purwanta, Romo Gregorius Budi Subanar SJ.
8. Seluruh karyawan perpustakaan USD yang telah menyediakan buku-buku yang diperlukan untuk menulis skripsi ini.
9. Kakak-kakak yang selalu memotivasiku waktu menempuh studi dan skripsi diantaranya Titus Krist Pekey, SH, Pater Yan Youw Pr, dan Pater Mick Tekege Pr.,

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Maximus Mote, Herman Pakage, Mas Kris (Ekplorer) dll. Tidak lupa juga kepada kawan-kawan seperjuanganku di Komunitas Pendidikan Papua (KPP): Yeri Degei Spd, Agus Degei Spd, Yanus Kuayo SH, Gerald Bidana, Frans Douw, Kris Hiktaop, Yemima Youw, Maria Ijai, Trikurniawan, Willem Bobby, MST, Longginus Manangsang SIP. Serta tidak lupa juga kepada adik-adikku dan kawan yang selalu memotivasiku dalam menyelesaikan studi dan skripsi: Adikku Theodisia Dorce Waga Pekey (yang tercinta telah menemaniku menjelang ujian akhir), Om Mateus Awe, Om Agus Mote, Om Feri Mote, Tinus Pigai, Jimi Kudiai, Lince Kudiai, Sosepin Youw, Ance Boma, Emanuel Gobai, Hengki Tekege, Yosep Mote, Nius, Anggel Hilapok, Yulius Pekey, Darianus Iyowau Leni Zonggonau, Eka Roberta Iyai, Jhoni Hendri Iyai, Ika Numubagre, Sinyo Fernandes, Richardus Ruban, Yoyok, Aryo Amberau, Marti Sirandan, Emilia Wayar dan semua yang tidak saya tuliskan dalam skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis dengan tangan terbuka akan menerima segala tanggapan, saran, kritik dari pembaca demi penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat menjadi salah satu sumbangan yang bermanfaat.

Penulis

Logimus Pekey

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	vi
ABSTRACT	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Maksud, Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Landasan Teori	10
F. Metodologi Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II: USAHA BELANDA MENGUASAI PAPUA BARAT	20
A. Masa Awal Pelayaran Belanda ke Papua Barat	20
B. Usaha VOC Menguasai Papua Barat	21
C. Resmi Dikuasai Pemerintah Belanda	23
D. Perluasan Kekuasaan Belanda	26
BAB III: KEADAAN RAKYAT PAPUA BARAT	
MASA PEMERINTAHAN BELANDA	35

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

A. Perampasan Tanah Bangsa Papua	36
B. Kerja Paksa dan Diskriminasi	37
C. Kondisi Pangan dan Kesehatan	39
D. Kondisi Budaya dan Pendidikan	44
E. Kondisi Ekonomi.....	47
BAB IV: PENDIDIKAN DI PAPUA BARAT PADA MASA	
BELANDA	51
A. Pendidikan Misionaris	52
1. Kedatangan Misionaris.....	53
2. Upaya Kristenisasi dan Dampaknya.....	54
B. Pendidikan Pemerintah Belanda.....	60
1. Tradisi Pendidikan Belanda.....	60
2. Pendidikan Belanda Masa Residen J.P. van Eechoud	61
3. Hasil dan Pengaruh Pendidikan Belanda.....	62
4. Dampak Pendidikan di Bidang Politik	64
BAB V: KESIMPULAN	71
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	77
SILABUS	121
RPP	124

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Datangnya bangsa Barat seperti Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda, Perancis dan sebagainya telah membagi wilayah geografi, ekonomi politik di Benua Amerika, Afrika dan Asia. Mengenai Papua Barat, pada Abad XIII ada catatan seorang musafir Cina bernama *Cha Yu* memperkenalkan sebutan *Tu-ngki* atas daerah Papua, sesuatu daerah kerajaan di Maluku. Kemudian pelaut Portugis, Antonie d' Abreu, yang pernah melintasi daerah itu memberi sebutan *Os Papuas*, barangkali mirip ejaan bahasa Melayu "Puapua" atau "Papua" memiliki arti rambut keriting.

Awal mula kedatangan bangsa Barat untuk merebut pulau Papua karena pernyataan dari seorang pelaut Spanyol bernama Alvaro De Saavedra yang berlayar ke Mexico dan singgah di pesisir pantai utara Papua pada tahun 1528 memberi nama *Isla Del Ora (Island of Gold)* atau pulau Emas. Dari informasi inilah kemudian Papua menjadi rebutan berbagai bangsa, termasuk Belanda yang kemudian mengklaim sebagai daerah kekuasaannya.

Inggris, Jerman, dan Belanda membagi pulau itu menjadi tiga bagian. Namun tampaknya Jerman harus pergi dari Papua dan Pulau itu di bagi menjadi dua. Papua timur yang dikuasai Inggris mengalami *dekolonisasi*¹ dan kemudian memerdekakan diri disebut *Papua New Gunea*. Papua Barat² (*West Papua*) dieksploitasi Belanda.

¹ J. S. Badudu. *Kamus Kata-Kata Serapan Asing Dalam Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Kompas, 2005 hlm, 51. Dituliskan bahwa, dekolonisasi adalah penghapusan daerah jajahan; pengambilan kekuasaan penjajahan kepada rakyat terjajah.

² E. Soewandha. *Api Perjuangan Pembebasan Irian Barat*. Jakarta : Yayasan Badan Kontak Keluarga Besar Perintis Irian Barat, 1986, hlm, 2. Menyebutkan *Pertama*, Tung-ki, suatu bagian "negara"/ kerajaan di Maluku. Sebutan itu berasal dari catatan seorang musafir Cina, bernama *Cha Yu Kua* pada

Setelah Belanda menguasai Papua Barat, *Hollandia* (Jayapura) menjadi pusat pemerintahan penjajah di seluruh Papua Barat. Kekayaan alam beserta tenaga rakyat Papua Barat dieksploitasi oleh Belanda. Rakyat Papua tidak mendapat perhatian sebagaimana manusia yang punya hak. Mereka hidup melarat, karena situasi pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang terabaikan.

Di samping Belanda yang menjalankan administrasi pemerintah, Zending dan Misi yang telah datang sebelum pemerintah Belanda di tanah Papua telah memiliki pengaruh dan dampak yang amat besar. Penyelenggaraan untuk mengembangkan kemasyarakatan dan pendidikan diserahkan kepada Zending Protestan, yang lebih dahulu datang ke Papua Barat pada tahun 1855 di prakarsai Otto dan Geisler berkebangsaan Jerman. Kemudian Zending menguasai bagian utara Papua. Pada tahun 1892 melalui kapal Koninkeljk Pakketvaarts Maatschppij (KPM) didatangkan guru-guru dari Minahasa, dan Ambon untuk memperlancar penyelenggaraan pendidikan dan pelajar-pelajar diberikan bahasa Melayu.

abad ke 13. Kedua, Bangsa Portugis, Antonie d' Abreu, memberi sebutan *Os Papuas*, barang kali mirip ejaan bahasa Melayu "puapua" atau "Papua" memiliki arti rambut keriting. Ketiga, Bangsa Spanyol menyebutnya *Island de Ora* (Pulau emas), Oertis de Retes juga kebangsaan Spanyol menyebutnya *Nova Guinea*/Guinea Baru. Keempat, bangsa Belanda menyebutnya *Niew Guinea*. *Kelima*, ketika status *quo*, UNTEA menjalankan pemerintah sementara, pulau itu disebut West New Guinea/ West Papua. *Kelima*, pada masa percaturan politik antara Indonesia dan Belanda, Soekarno (Indonesia) menyebutnya Irian artinya Ikut Indonesia Anti Nederlands. *Keenam*, pada tahun 1973 Presiden Soeharto melalui Keppres Nomor 5 Tahun 1973 pada saat meresmikan Kota Tembagapura merubah Irian Barat dengan menyebutnya Irian Jaya. Baca juga, Tuhana Taufiq A. 2001;1 dan baca juga Soebandrio, 2000; 1. Ketika Abdulrahman Wahid, tokoh Nadhatul Ulama (NU) menjabat sebagai presiden Republik Indonesia, dalam kunjungannya ke Port Numbai (Jayapura) pada tanggal 1 Januari tahun 2000 ia justru menghendaki permintaan masyarakat Papua Barat untuk mengubah nama Irian Jaya kembali menjadi Papua Barat. Seluruh rakyat Papua pada saat itu di Jayapura dan sampai ke seluruh pelosok kampung di Papua menyambut gembira sebagai pengakuan atas identitas mereka. Gusdur mendapat sorotan dan kritik dari pihak politikus nasionalis seperti Megawati, Amin Rais, Akbar Tanjung, dan ahli seperti Prof. DR. T Jacob dan Dr. Soebandrio di dalam tulisannya mengatakan "mereka tidak mengerti sejarah. Papua Barat dibagi dua oleh pemerintah Indonesia menjadi beberapa provinsi, yaitu Papua Barat dan Papua. Menurut rencana ada Papua Selatan dan Papua Tengah.

Agama Katolik Roma sampai di Papua Barat pada tahun 1896, yakni dua tahun sebelum pembukaan pos pemerintahan baru di Papua bagian Selatan. Pater J. Vartente pada tahun 1914 membuka dan membangun pemukiman-pemukiman percontohan (*model dolpen*) dalam rangka mempersiapkan pengembangan ekonomi dan pendidikan terutama pendidikan guru dan pamong praja. Waktu itu, tahun 1923 di bagian selatan Papua Barat, tenaga kerja didatangkan dari Maluku serta dari Kei. Administrasi dari yayasan Zending dan Katolik lebih giat bekerja dari pada pemerintah. Aktivitas-aktivitas Zending telah dimulai dalam tahun 1855 dan tahun 1935 telah tercantum 50.000 orang penganut agama protestan. Sedangkan Misi Katolik yang aktivitasnya di pantai selatan Papua Barat, pada tahun 1933 telah membaptis sekitar 7. 100 orang sebagai anggota gereja.

Dampak dari pendidikan Zending dan Misi serta pemerintah Belanda bermunculan elit terdidik yang menjadi tokoh nasionalis Papua Barat seperti, Silas Papare, Marten Indey, Frans Kaisiepo, Rumkorem, Herman Wajoi, Nicholas Jouwe, Johan Ariks, Markus Kaisiepo dan lain sebagainya. Mereka ini adalah tokoh masyarakat Papua Barat yang kemudian ada yang menjadi Pro Indonesia dan juga pro Belanda dan pro Papua Barat merdeka lepas dari Indonesia.

Pada tanggal 15 Juli 1946 konfrensi Malino menghasilkan pembentukan 15 negara federasi Indonesia. Namun, Papua Barat tidak dimasukkan di dalamnya, karena dapat berdiri sendiri.³ Status negara Indonesia kembali diperbicarakan pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 dalam Konferensi Meja Bundar (KMB).⁴ Pada

³ Natalis Pigay. *Evolusi Nasionalisme Dan Sejarah Konflik Politik Di Papua*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2000, hlm 162.

⁴ Syamsuddin Haris dkk. *Indonesia Di Ambang Perpecahan?* Jakarta: Erlangga. 1999, hlm 181. Menjelaskan bahwa: Dalam pembicaraan di tingkat internasional itu Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia sebagai negara Republik Indonesia Serikat (RIS), bukan negara kesatuan, ketika itu Papua Barat ikut dibicarakan dalam KMB. Namun pembicaraan mengenai Papua Barat ditunda sementara

tanggal 21 September 1961 Joseph Luns (Menteri Luar Negeri Belanda) mengeluarkan sebuah proposal kepada PBB agar membentuk suatu organisasi internasional dan otoritas internasional untuk mempersiapkan penduduk Papua Barat melaksanakan penentuan nasib sendiri secara dini pada kondisi stabil.⁵ Para intelektual Papua Barat saat itu menyambut upaya *dekolonisasi* melalui rencana Joseph Luns. Belanda berupaya membangun ekonomi, pendidikan dan politik meskipun sebagai upaya hegemoni Belanda di Papua Barat.⁶ Bulan Februari tahun 1961, rakyat Papua Barat melangsungkan pesta demokrasi pemilihan umum untuk pertama kali⁷ mereka memilih pemimpin dan wakil rakyat (Dewan Papua Barat). Nasionalisme orang Papua terus terbangun, kelompok terdidik yang memperjuangkan hak rakyat Papua, seperti Nicolas Jouwe, P. Torey, Markus Kaisepo, Nicolas Tanggahma, Eliezer Jan Bonai membuat drap manifesto yang menyebut 17 orang Papua Barat sebagai anggota Komite Nasional, mengundang 70 orang Papua Barat untuk hadir pada tanggal 19 Oktober 1961. Pada pertemuan tersebut telah disepakati simbol-simbol

waktu karena tidak mencapai kesepakatan. Menurut rencana akan dibicarakan oleh Indonesia - Belanda dalam konteks Uni Indonesia Belanda. Meskipun ada kesepakatan seperti itu, konflik mengenai status Papua Barat belum selesai dan semakin diperuncing ketika pada tanggal 27 Desember 1949, Residen Belanda di Papua Barat Jan Van Eechoud, memproklamasihkan pemisahan Papua Barat dari RIS.

Secara administrasi daerah tersebut dikuasai langsung oleh Ratu Juliana. Sejak itu menurut hukum tatanegara Belanda, Papua Barat berada langsung di bawah kekuasaan Belanda atau diperintah langsung dari Belanda. Para nasionalis Indonesia berpendapat bahwa Belanda telah melanggar kesepakatan KMB yang mengatur penyelesaian Papua Barat setahun setelah persetujuan tersebut ditandatangani.

⁵ *Ibid.*, hlm. 85

⁶ *Ibid.*, hlm. 182 -184. Dijelaskan bahwa: Subsidi Belanda untuk pembangunan Papua pada tahun 1950 (di luar pertahanan) sebesar US\$, 4,3 juta, ditahun-tahun 1962 dinaikan menjadi hampir 28 juta. Belanda membangun sekolah Administrasi, di Abepura, Jayapura. Belanda memperbolehkan dan mengesahkan berdirinya delapan partai politik di Papua Barat. Partai politik itu diantaranya Partai Demokrasi Rakyat berdiri pada tahun 1957 yang diketahui oleh Arnold Rubtoboy, Partai Nasional diketuai oleh Herman Wajoi, Partai New Guinea Bersatu diketuai oleh Lodewijk, Partai Serikat Pemuda Papua diketuai oleh John Wanaier, Partai Kekuatan Menuju Persatuan diketuai oleh Ezau Itaar, Partai Rakyat diketuai oleh Husein Warwey, Partai Persatuan Kristen Islam Raja Empat.

⁷ *Ibid.*, hlm. 184. Dijelakan bahwa mereka secara langsung maupun tidak langsung memilih para pemimpin yang berhak duduk di kursi parlemen (*Nieuw Guinea Raad* atau *Dewan New Guinea*). Pemilu itu disambut baik oleh warga Papua Barat, menurut van der Veur, kurang lebih sekitar 54. 000 orang Papua telah turut berpartisipasi dalam pemilu itu. Kemudian pada 5 April 1961 dewan itu diresmikan dengan proporsi orang Papua menduduki 22 kursi dari 28 kursi yang tersedia.

identitas politik kenegaraan, Bendera “Bintang Kejora” lagu kebangsaan “Hai Tanahku Papua” sebutan rakyat “orang Papua” lambang negara “Burung Mambruk” motto negara “*One People, One Soul*” Simbol-simbol kenegaraan itu menunjukkan spirit dan komitmen nasionalisme kelompok terpelajar untuk bersatu dan mendirikan negara Papua Barat. Kemudian untuk pertamakalinya, tepat tanggal 1 Desember 1961 bendera Bintang Kejora dikibarkan berdampingan dengan bendera Belanda diiringi lagu “*Hai Tanahku Papua*”⁸

Dalam upaya merebut Papua Barat dari Belanda dan menggagalkan berdirinya negara Papua Barat, pada tanggal 19 Desember 1961 Presiden Soekarno mengumumkan Trikora (Tiga Komando Rakyat) di Yogyakarta⁹ yang berisi: *pertama* gagalkan pembentukan Negara Papua buatan kolonial Belanda; Kibarkan bendera merah putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia; bersiaplah untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa.¹⁰ Sebagai tindak lanjut dari Trikora, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit No. 1/1962 tentang pembentukan Komando Mandala untuk merebut Papua Barat. Untuk tugas itu, pada 11 Januari 1962, Brigjen. Soeharto dipromosikan menjadi Mayjen, kemudian diangkat menjadi Panglima Mandala.¹¹ Dia telah melaksanakan salah satu tugasnya merebut Papua Barat dari pangkuan Belanda.

⁸ Natalis Pigay, *op.cit*, hlm. 217 – 220. Sebelum negara Papua Barat berjalan sesuai fungsinya, telah diinvasi militer Indonesia. Hingga sekarang, kemerdekaan Papua Barat terus diperjuangkan kelompok intelektual bersama masyarakat. Mereka menuntut pengakuan akan hak kemerdekaan bagi Papua Barat kepada dunia internasional (PBB) atas kemerdekaan yang secara secara *de yure* belum terjadi, namun secara *de facto* sudah terjadi. Pengakuan ini sesuai dengan alinea pertama bahwa: Pembukaan UUD 1945 negara republik Indonesia bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prikeadilan.

⁹ Syamsuddin Haris dkk, *op.cit*, hlm. 186,

¹⁰ Kol Inf Drs. Saleh A. Djamhari dkk. Trikormando Rakyat, Pembebasan Irian Barat, Jakarta: Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI. 1994. hlm, v

¹¹ Natalis Pigay, *op.cit*, hal. 231-234. Bahwa Dengan terbentuk Komando Rakyat, Komando Mandala, dan kegiatan infiltrasi militer serta kegiatan operasi militer, seperti Operasi Banteng, Operasi Garuda,

B. Rumusan Masalah

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana usaha Belanda untuk menguasai Papua Barat ?
2. Bagaimana keadaan rakyat Papua Barat pada masa pemerintahan Belanda?
3. Apa pengaruh dan dampak pendidikan di Papua Barat jaman Belanda?

C. Maksud, Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Maksud Penelitian

Sesuai rumusan permasalahan yang dikaji di atas, penelitian ini bermaksud meneliti tentang masa pemerintahan Belanda di Papua Barat. Hasil dari penulisan ini bermaksud membuka pemahaman mengenai dampak dari pemerintahan Belanda di Papua Barat.

2. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Mendeskripsikan dan menganalisis upaya Belanda menguasai Papua Barat.

Operasi Serigala, Operasi Naga, dan Operasi Lumba-Lumba. Menurut wawancara tanggal 10 Desember 2007 dengan A. Tinus Uwaga. Aktivis Papua, Ketua Aliansi Mahasiswa Papua Internasional periode 2006-2008 dalam acara Memperingati Hari HAM. Mengatakan, "bahwa Sejarah hidup bangsa Papua Barat mengengang Trikora sebagai amanat penderitaan rakyat Papua Barat. Kehadiran Indonesia di Papua Barat merampas hak merdeka dan menentukan nasib sendiri. Indonesia mendirikan negara di Papua Barat melalui kekerasan militer. Dalam invasi yang militer itu, kekerasan berupa intimidasi dan teror (kekerasan psikis) dan bahkan telah dilakukan pembunuhan dan pembantaian terhadap warga sipil Papua (kekerasan fisik). Sejarah awal masuknya Indonesia di Papua Barat telah diwarnai penindasan dan pembunuhan yang memperlihatkan kebiadapan militer Indonesia. Sampai saat ini pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua Barat masih terus terjadi dan telah tercatat dalam sejarah kehadiran dan perjalanan hidup Indonesia bersama orang Papua"

- b. Mendeskripsikan dan menganalisis kondisi rakyat Papua pada masa pemerintahan Belanda di Papua Barat.
- c. Mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh dan dampak pendidikan di Papua Barat pada masa pemerintah Belanda.

3. Manfaat Penelitian

a. Bagi Universitas Sanata Dharma.

Sebagai salah satu wujud darmabakti kepada Tri Dharma perguruan tinggi khususnya dalam bidang penelitian, yaitu penelitian ilmu pengetahuan sosial. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kasana dunia sejarah sebagai bahan bacaan yang berguna bagi pembaca dan pemerhati sejarah dilingkungan Universitas Sanata Dharma.

d. Bagi Penulis

Bagi penulis sendiri adalah sebagai syarat tugas akhir untuk menyelesaikan studi kesarjanaan di Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Program Studi Pendidikan Sejarah.

D. Tinjauan Pustaka

Buku mengenai Papua Barat yang penulis temukan dan pakai dalam penulisan skripsi ini terdiri dari tiga cara pandang yang berbeda. Pertama cara pandang Belanda terhadap sejarah Papua. Kedua cara pandang Indonesia terhadap sejarah Papua. Ketiga cara pandang orang Papua terhadap sejarahnya sendiri.

Para penulis buku mengenai Papua Barat pun beragam daerah asal. Ada penulis dari negeri Belanda, dan Rusia. Mereka memandang Papua dengan cara pandangnya

yang masing-masing berbeda pula. Kedua, buku yang ditulis oleh orang Indonesia dalam memandang sejarah pemerintahan Indonesia di Papua Barat. Ketiga buku yang ditulis oleh orang Papua Barat sendiri dalam memandang sejarahnya.

Buku berupa bunga rampai yang disusun oleh orang Belanda yang penulis gunakan misalnya, karya Pim Schoorl. *Belanda di Irian Jaya: Ambtenaar di Masa Penuh Gejolak 1945 – 1962*. Buku ini terbit tahun 2001 di Jakarta. Isi buku ini mengulas mengenai usaha-usaha dan pembangunan yang dilakukan pada masa Belanda. Usaha-usaha itu berupa pembangunan fisik dan psikis. Fisik tampak pada pembangunan jembatan, rumah, sekolah, keterampilan, pemerintahan dan lain sebagainya. Sedangkan psikis menyangkut kesadaran akan diri sebagai orang Papua yang berbeda dengan bangsa lainnya yang memiliki hak dan kebebasan hidup seperti bangsa lainnya. Hak mengeluarkan pendapat, hak berserikat dan hak atas suatu kemerdekaan. Kedua model pembangunan ini didapatkan melalui pendidikan.

Selain itu, buku lain yang patut dikemukakan yaitu buku karya Leontine E Visser, *“Bakti Pamong Praja Papua Di Era Transisi Kekuasaan Belanda ke Indonesia”* buku ini secara singkat menjadi kajian dalam bab IV mengenai Pendidikan Masa Belanda di Papua Barat. Isi dari buku yang bersifar biografi mengisahkan pengalaman orang Papua yang ditempa sistem pendidikan Belanda dengan pembinaan karakter plus pengetahuan yang aplikatif untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

Selain itu, buku yang ditulis seorang sejarawan Rusia pada masa Perang Dingin untuk menyokong integrasi Papua ke dalam NKRI, karya G. Kesselbrenner, *“Irian*

Barat” terbitan tahun 1960, di Moskow.¹² Pada salah satu babnya, dibahas secara singkat topik yang penulis kaji. Buku ini membenarkan Indonesia sah untuk merebut dan memiliki Irian Barat (Papua Barat) hanya memaparkan alasan-alasan sejarah anakronistik yaitu Papua Barat sebagai bagian dari Sriwijaya, Majapahit dan sebagai jajahan Hindia Belanda. Selain itu buku ini membahas mengenai kenyataan-kenyataan ketertindasan Rakyat Papua pada masa kolonialisme Belanda.

Begitu juga dengan Buku karya: Natanegara Soewandha. E. 1986. *Api Perjuangan Irian Barat*. Jakarta: Yayasan Badan Kontak keluarga Besar Perintis Irian Barat. Buku ini memuat dokumen-dokumen dalam proses integrasi dan juga mengulas usaha-usaha yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam upaya hegemoni kekuasaan di Papua Barat.

Selain itu, buku yang ditulis oleh intelektual asli Papua Decki Natalis Pigay, *Evolusi Nasionalisme dan Sejarah Konflik Politik di Papua*. Buku yang terbit di Jakarta tahun 2000 beberapa topik bab dalam buku ini secara singkat menjadi kajian dalam skripsi ini. Buku ini mengkaji sejarah perpolitikan di Papua secara komprehensif untuk melengkapi historiografi Indonesia. Berbagai konflik politik di Papua Barat antara bangsa Papua dengan Belanda, bangsa Papua dengan Pemerintah Indonesia, serta Indonesia dengan Belanda didorong semangat untuk menguasai Papua Barat.

Adapun buku karya Agus Alua, *Papua Barat dari Pangkuan ke Pangkuan*, buku yang diterbitkan 2003 di Jayapura ini merupakan kajian sejarah Papua secara kronologis yang memperlihatkan proses perjalanan sejarah Papua. Salah satu topik dalam buku ini menjadi kajian dalam penulisan ini.

¹² Terus mengalami penambahan dan menjadi “*Irian Barat Wilayah Tak Terpisahkan dari Indonesia*” diterbitkan lagi di Indonesia pada tahun 2003.

Kemudian buku karya Djopari John RG. *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka*, yang terbit Jakarta 1993. Salah satu bagian dari buku ini yaitu bab II menjadi kajian dalam skripsi ini. Buku ini menguraikan tentang sejarah Papua Barat yaitu: Papua Barat Pada Masa Belanda, pada masa peralihan dari Belanda ke Indonesia, Berdirinya OPM serta perkembangannya sampai ke dunia internasional dan usaha memadamkan OPM.

E. Landasan Teori

Teori dalam bahasa Yunani *theori* yang berarti, “kaidah yang mendasari suatu gejala, yang sudah melalui verifikasi.¹³ Dalam arti yang paling sederhana dan mudah dipahami, teori adalah pendapat yang dikemukakan oleh para ahli telah diakui keabsahannya sebagai suatu keterangan mengenai suatu peristiwa. Landasan adalah dasar; tumpuan¹⁴ atau sesuatu yang dapat dijadikan patokan. Jadi yang dimaksud dengan landasan teori adalah pendapat yang dikemukakan oleh para ahli yang telah diakui kebenarannya tentang suatu peristiwa, dan pendapat para ahli yang telah diakui keabsahannya tersebut dijadikan patokan dalam penulisan suatu karya ilmiah. Kebenaran pendapat (teori) itu telah didasarkan pada penelitian dan penemuan, didukung data dan argumentasi.¹⁵

Teori digunakan untuk memberikan ramalan terhadap gejala-gejala baru yang akan terjadi dan juga mengisi lowongan-lowongan dalam pengetahuan tentang gejala-gejala yang telah dan yang sedang terjadi.¹⁶ Dalam konteks ini, teori akan digunakan sebagai landasan yang mengorganisir serangkaian penelitian untuk

¹³ Kuntowijoyo., *Pengantar Ilmu Sejarah*. Bentang. 2001.hlm. 116

¹⁴ Hasan Alwi dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2001, hlm. 633

¹⁵ *Ibid.*, 2001, hlm. 1177

¹⁶ Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 1989, hlm 10

menyimpulkan generalisasi-generalisasi dari fakta-fakta yang ditemukan, sehingga mendapatkan hasil penelitian yang relevan.

Adapun teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah teori kolonialisme. Kolonialisme berasal dari kata Romawi “*coloni*” yang berarti tanah pertanian atau “pemukiman”, maka *Oxford English Dictionary* (OED) mendeskripsikan sebagai,

“sebuah pemukiman dalam negara baru ...sekumpulan orang yang bermukim dalam lokalitas baru, membentuk sebuah komunitas yang tunduk atau terhubung dengan negara asal mereka. Komunitas yang dibentuk seperti itu, terdiri dari para pemukim asli dan para keturunan mereka dan pengganti-penggantinya, selama hubungan dengan negara asal masih dipertahankan”¹⁷

Proses pembentukan sebuah komunitas dalam negeri baru tentu berarti membubarkan atau membentuk kembali komunitas-komunitas yang sudah ada di sana, dan terjadi sejumlah besar praktek-praktek termasuk perdagangan, penjarahan, negosiasi, peperangan, pembunuhan massal, perbudakan, dan pemberontakan-pemberontakan. Maka menurut pandangan umum kolonialisme merupakan pengembangan kekuasaan sebuah negara atas wilayah dan manusia di luar batas negaranya, seringkali untuk mencari dominasi ekonomi dari sumber daya, tenaga kerja, dan pasar wilayah tersebut. Istilah ini juga menunjuk kepada suatu himpunan keyakinan yang digunakan untuk melegitimasikan atau mempromosikan sistem ini, terutama kepercayaan bahwa moral dari koloni lebih hebat ketimbang pribumi. Para ahli sepakat bahwa kolonialisme sebagai pengambilan secara paksa tanah dan perekonomian juga merupakan wahana bagi ekspor teknologi- teknologi Barat dan gagasan-gagasannya.¹⁸

¹⁷ Ania Loomba. *Kolonialisme/Pasca Kolonialisme*. Yogyakarta :Bentang Budaya. hlm. 1.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 27.

Koloni modern tidak hanya mengambil upeti, harta benda, dan kekayaan dari negara-negara takhukannya, tetapi juga merubah struktur perekonomian mereka, menarik mereka ke dalam hubungan kompleks, dengan negara-nega induk sehingga terjadi arus manusia dan sumber daya alam antara negara koloni dengan daerah kolonialnya.¹⁹

Penjelasan seperti itu tidak menunjukkan adanya pertemuan ataupun penaklukan atau dominasi sebagaimana terjadi ketika ada penemuan daerah baru, misalkan di Indonesia, Australia dan sebagainya yang telah terjadi kontak bahkan penaklukan dan dominasi. Dengan begitu Ania Loomba penulis buku *Kolonialisme/pascakolonialisme* mendefinisikan sebagai penaklukan dan penguasaan atas tanah dan harta benda rakyat lain. Tetapi kolonialisme dalam pengertian ini bukan hanya perluasan berbagai kekuasaan Eropa memasuki Asia, Afrika atau Benua Amerika dari abad keenam elas dan seterusnya; koloniaialisme telah merupakan suatu pemandangan yang berulang dan tersebar luas dalam sejarah manusia.²⁰

Dalam melihat kolonialisme lama dan kolonialisme baru, Ania Loomba merujuk dari Bottomore (1983) mengemukakan pandangan Marx, mengenai perbedaan di antara keduanya;

”Sementara kolonialisme-kolonialisme lama adalah pra kapitalis, kolonialisme-kolonialisme modern (baru) ditegakkan bersama dengan kapitalisme di Eropa Barat. Kolonialisme modern tidak hanya mengambil upeti, harta benda, dan kekayaan dari negeri taklukannya tetapi juga merubah struktur perekonomian mereka menarik mereka ke dalam hubungan kompleks dengan negara-negara induk sehingga terjadi arus manusia dan sumber daya alam antara manusia dan sumber daya alam antara negara-negara koloni dan negara-negara koloni lainnya”²¹

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 4.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 2-3

²¹ *Ibid.*, hlm. 4

Mengenai pengalaman orang atas eksploitasi kolonial seperti dikemukakan oleh

J. Horge Klor de alva, bahwa

”Di kebanyakan tempat, para penduduk aslinya, yang secara logis mengelompokkan diri menjadi unit-unit kultural terpisah (yaitu etnisitas), boleh dikata hampir-hampir lenyap setelah kontak, disapu secara fisis oleh penyakit dan perlakuan kejam, dan kemudian secara genetik dan sosial oleh perkawinan campuran, dan akhirnya, secara cultural oleh praktik-praktik religius dan politis ...bahkan di daerah-daerah di mana pribumi *survive* sebagai kelompok-kelompok fisis dalam komunitas-komunitas mereka sendiri yang sudah sangat berubah...”²²

Dalam memandang kolonialisme terjadi perbedaan pandangan di antara para pakar teori kolonialisme. Andre Gunder Frank, Pendukung dari kolonialisme berpendapat bahwa hukum kolonial menguntungkan negara yang dikolonikan dengan mengembangkan infrastruktur ekonomi dan politik yang dibutuhkan untuk pemodernisasian dan demokrasi. Franz Fanon Peneori ketergantungan, berpendapat bahwa kolonialisme sebenarnya menuju ke pemindahan kekayaan dari daerah yang dikolonisasi ke daerah pengkolonisasi, dan menghambat kesuksesan pengembangan ekonomi. Pengkritik post-kolonialisme berpendapat bahwa kolonialisme merusak politik, psikologi, dan moral negara terkolonisasi. Arundhati Roy, intelektual dan penulis India berkata bahwa perdebatan antara pro dan kontra dari kolonialisme/imperialisme adalah seperti "mendebatkan pro dan kontra pemerkosaan".²³

F. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah. Menurut Kuntowijoyo penelitian tentang sejarah merupakan sebuah kajian yang mendasarkan pada kegiatan

²² *Ibid.*, hlm. 10-11

²³ <http://en.wikipedia.org/wiki/koloni>. 28 April 2007. *Kolonialisme*.

ilmiah. Artinya, sejarah tidak dapat terlepas dari metode-metode ilmiah.²⁴ Yang dimaksud dengan metodologi penelitian sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Metode ini sangat bermanfaat bagi sejarawan untuk merekonstruksi masa lampau secara imajinatif berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh melalui historiografi.²⁵ Dengan demikian untuk memperoleh sejarah yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka diperlukan metode penelitian. Metode sejarah sendiri digunakan dalam usaha mengumpulkan bukti-bukti sejarah dan upaya untuk saling menghubungkan fakta satu dengan yang lainnya.

Mengenai metode sejarah, Menurut Louis Gottschalk ada empat langkah yang harus dijalani untuk merekonstruksi suatu peristiwa sejarah yakni mengumpulkan sumber (Heuristik), kritik sumber, interpretasi dan akhirnya menulis.²⁶ Adapun tahap-tahap yang digunakan dalam penelitian sejarah mencakup empat tahap, yaitu :

1. Metode Pengumpulan Data (*Heuristik*)

Setelah menentukan masalah yang akan diteliti, kemudian dilakukan pengumpulan data atau sumber (*heuristik*).²⁷ Ada dua cara yaitu, *Pertama*, melalui wawancara dengan pelaku sejarah dan aktivis dan rekan-rekan mahasiswa Papua, khususnya mereka yang aktif di pergerakan, seperti Aliansi Mahasiswa Papua, Front

²⁴ Fahsin M. Fa'al. *Negara dan Revolusi Sosial: Pokok-Pokok Pikiran Tan Malaka*. Yogyakarta: Resis Book. 2005, hlm. 10

²⁵ Louis Gottschalk. *Mengerti Sejarah*, Jakarta UI PRESS.1981. hlm. 32

²⁶ *Ibid.*, hlm. 33 - 40

²⁷ Kuntowijoyo., *Pengantar Ilmu Sejarah*. Benteng. 2001. hlm. 96. Dikatakan bahwa, Heuristik, yaitu tahap pengumpulan data tertulis maupun yang tidak tertulis atau lisan yang relevan dengan jenis sejarah yang akan ditulis. Sedangkan mengenai sifat dari penelitian ini adalah bersifat studi lapangan dan studi pustaka. Mengenai sumber ada tiga jenis sumber, pertama sumber lisan, sumber tertulis dan *artefak*. Dalam teknik pengumpulan sumber dilakukan melalui sumber lisan (dengan wawancara) dan mengumpulkan sumber tertulis dan *artefak* (foto, bangunan, alat-alat) dikategori berdasarkan sumber primer dan sekunder.

Persatuan Perjuangan Rakyat Papua Barat dan sebagainya. Namun cara ini tidak banyak dilakukan. *Kedua*, melalui penelitian studi pustaka.

Pengambilan sumber berdasarkan sumber *primer* dan *sekunder*. Sumber primer merupakan keterangan yang diperoleh dari pelaku sejarah berupa wawancara langsung dengan pelaku sejarah, notulen, manuskrip, foto dan panggalan film dokementer. Dalam penulisan ini, Sumber primer yang digunakan berupa, foto-foto Papua Barat pada masa jajahan Belanda, beberapa film seperti *bird of Papua* dan sebagainya. Sedangkan sumber sekunder antara lain, pertama buku yang ditulis oleh Schoorl Pim. 2001. *Belanda di Irian Jaya: Ambtenaar di Masa Penuh Gejolak 1945 – 1962*. Jakarta: Garba Budaya. E. 1986. *Api Perjuangan Irian Barat*. Jakarta: Yayasan Badan Kontak keluarga Besar Perintis Irian Barat. Kol Infan . Jdamhari dkk, 2000. *Trikomando Rakyat*, Jakarta. Mabes ABRI Pusat sejarah dan Tradisi ABRI. Osborne Robin. 2001. *Kibaran Sampari: Gerakan Pembebasan OPM, dan Perang Rahasa di Papua Barat*. Jakarta: ELSAM. Pigay Deki Natalis. 2000. *Evolusi Nasionalisme dan Sejarah Konflik Politik di Papua*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Djopari John RG. 1993. *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka*. Jakarta: Grasindo. Dan lainnya yang tidak dituliskan di sini.

2. Metode Analisis Data

Tahap selanjutnya adalah analisis data. Dalam metode analisis data ada dua hal yang harus dilakukan sebagai berikut:

a. Kritik Sumber (Verifikasi)

Setelah semua sumber primer maupun sekunder dikumpulkan kemudian dilakukan kritik terhadap sumber yang diambil. Ada dua macam kritik sumber.

Pertama, adalah kritik intern yakni kritik terhadap isi dari sumber sejarah yang akan digunakan untuk mengetahui kebenaran isi dan keaslian dokumen/sumber, apakah sumber atau data yang diperoleh dapat dipercaya atau tidak. Kritik intern dilakukan dengan cara membandingkan berbagai sumber satu dengan lain. *Kedua*, kritik ekstern, dilakukan untuk mengetahui keaslian sumber yang digunakan dalam penelitian. Kritik sumber dilakukan setelah sumber sejarah ditemukan, kemudian diamati ciri dan kualitas kertas dokumen tersebut, tinta atau bahan yang digunakan, gaya bahasa/penulisan, jenis huruf yang digunakan, serta tulisannya untuk mencocokkan dengan tahun terjadinya peristiwa sejarah itu. Dengan menemukan jawaban atas apa, di mana, dan bagaimana penulisan sejarah tersebut dilakukan. Hal ini akan membuktikan sumber yang didapat asli atau tidak untuk merekonstruksi suatu peristiwa.

Kritik sumber yang dilakukan dalam penulisan ini dapat ditemukan pada sumber primer berupa, pernyataan-pernyataan, foto-foto dan film-film. Sumber primer tersebut tampak keasliannya tidak diragukan. Hanya saja pada beberapa film dokumenter terlihat ideologi yang mewarnai pembuatan film dokumenter tersebut. Sedangkan pada sumber sekunderpun soal fakta kapan dan di mana terjadinya suatu peristiwa sudah sangat akurat. Namun hanya saja konstruksi kata dan kalimat tampak memposisikan subyektifitas penulis dalam memandang sejarah.

Kegunaan dari kritik sumber dalam penulisan sejarah adalah untuk menemukan dan mengetahui kadar otentitas dari sumber yang ditemukan

(keaslian sumber) dan kredibilitas. Dengan melakukan kritik sumber akan semakin menghindarkan peneliti dari kepalsuan atau ketidak aslian sumber.

b. Interpretasi

Interpretasi merupakan tafsiran terhadap sumber-sumber (fakta-fakta) sejarah yang telah ditemukan dan sudah diuji kebenarannya. Kemudian data itu dianalisis dan disintesis untuk ditarik suatu kesimpulan. Menurut Kuntowijoyo, interpretasi atau penafsiran sering juga disebut sebagai subyektivitas. Sebagian benar, tetapi sebagian salah. Benar karena, tanpa penafsiran sejarawan, data tidak bisa bicara. Sejarawan yang jujur akan mencantumkan data dan keterangan dari mana data itu diperoleh. Orang lain dapat melihat kembali dan menafsirkan ulang. Itulah sebabnya subyektivitas penulis sejarah diakui, tetapi perlu dihindari. Sedangkan mengenai interpretasi ada dua macam, yaitu analisis dan sintesis.²⁸

3. Pendekatan Penelitian

Sejarawan Indonesia terkemuka, Sartono Kartodirdjo mengemukakan dalam penelitian sejarah, pendekatan sangat diperlukan sebagai cara sejarawan/penulis memandang suatu peristiwa untuk memandang suatu peristiwa atau kejadian karena pendekatan akan membantu sejarawan/penulis dalam memandang dimensi-dimensi mana yang perlu diperhatikan, unsur-unsur mana yang perlu diperhatikan, unsur-unsur mana yang perlu diungkap dan sebagainya.²⁹

Penelitian ini masuk kategori sejarah politik, menggunakan pendekatan multidimensional. Menggunakan dua atau lebih disiplin ilmu yang saling berjalanan

²⁸ *Ibid*, hlm. 13

²⁹ Sartono Kartodirdjo. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia. 1992, hlm. 4

berdasarkan interaksi. Pendekatan multidimensional dalam penelitian ini menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial dan politik, seperti pendekatan sosial ekonomi, pendekatan sosial budaya.

Pendekatan politik dalam skripsi ini digunakan untuk meneropong upaya hegemoni Belanda menguasai Papua Barat. Pendekatan sosial budaya sebagai teropong untuk memahami keterbelakangan dan ketertindasan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat Papua Barat pada masa pemerintahan Belanda. Melalui pendidikan modern telah melahirkan golongan terpelajar dan membuka kesadaran akan rasa memiliki Papua Barat. Dengan begitu, pendidikan dan kesadaran budaya memberi sumbangan paham nasionalisme bangsa Papua.

4. Penulisan Sejarah (Historiografi)

Langkah terakhir dalam penelitian sejarah adalah penulisan sejarah atau historiografi. Merupakan upaya menghubungkan peristiwa yang satu dengan yang lain sehingga menjadi sebuah rangkaian tulisan sejarah. Sebagaimana mestinya, menulis kembali sejarah masa lampau, selalu dimulai dengan mengumpulkan dan merangkaikan serpihan-serpihan fakta sejarah. Sejarawan Indonesia terkemuka, Kuntowijoyo menuliskan tentang definisi sejarah tautologis mengatakan sejarah adalah apa yang dikerjakan sejarawan. Dalam artian, sejarawan mempunyai kebebasan merekonstruksi. Yang mengikat sejarawan hanyalah fakta sejarah.³⁰ Dalam historiografi setiap pembahasan ditempuh melalui deskripsi dan analisis dengan selalu memperhatikan aspek kronologis dari suatu peristiwa.³¹ Aspek kronologis ini penting karena sangat membantu dalam memberi kemudahan dan

³⁰ Kuntowijoyo., *op.cit.* hlm. 18.

³¹ Fahsin M. Fa'al, *op.cit.*, hlm. 13

penjelasan kepada penulis dan pembaca mengenai suatu peristiwa secara utuh dan jelas.

Penulisan skripsi ini menggunakan gaya penulisan deskripsi analitis. Hal ini dilakukan sebagai cara penulisan sejarah dalam pemecahan masalahnya dengan menggunakan keadaan obyektif pemikiran pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan penulis sebagaimana tampaknya atau sebagaimana adanya. Penulisan deskriptif analitis dikarenakan dalam pengkajian mengenai "PAPUA BARAT PADA MASA PEMERINTAHAN BELANDA" perlu dilihat ketertindasan kehidupan sosial, ekonomi, politik dan budaya serta perkembangan pendidikan dan dampaknya yang dialami bangsa Papua Barat.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas, tepat dan komprehensif mengenai skripsi ini, maka penulis menjelaskan garis besar isi, yang terdiri dari 5 bab:

- Bab I Merupakan pendahuluan memuat latar belakang, rumusan permasalahan, maksud dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab II Usaha Belanda Menguasai Papua Barat.
- Bab III Kondisi rakyat Papua Barat pada masa pemerintahan Belanda
- Bab IV Pendidikan di Papua Barat pada jaman Belanda
- Bab V Kesimpulan.

BAB II

USAHA BELANDA MENGUASAI PAPUA BARAT

Belanda adalah satu negara kecil di Eropa yang tidak memiliki kekayaan alam dan tandus. Namun Belanda mampu bersaing dengan negara kolonial lain seperti, Spanyol, Portugal, Inggris, Jerman dan negara penjajah Eropa lainnya. Belanda memiliki beberapa daerah koloni di Afrika, Amerika dan Asia. Daerah jajahan Belanda antara lain seperti, Hindia Belanda, Suriname, dan *Nederlands Nieuw Guinea* (selanjutnya Papua Barat).

Dalam konteks skripsi ini, akan dibahas mengenai upaya Belanda menguasai Papua Barat dan dalam bab ini ada empat hal yang akan dibahas yaitu: a) *Awal Pelayaran Belanda ke Papua Barat*; b) *Usaha VOC Menguasai Papua Barat*; c) *Resmi Dikuasai Belanda*; dan d) *Perluasan Kekuasaan Belanda*.

A. **Awal Pelayaran Belanda ke Papua Barat.**

Pada tanggal 18 November 1606 ekspedisi *Duifke* yang terdiri dari 3 buah kapal di bawah komandan Wiliam Janz berlayar meninggalkan Jawa. Singgah di kepulauan Kei dan Aru melalui Pantai Barat Daya dan tiba di sungai Digul, Merauke Papua Barat. Dengan tujuan menemukan *Isla Del Ora (Island of Gold)* seperti yang dikatakan pelaut Spanyol, Alvaro De Saavedra yang pernah berlayar ke Mexico dan singgah di pesisir pantai Utara Papua pada tahun 1528 dan memberi nama pulau itu, *Isla Del Ora (Island of Gold)* atau "Pulau Emas". Kemudian mereka melewati ujung

sebelah utara Australia yaitu di selat *Capenteria* di tepi sebelah barat Teluk *Cape York*.³²

B. Usaha VOC Menguasai Papua Barat.

Sepuluh tahun kemudian, pada masa kekuasaan *Verenigde Oos Indische Compagnie* (selanjutnya VOC) atau Kongsi Dagang India Timur yang didirikan pada tahun 1602³³, tepat pada tanggal 24 Juli 1616, Le Maire dan Wiliam Schouten melakukan pelayaran sampai ke arah timur melalui pantai utara menjelajahi pulau-pulau di Teluk Geelvink (sekarang: Teluk Cendrawasih) yang disebutnya *Schouten Eilanden* (kepulauan Schouten). Pulau-pulau itu antarlain, Pulau Biak, Ajawi, Insubabi, Supiori dan sebagainya. Di pantai timur mereka menemukan Kepulauan Admiralty, dan New Ireland yang keduanya kini menjadi bagian dari Papua New Guinea.

Untuk melakukan ekspedisi ke wilayah Papua Barat, VOC melepaskan dua kapal dipimpin Jan Carsten pada tahun 1623 untuk menyelidiki dan mencari kemungkinan perluasan perdagangan. Mereka berlayar dari Maluku dan menyusuri Pantai Selatan Papua Barat. Ketika sampai pada titik 4 derajat LS, melalui teropongnya Jan Carten melihat salju di puncak gunung dan menamai gunung itu "Carsten" (sekarang: Puncak Jaya). Dalam laporan yang dia buat dituliskan bahwa pegunungan itu bersalju dan letaknya kira-kira 10 mil dari pantai. Melihat salju di daerah tropis adalah suatu keajaiban, sehingga sekembalinya ia menyampaikan hal itu

³² Natalis Pigay. *Evolusi Nasionalisme dan Sejarah Konflik Politik di Papua*, Jakarta: Sinar Harapan. 2000. hlm. 112.

³³ G. Moedjanto. *Indonesia Abad Ke-20, seri I*. Yogyakarta: Kanisius. 1988. hlm. 16. Dituliskan juga bahwa VOC memiliki hak-hak kedaulatan (hak-hak kenegaraan) antara lain: a) hak mengadakan perjanjian dengan negara-negara lain, b) hak memerintah daerah-daerah lain di luar Nederlands dan mendirikan badan-badan pengadilan, c) hak membentuk tentara, d) hak mengeluarkan dan mengedarkan mata uang.

kepada orang Belanda lainnya. Informasi ini menarik perhatian bangsa barat untuk datang melihat kebenaran akan hal itu, terutama menarik perhatian para ahli geologi bangsa Belanda seperti Colijn dan Dozy yang berminat datang beberapa abad kemudian.

Pada tahun 1660 dilakukan perjanjian antara VOC dengan Ternate, Tidore dan Bacan mengenai batas-batas wilayah kekuasaan atas Papua Barat dan pengamanan batas perairannya dari gangguan pengacauan orang Papua. Perjanjian tersebut diperbaharui tahun 1667 di mana VOC mempertegas kedaulatan Tidore atas wilayah kepulauan sekitar Papua Barat.³⁴ Kemudian, pada tahun 1678 tampak untuk pertama kalinya bendera Belanda ditancapkan di beberapa tempat di pesisir pantai bagian Barat Papua. Lalu, pada 1705 pelaut Belanda Geelvink dan Kraavogel melayari dan memetakan teluk Cendrawasih. Setelah itu teluk itu dinamai *Geelvink Bai* atau Teluk *Geelvink*.³⁵

Tahun 1710 dari memorandum timbang terima Gubernur Claaz di Maluku terlihat bahwa VOC mengakui kekuasaan Tidore atas pulau-pulau di sekitar Pulau Papua.³⁶ Tahun 1779 Gubernur Belanda di Maluku (J.R. Thomazen) mengakhiri kekuasaan Tidore atas kepulauan di perairan Papua Barat, karena Sultan Tidore tidak dapat dikendalikan Belanda. Belanda melakukan penangkapan terhadap Sultan Tidore beserta Putra Mahkota dan Sultan Bacan, lantas disingkirkan (ditawan) di Batavia (Jakarta).³⁷

³⁴ Agus Alua, *Dari Pangkuan Ke Pangkuan : Suatu Iktisar Kronologis*, Jayapura: Sekretariat Presidium Dewan Papua, 2002. hlm. 6

³⁵ Don. Flassy, *Vedemecum Perjuangan dan Rendez-Vous dengan tuntutan Papua Volkem sebuah Deskripsi Psikosomatis*, Jayapura, 1999. hlm. 41.

³⁶ Agus Alua, *op.cit* .hlm.6

³⁷ Koentjaraningrat dkk, *Irian Jaya: Membangun Masyarakat Majemuk*, Jakarta : Gramedia, 1993. hlm. 49.

C. Papua Barat Resmi dikuasai Belanda

Setelah VOC dibubarkan Pada 31 Desember 1799, pemerintah Belanda mengambil alih atas semua wilayah kekuasaan VOC dikuasai langsung oleh pemerintah Belanda di Amsterdam. Pada tanggal 28 Juli 1828 pertama kali pemerintah Belanda melakukan upaya untuk menguasai wilayah Papua Barat. Di pantai selatan, tepatnya di utara kepulauan Aru mendarat dua kapal yaitu; *Triton* dan *Iris* yang dipimpin oleh A.J Van Delden seorang komisaris pemerintah Belanda bersama kapten-letnan J.J. Steenboom komandan kesatuan yang mendapat tugas untuk mengiringi Komisaris Pemerintah yang dikirim oleh Gubernur Belanda di Maluku untuk mendirikan Benteng sebagai bukti yang ingin ditunjukkan bahwa daerah pantai selatan, mulai dari garis 141 derajat BT sampai semenanjung *Goede Hoop* di pantai utara sebagai milik Belanda.³⁸

Pada tanggal 24 Agustus 1828, yaitu pada hari ulang tahun raja Belanda Willem I di Belanda diadakan upacara perayaan, sementara pada saat yang sama di Papua Barat diadakan upacara resmi berdirinya benteng Belanda yang pertama kali di Papua Barat. Didirikan di teluk *Triton*, Kaimana (Fak-Fak) diresmikan pada hari ulang tahun Raja Belanda Willem I. Benteng didirikan oleh Komisaris A.J. van Del atas nama Gubernur Maluku.³⁹ Di hadapan sejumlah perwira, serdadu, pegawai komisi penelitian ilmiah, dan orang-orang pribumi, komisaris pemerintah Belanda van Delden membacakan suatu proklamasi yang menyatakan bahwa ”atas nama dan untuk Sri Bagianda Raja Nerderland...” bagi daerahnya Nieuw Guinea serta daerah-daerah di pedalaman yang mulai pada garis 141 derajat Bujur Timur di pantai selatan sampai ke *Goede Hoop* di pantai utara dinyatakan sebagai milik Belanda.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 47

³⁹ Agus Alua, *op.cit.* hlm. 6

Sesudah proklamasi dibacakan, Bendera Belanda dinaikkan dengan disertai dentuman meriam sebanyak 21 kali, yang ditembakkan dari benteng pertama Belanda di Papua Barat, *Fort du Bus* di teluk Triton⁴⁰

Rupa-rupanya ketika ada perubahan iklim di daerah benteng *Fort du Bus*, alam di sana tidak lagi memihak. Perubahan iklim yang terjadi mengganggu kesehatan dari para penghuni benteng itu. Dengan berbagai pertimbangan, pada pada tahun 1835 Benteng *Fort du Bus* dibongkar, meskipun sudah gugur 10 orang perwira, 50 orang prajurit dalam membangun Benteng *Du Bus*.⁴¹ Gubernur Maluku memerintahkan supaya mencari tempat lain yang lebih baik untuk mendirikan Benteng. Namun upaya itu gagal, rupanya Belanda tidak mendapatkan tempat penggantinya.⁴²

Untuk menguasai Papua Barat, pada tanggal 30 Juli 1848 Gubernur Hindia Belanda J.J. Rochussen mengeluarkan suatu keputusan rahasia yang menetapkan batas-batas kekuasaan Tidore atas Papua Barat. Ia menetapkan batas timur 140.47 BT pantai utara di semenanjung Bonpland (*Teluk Humboldt*) sampai ke Barat dan titik 141 BT di pantai selatan sebagaimana diatur di dalam proklamasi 24 Agustus 1828. Dengan keputusan rahasia itu segala milik (kekuasaan) Tidore dihapuskan dan menjadi milik Belanda. Kebijakan ini diambil secara rahasia karena adanya sengketa antara Inggris dan Belanda atas *Nieuw Guineea* atau pulau Papua.⁴³

Pada tahun 1849-1850 Pemerintah Belanda berupaya mematok seluruh wilayah Papua Barat, mulai dari pantai utara sampai selatan sebagai daerah kekuasaannya.⁴⁴ Meskipun Belanda telah menyatakan diri menguasai daerah Papua Barat, namun

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 48.

⁴¹ Pim Schoorl, *Belanda di Irian Jaya Amtenar di Masa Penuh Gejolak 1945 – 1962*, Jakarta, Garba Budaya. 2001. hlm. 2

⁴² Koentjaraningrat dkk. 1993, *op.cit.* hlm. 51

⁴³ Agus Alua, *op.cit.* 2002. hlm. 7. Baca juga Koentjaraningrat : 51; van Schie: 15

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 7

dengan gagalnya membangun benteng di *Fort du Bus* dan setelah tidak mendapatkan tempat yang cocok maka pada tahun 1861 pemerintah Belanda mengambil keputusan untuk tidak akan mendirikan benteng pengganti *Fort du Bus* di daerah lain.⁴⁵ Hal ini menunjukkan, bahwa usaha Belanda di Papua Barat gagal meskipun daerah itu diklaim van Delden sebagai bagian dari kekuasaan Belanda. Kegagalan itu disebabkan karena kondisi alam yang tidak mendukung.⁴⁶ Dalam tahun itu juga pemerintah Belanda melarang orang Tidore untuk mengambil budak dari tanah Papua. Pada tahun 1879 pemerintah Belanda membeli kembali semua budak dari Papua yang ada di Ternate dan Tidore, lalu membebaskan mereka.⁴⁷

Selama puluhan tahun Pemerintah Belanda membiarkan daerah Papua Barat. Daerah ini menjadi, “daerah yang dilupakan” Karena tidak memperlihatkan keuntungan ekonomi. Namun pada tanggal 11 Oktober 1871 A. Smith menempatkan tanda patok batas kekuasaan Belanda di Pantai Utara bagian timur, yakni di semenanjung *Bonpland* (sudut timur di Teluk Humboldt) di bawa kelapa-kelapa pada titik 141.9 BT. Patok ini berbentuk besi panjang dengan gambar lambang Kerajaan Belanda.⁴⁸ Pemerintah Belanda mematok seluruh wilayah Papua Barat dari Pantai Utara hingga Pantai Selatan sebagai wilayah kekuasannya.⁴⁹ Hanya untuk memperlihatkan bahwa daerah itu telah menjadi milik pemerintah Belanda. Pada tahun 1875 baru Pemerintah Belanda secara resmi mencatat Papua Barat sebagai wilayah jajahan Belanda, dengan titik batas utara 14.47 dan batas selatan 141 BT.⁵⁰

⁴⁵ Koentjaraningrat dkk, *op .cit.* hal. 48-53.

⁴⁶ Natali Pigay, *op.cit.* 2000. hlm 118.

⁴⁷ Van Schie. Diktat Kuliah: *Agama Kristen di Irian (Seri Sejarah Agama II)*, Jayapura:STTK. Hlm.16

⁴⁸ Koentjaraningrat dkk, *op .cit.* hal. 52.

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 52

⁵⁰ Agus Alua, *op.ci.t*, hlm, 13

D. Upaya Perluasan Kekuasaan Belanda

Kemudian pada tahun 1898 Belanda menganggarkan sebanyak f 115. 000,- untuk mendirikan perwakilan pemerintahan Belanda⁵¹ di Papua Barat dan menyatakan kepada Inggris dan Jerman (dari Irian Timur)⁵² bahwa daerah itu milik Belanda. Untuk merealisasikan anggaran dari parlemen Belanda, maka dibuka pos-pos pemerintahan baru. Pemerintahan Hindia Belanda membagi *Nieuw Guinea ke dalam dua Afdeling* (wilayah) di bahwa keresidenan Maluku, yakni *Afdeling Noord Nieuw Guinea* (wilayah utara) ibu kota di Manukwari dan *Afdeling West en Zuid Nieuw Guinea* (wilayah barat dan selatan) dengan ibu kota di Fak-Fak meliputi kepulauan Raja Ampat⁵³. Kedua wilayah itu masing-masing dipimpin oleh seorang *Countroleur* keresidenan Maluku. Kemudian pada tahun 1894 pemerintah Belanda mendirikan pos perdagangan di Manukwari.⁵⁴ Hampir setengah abad pos pertama dibuka tahun 1898 tidak mendapat perhatian.⁵⁵ Ketika, ada ancaman dari Inggris soal daerah koloni, pemerintah Belanda pada tahun 1901 mendirikan lagi sebuah *Afdeling Zuid Nieuw*

⁵¹ Koentjaraningrat dkk, *op.cit.*1993. hal. 53; Wets Pact. 1:26

⁵² Natalis Pigay, *op.cit.* hlm. 119. Jaman pada saat itu Bangsa Barat berlomba mencari daerah jajahan untuk mendapatkan rempah-rempah yang dibutuhkan mereka, sekaligus mencari pasar untuk memperdagangkan hasil-hasil industri produk dari negeri Eropa. Saat itu Eropa semakin berkembang pesat dengan adanya revolusi Industri. Belanda tentu merasa terancam, karena keberadaan Inggris dan Jerman yang menguasai daerah Papua bagian timur. Sebagai melihat kesatuan pulau Papua yang luas itu Jerman dan Inggris juga terpikat dan tertarik untuk melakukan ekspansi kekuasaan ke Irian bagian Barat (Saat ini Papua Barat) yang sebenarnya sudah dikuasai oleh Belanda, karena rupanya ada lirikan dari Jerman dan Inggris melihat bahwa Belanda tidak serius dan sungguh-sungguh menjadikan Papua Barat sebagai daerah koloninya. Lagi pula saat itu dalam tahun 1870 ada pemberontakan yang dilakukan Nuku dari kerajaan Tidore.

⁵³ Pim Schoorl, *op.cit.*, hlm. 600.

⁵⁴ *Ibid*, 13; Wet Pact. 1: 25

⁵⁵ Koentjaraningrat, *op. cit*, 1993. hlm. 63. Pembukaan pos-pos di Papua Barat bukan berarti Papua Barat lepas secara kultural dan politis dari kerajaan Tidore, sebab pada saat itu pemerintah Belanda mengalami kesulitan untuk membangun rakyat Papua Barat. Hal ini dibuktikan oleh Colinj ketika Belanda mempunyai keinginan untuk melepaskan Papua Barat secara kultural dari kerajaan Tidore pada tahun 1904 tetapi hal itu tidak dilaksanakan sebab rakyat Papua Barat bisa dibangun apabila mereka didekati dengan pendekatan kultural. Kegagalan pemerintah Belanda lainnya adalah dorongan perasaan pesimistik di kalangan pejabat Belanda yang menganggap bahwa daerahnya terhempas luas atau dengan alasan sukunya primitif, bahkan kontroril dari daerah Fak-Fak (*West en Zuid Nieuw Guinea*) beranggapan bahwa ciri-ciri daerah itu yang berkubudayaan Islam berlainan sekali dengan daerah lainnya. Pandangan ini pernah dikemukakan oleh B.J. Haga seorang Maluku yang ditugasi oleh pemerintah Belanda ketika disuruh membuat laporannya di tahun 1935.

Guinea sebagai daerah mandiri di bawah pemerintahan seorang Asisten Residen otonom⁵⁶ yang terpecah dari *Afdeling West Nieuw Guinea*.⁵⁷

Kemudian pada tanggal 14 Februari 1902 pemerintah Belanda membuka Ibu kota *Afdeling Zuid Nieuw Guinea* di muara kali Moro, yang diberi nama Merauke. Pada saat hari itu juga untuk pertama kali Bendera Belanda dinaikkan dan ditempatkan seorang Asisten Residen.⁵⁸ Di Merauke didirikan suatu pertahanan militer dikelilingi pagar berduri untuk mengantisipasi serangan dari penduduk pribumi terhadap petugas Belanda dan para pembantu mereka.⁵⁹ Sebenarnya *Zuid Nieuw Guinea* sejak tahun 1902 merupakan suatu *Afdeling* tersendiri, tetapi kemudian dihapuskan oleh Belanda, lalu dipersempit dengan membentuk *onder Afdeling* yang masing-masing dipimpin oleh seorang *kontrleur* dan di bawahnya terdiri dari satu *bestuursort* di Boven Digul dan empat *bestuursort* di Merauke⁶⁰ supaya mengatasi kekuasaan Inggris masuk ke Papua Barat.⁶¹

Satu tahun setelah penempatan residen di Merauke tampaknya sudah ada dua buah toko Eropa dan 12 takoh Tionghoa.⁶² Kegiatan perdagangan menjadi lancar dengan datangnya orang-orang luar seperti penjualan sayur-sayuran, kelapa dipertukarkan dengan alat-alat besi. Keadaan daerah Merauke memungkinkan untuk mengadakan kolonisasi, pada tahun 1903 pemerintah Belanda mulai mendatangkan

⁵⁶ Pim Schoorl, *op.cit.* hlm. 600.

⁵⁷ Koentjaraningrat, *op. cit.* hlm. 55

⁵⁸ *Ibid*, 55: West Pact. 1 :27

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 64. Baca juga Pigay, hlm, 122

⁶⁰ The Liang Gie dan Soegeng Istanto, *Pertumbuhan Pemerintahan Propinsi Irian Barat*, Yogyakarta: Seksi Penerbitan, Fak, Sospol Universitas Gadjah Mada, 1968 hal, 44. Baca juga Natalis Pigay. 2000. hlm 123.

⁶¹ Ross Garnaut. 1979. *Perubahan Sosial Ekonomi di Irian Jaya*. Jakarta: Gramedia. hlm.15. Baca juga Natalis Pigay. 2000. hlm. 122. Dikatakan bahwa, pada saat itu pemerintah Inggris di Papua memerintah Inggris agar serangan-serangan pengayau yang dilancarkan oleh suku Marin dihentikan.

⁶² Koentjaraningrat, *op.cit*, hlm. 64-65. Baca juga Natalis Pigay 2000. hlm, 122

orang Jawa ke Merauke sebagai pegawainya.⁶³ Pada tahun 1904 pemerintah Belanda meningkatkan status *Hollandia* menjadi *Ofder Afdeling* (sub-wilayah) dari *Afdeling Noor Nieuw Guinea*. Belanda menempatkan seorang petugas di sana.⁶⁴

Pada tanggal 7 Maret 1910 tercetus deklarasi Batavia oleh pemerintah Belanda menetapkan wilayah *Nederlndch Nieuw Guinea* tidak termasuk wilayah Hindia Belanda. Batas Hindia Belanda mulai dari Aceh sampai Maluku sesuai dengan wilayah kekuasaan Gubernur Hindia Belanda. Sedangkan *Nederlandssch Nieuw Guinea* (dan Suriname) langsung di bawah pengawasan pemerinatahan Belanda di Nederlands.⁶⁵ Tahun 1921 status *Nieuw Guinea* ditingkatkan menjadi Asisten *Residen* dan ibu kotanya berkedudukan di Manukwari⁶⁶ Pada tahun 1923 wilayah *Nieuw Guinea* menjadi status penuh sebagai suatu *Keresidenan*.⁶⁷ Pada tahun 1927 Gubernur Jendral de Graff memerintahkan supaya Digul, Papua Barat dijadikan tempat pembuangan bagi pejuang-pejuang kemerdekaan Indonesia. ⁶⁸

Tahun 1931 pemerintah Belanda mulai survey minyak di *Nieu Guinea*.⁶⁹ Tahun 1935 sehubungan dengan kegiatan eksplorasi minyak sejumlah perusahaan dari Inggris, Belanda dan Amerika Serikat mendirikan perusahaan minyak bersama *Nederlansch Nieuw Guinea Petroleum Maattschapij* (NNGPM).⁷⁰ Tahun 1935

⁶³ *Ibid.*, hlm. 55

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 55-56

⁶⁵ Agus Alua. *op.cit.*, hlm. 16

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 16

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 16

⁶⁸ Ros Garnaut, *op.cit.* hlm 15. baca juga Pigay , 123. Sesudah pemberontakan di Pulau Jawa lebih dari 800 orang hukuman Belanda dikirim dengan kapal ke tanah Merah , 500 kilometer di hulu sungai Digul. Orang yang dianggap pejuang kemerdekaan seperti Syahril dan Hatta diasingkan ke Digul. Tidak sedikit tahanan yang dibuang ke Digul mereka diperbolehkan keluarga untuk membuka lahan-lahan pertanian di Merauke. Menjelang tahun 1937 dilaporkan bahwa pengawasan yang tidak begitu ketat terhadap 200.000 orang. Pejabat-pejabat Belanda mengepalai lima belas pos patroli dan pejabat-pejabat Indonesia yang dianggap pangkatnya paling rendah disertai tugas untuk mengurus 50 pos patroli yang paling kecil.

⁶⁹ Agus Alua, *op.cit.*, hlm 16

⁷⁰ *Ibid.*, hlm, 16

pemerintah Belanda mengajukan keberatan atas permintaan Sultan Tidore untuk menyerahkan kekuasaan atas *Nieuw Guinea* sepenuhnya kepadanya.⁷¹ Justru pada tanggal 19 Februari 1936 (dalam Lebaran Negara No. 69), *juncto* penetapan Gubernur tanggal 25 Mei 1938 No. 28 (Lembaran Negara No. 264) Mengenai Timur Besar terkecuali *Keresidenan Nieuw Guinea* yang akan ditentukan kemudian.⁷² Lembar negara tersebut menyepakati pembagian daerah teritorial Hindia Belanda yaitu Sabang sampai Amboina tidak termasuk Papua Barat atau *Nederlands Nieuw Guinea*. *Nieuw Guinea* (Papua Barat) dan Indonesia merupakan daerah jajahan Belanda, namun Administrasi Pemerintah Papua Barat diurus secara terpisah.⁷³ Indonesia yaitu mulai dari Sabang sampai Amboina dikendalikan dari Batavia. Sedangkan kekuasaan Belanda di Papua Barat dikendalikan dari *Hollandia* (sekarang *Port Numbay*), dengan batas kekuasaan mulai dari kepulauan Raja Ampat sampai Merauke.⁷⁴

Tahun 1936 tim pemetaan udara KLM menemukan danau-danau (Danau Pania, Tigi dan Tage) di Pania. Sesuai nama pilot penemu daerah-daerah itu diberi nama Danau-danau Wissel (*Wiselmeren*).⁷⁵ Pada tahun 1938 Pemerintah Belanda membuka Pos Pemerintahnya di Enarotali, Paniai.⁷⁶ Tahun 1940 pemerintah Belanda membuka rute penerbangan Ambon-Fak-Fak- Babo-Manukwari-Danau Wissel.⁷⁷ Dalam tahun itu juga pemerintah Belanda lebih aktif membangun *Nieuw Guinea* dengan membagi wilayah itu menjadi wilayah atau *Afdeling* (yakni: Utara, Barat, dan Selatan dengan jumlah sub wilayah (*Ofderadeeling*)).⁷⁸ Sedangkan di daerah pedalaman Papua Barat

⁷¹ Koentjaraningrat, *op.cit.* hlm, 56-57

⁷² Natalis Pigay, *op.cit* 2000.168.

⁷³ Agus Alua, *op. cit.*, 2002, hlm. 6.

⁷⁴ Yakobus Dumupa. *Berburu Keadilan di Papua*. Yogyakarta: Pilar Media, 2006, hlm. 22.

⁷⁵ Agus Alua, *op.cit*, hlm. 16

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 17

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 17

⁷⁸ Koentjaraningrat, *op.cit.*, hlm 64-66.

pada saat itu belum ada *Afdeling*.⁷⁹ Sehingga di tahun 1940 daerah pedalaman Papua Barat tidak muncul di dalam pembagian pemerintahan yang dibagi oleh Gubernur Timur Besar di Maluku, yang telah digambarkan di atas.

Secara administratif berdasarkan putusan Gubernur Timur Besar yang dituangkan dalam Bijblad No. 14377, daerah Papua Barat termasuk dalam keresidenan Malua yang terdiri dari tiga *Afdeling* yang masing-masing meliputi sejumlah *onder Afdeling*. Pertama, *Afdeling West Nieuw Guinea* yang berkedudukan di Fak-Fak, Inanwatan dan Mimika. Kedua, *Afdeling Noord Nieuw Guinea* dengan ibu kota Manukwari dibagi dalam lima *Onder Afdeerdeling* meliputi tiga *Onder Afdeling* meliputi: Manokuari, Serui, Sarmi, Hollandia dan Sorong. Ketiga, *Afdeling Tual* yang berkedudukan di kepulauan Kei, untuk Papua Barat meliputi *Onder Afdeling Zuid Nieuw Guinea* yang berkedudukan di Merauke dan *Onder Afdeling* di Boven Digul. Di daerah-daerah yang termasuk ke dalam *Afdeling* Monokwari secara historis masuk kesultanan Tidore, maka dibentuk “*Zelf Besturend Landschapen Tidore behoorende districten*” atau merupakan daerah swatantra kesultanan Tidore.⁸⁰

Di daerah jajahan, pemerintah Belanda mengenal dua sistem. Sistem pertama adalah penyelenggaraan pemerintah dalam lingkungan wilayah yang langsung dikuasai oleh Hindia Belanda atau yang disebut “*Diect bestuur gebied*” atau

⁷⁹ Belanda secara resmi belum mendirikan pos pemerintahannya di daerah pedalaman. Bahkan daerah pedalaman Irian baru dikenal Belanda di tahun 1936-38 melalui para misionaris (penyiaran agama) berkebangsaan Belanda. Seperti Paniai pertama kali ditemukan oleh Letnan Wissel di tahun 1936 kemudian disusul dengan Pater Tilesman seorang misionari Katolik dan Dr. Jefferey, Deibler dan Walter Post di tahun 1938-39, sedangkan di wilayah Amungme mereka mulai mengenal budaya modern baru tahun 1954 Tentang kehadiran para misionaris Kristen lihat Benni Giay, *Gembalakanlah Untukku, Gereja Kemah Injil Irian Jaya dalam masa yang tengah berubah.*, (Jayapura: Deiyai, 1988) hlm. 3-33. Sebenarnya kehadiran Misionaris bukan untuk menjelaskan secara konperhensif tentang sejarah di wilayah itu, namun perlu dijadikan acuan dengan mayoritas suku di Pegunungan Tengah Irian Jaya beragama Kimi/ Kema Injil, sehingga ada dugaan bahwa mereka adalah perintis sejarah. Sedangkan Sivilisasi suku Amungme dengan budaya modern lihat, Tom Beanal, Amungme Megaboart Negel Jombei..

⁸⁰ Penjelasan selengkapnya tentang pembagian administrasi ini lihat Koentjaraningrat 1993; 69-71 atau The Liang Gie dan Sugeng F. Istanto., hlm 42 – 46. Baca juga Natalis Pigay. 2000. hlm. 124.

“*Gouvernementsgebied*” sistem yang kedua adalah penyelenggaraan pemerintah melalui kerajaan asli yang ada di tempat di mana mereka menguasai. Sejak dahulu pada umumnya semua kerajaan yang ada selalu diikat dengan perjanjian atau kontrak politik yang oleh Belanda disebut “*Zelf bestuurend landschapen*.” Ini tidak bisa langsung diperintah oleh Belanda karena mempunyai pemerintah sendiri. Sistem kedua dilaksanakan oleh Belanda karena pada umumnya negara Eropa yang berasal dari budaya feodalisme dan budaya itulah yang mempengaruhi mereka untuk menerapkan sistem itu di daerah jajahan.

Pada tanggal 27 Desember 1949 berlakulah *Berst Bewindsregeling Nieuw Guinea* yang ditetapkan oleh Ratu Belanda. Ini merupakan peraturan ketatanegaran baru bagi wilayah dan hak-hak penduduk *Nieuw Guinea*; dinas-dinas pemerintahan umum; pengangkatan, pemberhentian, kekuasaan dan tanggung jawab Gubernur *Nieuw Guinea*; dewan para kepala jawatan dan bidang kerja; dewan penasehat untuk kepentingan pribumi, susunan kekuasaan dan sidang Dewan Perwakilan *Nieuw Guinea*; anggaran keuangan; pembagian wilayah pemerintahan dan daerah-daerah otonom; urusan keuangan, pertahanan, pendidikan, kesehatan dan urusan sosial; kemakmuran rakyat, urusan niaga, dan pelayaran. Semuanya ada 181 Pasal dengan ketentuan umum serta peralihannya.⁸¹

Untuk menyesuaikan tata pemerintahan dengan *Besluit Bewindsregeling Nieuw Guinea* tersebut, Gubernur mengeluarkan keputusan tertanggal 14 Juni 1950 Nomor 43 Januari 1949 dan 13 Juli 1945 tentang status wilayah *Nieuw Guinea* sebagai wilayah *neolandschap*. Jadi status itu dihapuskan terhitung tanggal 1 Juni 1950, dan *Nieuw Guinea* menjadi *zelfbestuurend landschap (Gouvernementsblad*

⁸¹ The Liang Gie dan F. Soegeng Istanto, *op.cit.*, hlm. 51.

1950/12).⁸² Menurut *Besluit* tersebut, Gubernur menyelenggarakan pemerintahan umum atas nama Ratu Belanda di *Nieuw Guinea* (Titel I Pasal I). Gubernur menyelenggarakan pemerintahan-pemerintah umum di *Nieuw Guinea* atas nama dan sebagai Wakil Ratu Belanda. Sesuai dengan ketentuan dalam peraturan ketatanegaraan dan dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk Ratu (pasal 29) Gubernur diangkat dan diberhentikan oleh Ratu Belanda (pasal 11). Selama masa pemerintahan *Nederlands Nieuw Guinea*, jabatan Gubernur berturut-turut dipegang oleh S.L. J. van Waardenburg (awal 1950 - Maret 1953), J. van Baal (April 1953 - April 1958) dan terakhir Pieter J. Platteel (Mei 1958 sampai September 1962).⁸³

Dalam pelaksanaan tugasnya, *Gubernur Nederlands Nieuw Guinea* dibantu oleh *Diaesten van Algemeen Besttu* (Dinas-Dinas Pemerintah Umum). Tugas dan wewenangnya diatur dengan persetujuan dari Ratu Belanda. Masing-masing dinas itu dikepalai oleh seorang direktur yang diangkat dan diberhentikan oleh Ratu Belanda setelah musyawarah dengan Gubernur (pasal 60 *Bewindsregeling Nieuw Guinea*). Pada awalnya hanya ada 4 dinas yang kemudian dalam perkembangannya menjadi 8 dinas yaitu:

1. *Dienst van Financien* (Keuangan)
2. *Dienst van Social Zaken en Justitie* (urusan sosial dan kehakiman)
3. *Dienst van Gezondheidszorg* (kesehatan)
4. *Dienst van Binnenlandse zaken* (urusan pemerintahan dalam negeri)
5. *Dienst van Cultureel Zaken* (urusan kebudayaan)
6. *Dienst van Economische Zaken* (urusan ekonomi)
7. *Dienst van Veerkeer en Energie* (perhubungan dan tenaga)
8. *Dienst van Openbare Werken* (pekerjaan umum)

Para direktur dinas pemerintah umum itu merupakan sebuah Dewan Kepala (*Raad van Diensthooften*). Dalam dewan ini termasuk pula Jaksa Agung

⁸² *Ibid.*, hlm 52.

⁸³ *Ibid.*, hlm. 52.

(*Commandant Zeemacht*). Selain dinas pemerintah umum tersebut, Gubernur dibantu oleh Sekretaris Pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan tata-usaha.

Pada awal tahun 1950 untuk memperkuat posisi keresidenan baru Pemerintah Belanda mengangkat seorang gubernur bernama S.L.J. van Waardenburg (awal 1950-Maret 1953) dan dibentuk empat *Afdeling* (*keresidenan*) yakni *Noord Nieuw Guinea* dengan ibukota *hollandia*, *Zuid Nieuw Guinea* dengan ibu kota di Merauke dan *West Nieuw Guinea* dengan ibu kota di Sorong sedangkan *Central Nieuw Guinea* ibu kotanya belum terbentuk.⁸⁴ Tanggal 10 Mei 1952 Gubernur van Waardenburg mengadakan perubahan dalam pembagian wilayah Pemerintahan ke dalam 4 *Afdeling* , yakni *Noord Nieuw Guinea* (terdiri dari 6 *onderAfdeling*), *Zuid Nieuw Guinea* (3 *onder Afdeling*), *Central Nieuw Guinea* (hanya 1 *onder Afdeling*) dan *West Nieuw Guinea* (9 *onder Afdeling*).⁸⁵

Pada bulan Maret 1961 sidang Parlemerter Belanda membahas Rencana Pembangunan 10 tahun yang disusun oleh Mr. Bot (wakil Menlu Belanda Urusan *Nieuw Guinea*) sebagai langkah awal persiapan kedaulatan rakyat Papua. Salah satu dari rencana 10 tahun pembangunan itu adalah; Program dalam kepemimpinan eksekutif dan legislatif. Dalam rangka itu wilayah Papua Barat dimekarkan ke dalam beberapa *keresidenan*, dari 4 *keresidenan* menjadi 6 *keresidenan*, dan dibuka pula sejumlah dinas. Jabatan-jabatan dalam *keresidenan*, dan dinas-dinas itu kebanyakan dijabat oleh orang Papua. Menurut rencana kemerdekaan Papua Barat secara *de jure* akan diberikan pada akhir tahun 1970. Dalam rangka persiapan kemerdekaan sejumlah pemuda dan Pelajar Papua Barat dikirim ke Belanda untuk

⁸⁴ Agus Alua, *op. Cit.*, hlm. 39; (Koentjaraningrat : 83; Djopari : 26 dan Aryesam : 39-40)

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 40 ; (Koentjaraningrat : 83)

studi dan magang untuk sejumlah ketrampilan teknis.⁸⁶ Untuk tiap *Afdeling* di Papua Barat (lihat tabel I) dikepalai seorang *Resident* yang pada awalnya adalah orang Belanda dan kemudian menjelang upaya dekolonisasi akan diberikan kepada orang Papua sendiri untuk memimpin daerahnya.⁸⁷ Tiap *Afdeling* dibagi ke dalam *Onder Afdeling* yang dikepalai oleh *Hoofd van Plaatselijk Bestuur* (Kepala Pemerintah Setempat). Selain itu ada wilayah yang dinamakan *Exploratie-ressort* yaitu wilayah yang belum diselenggarakan pemerintahan, karena belum dikenal keadaannya dan masih dalam tahap penelitian/penyelidikan. Suatu *ondefdeeling* dibagi lagi dalam beberapa *District* yang dikepalai oleh *Districthoofd* atau *Bestuur* (lihat tabel II).

Jumlah *District* pada saat itu sebanyak 73 buah. *Bewindsregeling Nieuw Guinea* pasal 72 menetapkan tentang pembentukan suatu *Nieuw Guinea Raad* yang beranggotakan 21 orang.⁸⁸ Dengan undang-undang tanggal 10 November 1960 tersebut 454 ditetapkan ketentuan tentang pemilihan anggota *Nieuw Guinea Raad*. Pada tanggal 15 April 1961 terbentuklah *Nieuw Guinea Raad* dengan jumlah anggota 28 orang dimana 16 orang dipilih langsung oleh rakyat, 12 orang diangkat oleh *Gouverneur* diantaranya terdapat satu orang wanita Papua dan 5 orang Eropah.⁸⁹ Mereka menduduki pemerintahan *Nederlands Nieuw Guinea*⁹⁰ (lihat tabel III).

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 40; (Aryesam : 61-65; Djopari:33).

⁸⁷ Leontine E. Visser dan Amapon Jos Marey. *Bakti Pamongpraja Papua: Di Era Transisi Kekuasaan Belanda ke Indonesia*. Jakarta: Kompas. 2000. hlm VII-VIII

⁸⁸ The Liang Gie dan F. Soegeng Istanto, *op.cit.* hlm. 52-56

⁸⁹ R.G. Jopari. *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka*, Jakarta: Grasindo. 1993. hlm. 28

⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 29. baca juga The Liang Gie dan F. Soegeng Istanto. *op.cit.* 52-56

BAB III

KEADAAN RAKYAT PAPUA BARAT PADA MASA PEMERINTAHAN BELANDA

G. Kesselbrenner,⁹¹ melalui bukunya ”*Irian Barat Wilayah Tak Terpisahkan dari Indonesia*”⁹² tampak profokatif menguraikan situasi dan kondisi penindasan kolonial Belanda. Menurut dia untuk menyesatkan pendapat umum di dunia, yang mencela aksi-aksi perampasan Belanda terhadap Papua Barat. Penjajah Belanda menggembar-gemborkan ke semua pihak apa yang menurut mereka telah mereka laksanakan bagi perkembangan Papua Barat. Mendengarkan pidato para wakil resmi Belanda di Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai masalah Papua Barat, dapat timbul kesan seolah-olah satu-satunya tujuan yang dikejar oleh Belanda di Papua Barat

⁹¹ G. Kesselbrenner. *Irian Barat Wilayah takterpisahkan dari Indonesia*. Teplok, Jakarta. 2003, hlm 127-147. G. Kesselbrenner adalah sarjana dari Rusia

⁹² Buku ini ditulis agak propokatif dalam memandang sejarah kolonialisme Belanda di Papua Barat yang pada saat itu (1961) terjadi Perang Dingin. Ia tampak mendukung Indonesia menentang neo-kolonialisme Amerika dan Belanda di Papua Barat. Dia adalah salah seorang intelektual yang menulis sebuah buku cukup “propokatif” memperlihatkan wacana-wacana kekerasan dan perbuatan terhadap penduduk pribumi Papua Barat dan juga mengulas kondisi masyarakat Papua secara umum pada masa Belanda menjajah Papua Barat. Dikatakan provokatif, karena buku ini ditulis sewaktu itu untuk membangkitkan, menggerakkan atau membakar “api semangat” juang pemimpin, militer dan masyarakat Indonesia untuk merelakan diri berjuang merebut Papua Barat. Di dalam buku itu G. Kesselbrenner menguraikan membenarkan Indonesia sah untuk merebut dan memiliki Irian Barat (Papua Barat). Meskipun tidak mendasar bagi Indonesia untuk dapat menguasai Papua Barat, G. Kesselbrenner hanya memaparkan alasan-alasan sejarah anakronistik yaitu sejarah sebelum negara Indonesia terbentuk sebagai kesatuan bangsa dan politis. G. Kesselbrenner tidak bedanya dengan sejarawan nasionalis Indonesia yang menulis sejarah Papua Barat sebagai bagian dari Sriwijaya, Majapahit dan sebagai jajahan Hindia Belanda. Papua Barat menurut G. Kesselbrenner merupakan daerah wilayah tak terpisahkan dari Indonesia. Sebagaimana mitos yang telah dibangun oleh Soekarno dan Yamin untuk merebut Papua Barat. Karya G. Kesselbrenner tampaknya, berupa dukungan moril Rusia (sosialis) kepada Indonesia (Soekarno) yang juga penganut Paham yang sama dengan Rusia, hanya saja di Indonesia (Soekarno) menyederhanakan sesuai konteks Indonesia yang disebutnya Marhenisme.

adalah mengubah Papua Barat menjadi surga di bumi bagi penduduknya. Tetapi kenyataan-kenyataan yang sesungguhnya memberikan keyakinan sebaliknya.⁹³

Surat kabar “*New York Times*” akhir tahun 1957 menulis mengenai kaum penjajah Belanda “*terkenal di kawasan Asia sebagai penguasa kolonial yang paling kejam dan serakah.*” Kekuasaan kaum penjajah yang mengakibatkan Papua Barat menjadi salah satu daerah di dunia yang paling terbelakang. Dengan penduduk yang paling tertindas dan paling malang nasibnya di antara tanah-tanah jajahan di Timur.⁹⁴

Dari uraian singkat di atas itu ada lima hal yang akan menjadi pembahasan dalam bab ini yaitu: a) *Perampasan tanah bangsa Papua*; b) *Kerja paksa dan diskriminasi*; c) *Kondisi pangan dan kesehatan*; d) *Kondisi budaya dan pendidikan*; dan e) *Kondisi ekonomi*

A. Perampasan Tanah Bangsa Papua

Penyitaan tanah oleh Belanda tanpa kenal ampun mengusir orang Papua Barat dari tanah yang dimilikinya sejak jaman purbakala. Tanah-tanah yang terbaik dikuasai oleh kaum kolonial perorangan untuk masa 75 tahun. Penggunaan tanah untuk jangka waktu yang begitu lama itu membuktikan bahwa maskapai-maskapai kaum kolonialis asing dan kaum kolonialis perorangan itu pada hakekatnya memperoleh hak milik tetapi atas tanah yang direbutnya dan tidak hendak meninggalkan Papua Barat.⁹⁵ Tahun-tahun terakhir, administrasi kolonial Belanda sering mengusir suku-suku tertentu secara massal dari tanah-tanah miliknya ke desa-desa yang baru

⁹³ *Ibid.* hlm. 127

⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 128

⁹⁵ *Ibid.*, hlm 127 - 129

dibangun.⁹⁶ Tahun 1956 sudah terdapat kurang lebih 60 perkampungan dibangun dengan cara paksa demikian (dengan 100-450 warga di masing-masing desa). Ini dilakukan tidak hanya untuk merebut tanah bangsa Papua. Juga diusahakan untuk memusatkan penduduk-penduduk dalam desa yang besar, di mana administrasi kolonial lebih mudah melakukan penghisapan atas penduduk, serta dapat mengontrol “kesetiaan” orang-orang Papua.⁹⁷

Majalah AS “*Anthopological Quarterly*” bulan juli 1959 menuliskan, bahwa bangsa Papua Barat dipaksa hidup “dalam kampung-kampung yang padat, di mana terdapat syarat bagi pemeriksaan dan pengawasan secara efektif” selanjutnya majalah ini menguraikan secara panjang lebar, bagaimana para pembesar kolonial mengusir suku-suku Muyu (13.000 jiwa) yang semua tinggal di daerah barat daya pesisir Papua. Dalam mengusir Suku Bangsa Muyu dari tanah miliknya kaum penjajah menggunakan cara-cara yang paling kejam dan tanpa perikemanusiaan: polisi dalam waktu-waktu tertentu menghancurkan gubuk-gubuk rakyat Papua Barat di tengah hutan, ternak peliharaan dibinasakan; di mana-mana orang dipaksakan kerja sebagai budak belian. Orang yang tak mau menuruti keinginan kolonial dijebloskan ke dalam penjara.

B. Kerja Paksa dan Diskriminasi

Administrasi kolonial makin luas dan tenaga kerja paksa orang Papua dipakai tanpa dibayar. Kaum penjajah secara paksa menggiring mereka keperkebunan-

⁹⁶*Ibid.*, hlm 129. Di Papua Barat tidak ada undang-undang yang melindungi hak penduduk Papua atas tanah yang menjadi milik. Cukup kiranya dikatakan, bahwa undang-undang agraria di daerah itu diatur berdasarkan undang-undang kolonial tahun 1875 yang hanya diberlakukan dalam jangka waktu tertentu di Hindia Belanda menurut pengakuan para pembesar kolonial sendiri, undang-undang itu sekali-kali tidak menjadi penghalang bagi perampasan tanah milik penduduk bumiputra.

⁹⁷ *Ibid.*, hlm 129

perkebunan yang baru dibuka atau perusahaan-perusahaan milik maskapai asing yang sebagian besar adalah milik Belanda dan AS. Di sana pada hakekatnya berlaku kerja paksa. Pada waktu kepala keluarga digiring ke tempat kerja paksa, ini berarti ia kehilangan nafkah dan terpaksa mengalami nasib mati kelaparan. Satu contoh: lebih kurang 3.000 orang Papua Barat dari 12 desa di kumpul di daerah lembah Nimboran untuk bekerja di tempat yang disebut perusahaan pertanian (percontohan) “teladan”, di mana dilakukan penanaman padi dan berbagai jenis kacang. “sistem kontrak sewa” tenaga buruh mulai diperlakukan secara luas di Papua Barat.⁹⁸

Nederlandsch Nieuw Guinea Petroleum Maatschppij (NNGPM) mempekerjakan kira-kira 1000 orang Papua Barat pada puncak eksplorasi di tahun 1930-an. Di mana ditemukan minyak bumi di Sorong dan dekat Teluk Bintuni pada tahun 1939 yang secara komersial diusahakan sesudah perang Dunia kedua atau perang Pasifik berakhir.⁹⁹ Administrasi kolonial menggunakan tenaga kerja paksa penduduk Papua Barat untuk pembangunan pangkalan-pangkalan militer di Papua. Banyak orang Papua Barat menolak bekerja resikonya sebagai tindakan balasan kaum penjajah menangkap kepala-kepala suku. Menurut catatan yang masih belum lengkap, tahun 1954 lebih kurang 10.000 orang Papua Barat bekerja di perusahaan milik Belanda. Banyak orang Papua Barat digerakkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang paling berat dan merugikan kesehatan. Mereka dipaksa bekerja dalam produksi minyak, di tambang-tambang batu bara dan di tambang-tambang milik maskapai AS dan Belanda. Alat-alat untuk keselamatan kerja di perusahaan itu tidak ada sama sekali. Para buruh Papua Barat dihisap dengan kejam; undang-undang perburuhan tidak ada, karena kaum penjajah memandang rakyat Papua Barat sebagai

⁹⁸ *Ibid.*, hlm 130-131

⁹⁹ Ros Garnaut dan Chris Manning, *op.cit.* hlm. 15-16.

manusia yang sangat rendah derajatnya. Penduduk Papua Barat tidak mempunyai hak apa-apa. Yang dapat diharapkan oleh rakyat Papua Barat paling tinggi adalah jabatan mantri dan anggota kepolisian. Di antara rakyat Papua Barat yang berhasil mendapat pendidikan rendah pun tidak berhak ikut duduk dalam badan-badan “pemerintahan sendiri”.¹⁰⁰

Di pelosok Papua Barat berlaku diskriminasi dalam pembayaran upah kerja. Upah maksimum seorang buruh Papua Barat berkualifikasi tidak sampai setengah dari upah minimum seorang Belanda. Diskriminasi ras yang sangat kasar juga terbukti dari kenyataan berikut : kaum penjajah membentuk Serikat Buruh Katolik, KAB (*Katholike Arbeidersbeweging*) di Papua Barat. Namun hanya boleh dimasuki orang-orang Belanda. Dalam Anggaran Dasar serikat buruh tersebut terdapat pasal khusus, di mana ditegaskan dengan terang-terangan bahwa orang Papua Barat dan Indonesia yang bekerja di pulau itu tidak punya hak untuk menjadi anggota Serikat Buruh KAB. Seluruh aktivitas buruh yang reaksioner itu berlangsung di bawah semboyan : “Kebutuhan hidup orang Belanda dan orang Papua Barat sama sekali berbeda”.

C. Kondisi Pangan dan Kesehatan

Menarik hasil tinjauan seorang jurnalis, Arslan Humbarachi, yang salah satu uraiannya dimuat dalam surat kabar “Suluh Indonesia” menulis, bahwa dalam bulan Juni 1959: “kekuarangan makanan yang senantiasa dialami oleh penduduk Papua Barat merupakan kenyataan yang luar biasa menyedihkan. Anak-anak dan orang-orang tua penderita penyakit *brongeroedeem* (busung lapar) akibat selalu kekurangan

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 131-132

makanan, yang menyebabkan tubuh manusia menjadi lemah seluruhnya dan perutnya menjadi buncit. Kekurangan makanan yang senantiasa dialami itu menimbulkan juga penyakit paru-paru dan berbagai macam penyakit kulit. Hal ini diuraikan oleh para dokter Belanda sendiri, yang menganggap pemerintah Belanda sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas keadaan tersebut.”

Beribu-ribu orang Papua mati karena kelaparan, tetapi pemerintah kolonial tidak mengambil tindakan efektif apa pun untuk mencegah mala petaka dahsyat itu. Untuk mendapatkan laba yang lebih banyak, kaum penjajah Belanda yang seharusnya memperbanyak hasil pertanian yang begitu diperlukan oleh penduduk Papua, justru sehebat-hebatnya tanah garapan yang ditanami berbagai macam tanaman untuk ekspor.

Kaum penjajah Belanda praktis tidak mengambil tindakan apapun untuk memperbaiki keadaan yang sukar dalam memelihara kesehatan penduduk Papua. Jumlah personil kedokteran dan rumah sakit tidak memadai untuk kebutuhan umum penduduk. Menurut catatan resmi di daerah itu hanya ada 57 dokter. Jumlah itu adalah untuk daerah yang luasnya meliputi lebih dari 400 ribu kilo meter persegi, dengan penduduk yang jumlahnya lebih kurang sejuta orang. Jumlah dokter yang sangat sedikit itupun masih belum mencerminkan keadaan yang sesungguhnya. Sebab, di antara dokter di Papua Barat itu hidup di kota-kota, dan terutama hanya melayani pegawai Eropa pada aparat kolonial yang jumlahnya sangat besar. Di samping itu sebagian dari dokter tidak berdinasi pada pemerintah kolonial, tapi melakukan praktek partikelir.¹⁰¹

¹⁰¹ *Ibid*, hlm. 135-136

Keadaan yang sama buruknya berlaku juga dalam hal rumah sakit yang jumlahnya di Papua Barat sangat sedikit. Tahun 1955 rumah sakit di Papua Barat hanya ada 1.150 tempat tidur. Di samping itu perlu disebut, bahwa lebih dari 30% dari jumlah tempat tidur itu ada dalam rumah-rumah sakit partikelir.

Tidak adanya pertolongan kesehatan dalam hal-hal yang elementer pun memudahkan penyebaran penyakit malaria yang merupakan bahaya besar bagi penduduk. Bahaya wabah penyakit menular tersebut terdapat dalam bentuk yang lebih dahsyat di pesisir barat daya dan pesisir selatan daerah itu. Meluasnya malaria mengakibatkan banyak orang meninggal. Salah satu akibat yang paling membahayakan dari penyakit berbahaya itu adalah mundurnya daya tahan organisme tubuh manusia terhadap berbagai macam wabah. Pada hakekatnya pemerintah kolonial Belanda tidak berusaha memberantas penyakit malaria. Meluasnya wabah-wabah penyakit itu menjadi begitu membahayakan hingga kaum penjajah sendiri pernah terpaksa meninggalkan Teluk Triton.¹⁰²

Apa yang dinamakan “perlawanan” pemerintah kolonial terhadap malaria di Papua Barat terbatas pada penyebaran surat-surat selebaran di mana diberikan seruan kepada penduduk untuk “berjuang melawan malaria”. Surat selebaran itu disebarakan dalam jumlah sangat besar dari pesawat terbang di seluruh daerah Papua, meskipun kaum penjajah tahu dengan baik sekali, bahwa tidak seorang pun akan membacanya. Seperti diketahui, hampir seluruh penduduk daerah itu buta huruf sama sekali. Sandiwara menggelikan dengan menggunakan surat selebaran itu diperlukan untuk memamerkan seolah-olah badan-badan pemerintah Belanda mengurus dengan baik kesehatan penduduk Papua Barat yang ditindas dan dihisap olehnya itu. Kaum

¹⁰² *Ibid.*, hlm. 136-137

penjajah Belanda bukannya mengambil tindakan yang efektif terhadap penyakit malaria. Melainkan dengan giat mempropagandakan teori reaksioner yang isinya salah-olah di antara penduduk asli terjadi proses meningkatnya kekebalan secara alamiah terhadap malaria.¹⁰³

Kesehatan masyarakat Papua Barat juga terganggu oleh penyakit frambosia yang merusak dan menghabiskan daya tahan tubuh manusia. Menurut catatan pemerintah kolonial Belanda yang jauh dari lengkap, 50.000 orang Papua Barat menderita penyakit itu. Berbagai macam penyakit daerah tropis, disentri dan TBC juga sangat merajalela. Setiap tahun wabah penyakit influenza dan difteri mengakibatkan meninggalnya beribu-ribu orang. Menurut catatan yang diumumkan dalam majalah “*De Tifa*” di daerah Jafi saja mati lebih kurang 15% dari jumlah penduduk Papua Barat akibat penyakit difteri.¹⁰⁴

Kaum penjajah tidak melakukan usaha apapun untuk memberantas wabah penyakit tersebut. Badan-badan kekuasaan kolonial sama sekali kurang menyediakan pos anggaran belanja bagi tindakan pencegahan wabah penyakit. Meskipun keadaan kesehatan penduduk Papua Barat buruknya. Untuk keperluan kesehatan pemerintah kolonial hanya menyediakan 6% dari dana anggaran belanja. Tidak mengherankan bahwa jumlah kematian, terutama anak-anak, sangat tingginya. Kaum penjajah sendiri bahkan terpaksa juga mengakui kenyataan itu. Menurut pemberitaan pers, angka kematian di Papua Barat adalah 30-40%.¹⁰⁵

Akibat dikendalikannya kekuasaan oleh kaum penjajah, banyak suku di Papua Barat terancam bahaya, yakni lambat laun mereka akan binasa untuk selamanya.

¹⁰³ *Ibid.*, hlm. 137-138

¹⁰⁴ *Ibid.*, hlm. 138

¹⁰⁵ *Ibid.*, hlm 139

Misalnya di daerah Papua Barat sebelah Selatan, di daerah yang luasnya 50.000 kilo meter persegi, hidup suku Kaya-kaya. Para pemburu bangsa Belanda yang berburu burung cendrawasih untuk dijual di Eropa dengan harga sangat tinggi, sudah mendatangkan jenis-jenis penyakit kelamin di Papua. Penyakit itu begitu luas merajalela, hingga mendapat ancaman riil bahwa lambat laun suku itu akan binasa seluruhnya. Kebinasaan penduduk bumi putra secara pelan-pelan akhirnya tidak dapat menjadi halangan bagi kemungkinan untuk mengembangkan daerah tersebut. Bahkan lebih dari itu, kadang-kadang timbul kesan pada kaum penjajah bahwa perkembangan daerah itu justru lebih bermartabat oleh adanya suku-suku terbelakang seperti suku Kaya-Kaya itu.¹⁰⁶

Wakil negeri Belanda “Komisi Internasional mengenai soal-soal bagian Selatan Teduh”¹⁰⁷ yang khususnya mempelajari hal-hal yang mengakibatkan turunnya jumlah penduduk Papua, terpaksa mengakui secara resmi bahwa di daerah Selatan Papua Barat nampak jauh penduduk merosot tajam. Catatan statistik mengenai kesehatan di Papua Barat pada kenyataannya tidak ada samasekali. Keadaan di sana begitu buruk, sehingga bagi kaum penjajah tidak menguntungkan untuk mengumumkan catatan mengenai hal itu.

Keadaan serius demikian itu tidak hanya terjadi di daerah Papua Barat Selatan. Setiap tahun jumlah penduduk daerah-daerah pedalaman Papua Barat pun berkurang. Perlu dicatat, bahwa kemerosotan tersebut berlangsung dengan kepesatan yang mengawatirkan.¹⁰⁸ Dalam buku “*West Irian and the World*” yang diterbitkan

¹⁰⁶ *Ibid.*, hlm 139-140

¹⁰⁷ *Ibid.*, 140. Komisi itu dibentuk tahun 1947. didalamnya termasuk Australia, Inggris, Selandia Baru, AS dan Perancis.

¹⁰⁸ *Ibid.*, hlm. 140-141

Indonesia, ditegaskan: “tidaklah berlebihan kalau dikatakan, bahwa besar penduduk Papua Barat berada di tepi jurang kemusnahan”¹⁰⁹

D. Kondisi Budaya dan Pendidikan

Perkembangan budaya rakyat Papua Barat pun dalam keadaan yang menyedihkan. Dengan maksud memelihara kekuasaannya atas daerah itu kaum penjajah Belanda mengungkung penduduk Papua Barat dalam kebodohan. Mereka dengan segala macam cara mencegah berkembangnya hubungan-hubungan sebelum masa feodal. Kebijakan itu tercermin dengan jelas dalam pemeliharaan kaidah-kaidah patriarkhat dan adat-adat suku-suku yang paling terbelakang. Juga dalam keengganan membuka sekolah-sekolah. Kaum penjajah tidak mengambil tindakan apapun untuk memberantas buta huruf yang meliputi penduduk dewasa.¹¹⁰

Dalam buku “*Question of West Irian*” yang diterbitkan oleh kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, dikemukakan catatan-catatan yang membuktikan tanpa dapat disangkal sangat rendahnya tingkat pendidikan di Papua Barat di daerah yang tidak terhitung luasnya itu bekerja kurang dari seribu guru. Hanya 27 orang di antaranya dibiayai oleh pemerintah kolonial. Dengan sendirinya hanya sedikit anak-anak Papua Barat yang mempunyai kemungkinan untuk mengikuti pendidikan dalam apa yang disebut “sekolah-sekolah peradaban.” Tingkat pendidikan pendahuluan di sekolah-sekolah itu begitu rendah, sehingga kepada anak-anak tidak diberikan dasar-dasar kepandaian membaca dan menulis.¹¹¹

¹⁰⁹ *Ibid.*, hlm. 141

¹¹⁰ *Ibid.*, hlm. 141-1942

¹¹¹ *Ibid.*, hlm. 142

Dalam edisi Agustus 1960 Majalah “Australia Outlook” diberitakan, bahwa di Papua Barat sebanyak 32.000 orang anak menuntut pelajaran di sekolah, sebagian besar, 28.000 orang, mutlak memerlukan belajar di sekolah-sekolah desa, “yang tingkatnya seperti lasimnya adalah sangat rendah”. Yang dimaksud di sini ialah apa yang disebut “sekolah-sekolah peradaban”. Di mana anak-anak belajar selama setahun saja. Sesudah itu beberapa di antaranya dapat meneruskan pelajaran di sekolah rendah 3-4 tahun. Pelajaran diberikann dalam bahasa Indonesia atau bahasa-bahasa daerah setempat. Tingkat berikutnya adalah sekolah-sekolah tingkat ke dua tipe “A” dan “B” yang jumlahnya di daerah itu tidak banyak. Di sekolah tipe “A” pelajaran sepenuhnya diberikan dalam bahasa Belanda selama 5-6 tahun. Wajib belajar pendidikan rendah tidak ada sama sekali.¹¹²

Di Papua Barat terdapat beberapa sekolah menengah tetapi sekolah-sekolah itu khusus untuk anak-anak pegawai pemerintahan kolonial. Di Papua Barat tidak ada satu sekolah tinggi pun, dan tak seorang rakyat Papua Barat pun sampai saat itu belum pernah mendapatkan pendidikan tinggi. Kalangan penguasa di *Nederland Belanda* menyediakan hanya satu tempat saja di Universitas Leiden bagi orang Papua.¹¹³

Pada hakekatnya, masalah “pendidikan” di Papua Barat berada di tangan organisasi-organisasi Misionaris AS dan Belanda yang banyak jumlahnya. Organisasi-organisasi itu pada dasarnya berusaha untuk membuat rakyat Papua Barat memeluk agama Kristen dan itu terkadang dilakukan dengan paksa. Para guru sekolah-sekolah di Papua Barat lazimnya tidak bersekolah sampai tingkat pendidikan menengah. Pekerjaannya dibiayai oleh para Misionaris. Tetapi bayaran mereka itu

¹¹² *Ibid.*, hlm. 142-143

¹¹³ *Ibid.*, hlm. 143

begitu rendah, sehingga mereka hanya dapat hidup dengan dukungan materi penduduk yang juga hidup melarat. Tidak mengherankan sama sekali, bila jumlah buta huruf di tengah penduduk Papua Barat mencapai 97 %.¹¹⁴

Bagi para pegawai aparat kolonial diterbitkan buletin penerangan “*En bier is bet Nieuws*”, yang distensil dengan *oplaag* 2.000 eksemplar. Menurut catatan resmi, di seluruh perpustakaan di Papua Barat terdapat kurang lebih dari 10 ribu buku.¹¹⁵ Untuk membenarkan pendudukannya atas Papua Barat pemerintah Belanda suka mengajukan alasan seolah-olah ia memikul “tanggungjawab atas perkembangan daerah dan penduduk yang terbelakang”. Tetapi kenyataan-kenyataan yang telah di ajukan di atas tadi sama sekali bertentangan dengan pernyataan-pernyataan palsu “para penyebar peradaban” imperialis itu. Hal itu membuktikan adanya pengaruh negatif yang disebarkan oleh kaum penjajah terhadap kondisi kehidupan penduduk Papua.¹¹⁶

Keuntungan-keuntungan raksasa monopoli Belanda dan AS lebih dari cukup untuk dapat menutup secara berlimpah pengeluaran untuk pendidikan dan pengajaran di daerah itu. Tetapi kaum penjajah tidak mau menyisihkan bagian sepentasnya dari keuntungan-keuntungan itu untuk kebutuhan vital penduduk Papua Barat. Surat kabar Indonesia “Merdeka”, menjawab pertanyaan tersebut sebagai berikut: “Tidak ada uang untuk mendirikan sekolah buat anak-anak Papua, tetapi rupanya ada uang untuk mendirikan *jachtclub* (kumpulan pemburu) seperti yang lasim ada di zaman Nederlands-Indie dulu. Tidak ada uang untuk mendirikan lapangan bagi anak-anak

¹¹⁴ *Ibid.*, hlm. 144

¹¹⁵ *Ibid.*, hlm. 144

¹¹⁶ *Ibid.*, hlm. 147

suku Papua, tetapi ada uang berpuluh ribu buat mendirikan lapangan tenis bagi orang Belanda.”¹¹⁷

E. Kondisi Ekonomi

Mengenai ekonomi masyarakat Papua Barat pada zaman Belanda masih menganut sistem tradisional. Mereka mengelola alam hanya untuk kebutuhan hidup mereka. Ekonomi modern dengan sistem uang dan pasar dikenalkan Belanda, Cina dan pendatang lainnya yang membangun kios-kios. Pengenalan ekonomi modern seperti itu tidak merata. Hanya terdapat di pinggir kota yang telah dibangun oleh Belanda dengan pemukiman dari penduduk pendatang. dan masyarakat yang ada di daerah itu, mereka menggunakan ekonomi modern. Namun di tempat lain yang belum dibuka pemerintah Belanda masyarakat masih menganut sistem ekonomi tradisional seperti barter hasil buruan dengan hasil pertanian dan sebagainya.

Pemerintah Belanda membangun perkebunan-perkebunan kelapa meliputi beberapa ribu lahan dan perusahaan Jepang mempekerjakan 1.100 karyawan dalam produksi damar (kopra) untuk pernis. Pengusaha-pengusaha Cina membawa tembakau, porselin, barang-barang tekstil serta peralatan dari baja untuk menukarnya dengan teripang, massoi, damar, kopra, burung Cenderawasih. Semuanya dilakukan secara kecil-kecilan yang menguntungkan Cina. Gudang-gudang dan toko-toko semuanya menyediakan jasa untuk pos-pos patroli yang utama yaitu Manokwari, Fakfak, Merauke.

Sebelum tahun 1949 *Nieuw Guniea* atau Papua diintegrasikan dengan ekonomi Hindia-Belanda. Beras dan barang-barang kebutuhan lainnya diimpor melalui pelabuhan Makassar atau Ujung Pandang demikian juga dengan bahan-bahan ekspor

¹¹⁷ *Ibid.*, hlm. 144-145

yang dikirim melalui pelabuhan ini. Sesudah perang Pasifik, hubungan dagang dengan Indonesia terputus dan hubungan langsung dengan luar negeri melalui laut terbuka,¹¹⁸ yaitu melalui pelabuhan Hongkong dan Singapura. Aktivitas ekspor – impor dilakukan perusahaan *Nieuw Guinea Import Export Maatschappij* (NIGIMIJ) dan beberapa perusahaan dengan Cina, seperti Kho Hongkong Gan, Eng Tjie Kiat dan Go Ban Hen. Penjajah Belanda yang lama meninggalkan Papua Barat semakin membuka mata dan menguasai Papua Barat ketika mulai ditemukan tambang minyak dan kekayaan alam lain yang bernilai jual tinggi di pasaran Eropa dan eksploitasi dilakukan tidak menguntungkan bagi masyarakat Papua.

Sebagian besar ekspor terdiri dari minyak bumi digali dan diambil dari kota Sorong dan sekitarnya. Meskipun ada pendapat mengenai sumber minyak bumi di sekitar kota Sorong dan daerah sekitarnya itu tidak besar dan cepat merosot setelah mencapai puncaknya pada tahun 1954. Namun telah memberikan pemasukan yang besar bagi Belanda dan AS. Kebanyakan barang-barang ekspor berupa hasil bumi, laut, dan hutan: Fakfak, Merauke, Sorong, dan Manokwari merupakan daerah ekspor yang utama.¹¹⁹

Kekayaan alam Papua Barat dieksploitasi dan hasil produksi untuk ekspor diangkut melalui kapal langsung dari pelabuhan-pelabuhan Hollandia, Sorong, Biak, Merauke dan Manokwari ke negeri Belanda, Singapura, dan Hongkong yang merupakan pasar utama. Pelayaran yang teratur dan mendapat subsidi, diselenggarakan oleh pemerintah dan swasta yang menghubungkan kurang lebih 50 perusahaan kecil di sepanjang pesisir pantai dan sungai-sungai untuk kepentingan ekspor dan perdagangan. Mengenai tenaga kerja, tercatat 18.987 buruh di mana dua

¹¹⁸ *Ibid.*, hlm. 9.

¹¹⁹ Ros Garnaut dan Chris Manning, *op.cit.* hlm. 21.

pertiganya mencari nafkah di kota-kota (yaitu keadaan pada tahun 1961). Tercatat sebanyak 10.500 orang Papua Barat bekerja dalam dinas pemerintah.¹²⁰ Namun orang Papua Barat dipekerjakan sebagai buruh kasar (kelas tiga), sedangkan kelas nomor satu adalah orang Belanda dan Cina serta kelas kedua termasuk pekerja dari Hindia-Belanda.

Menurut peraturan gaji tahun 1957, seorang pelaut mendapat upah perbulan \$ 42, pekerja kasar/buruh \$ 50, calon pegawai \$ 57, guru sekolah dasar \$ 67 dan guru berijazah \$ 124. Karena biaya impor rendah serta pengangkutan yang teratur dan bersubsidi, menyebabkan harga barang impor di kota-kota menjadi relatif lebih rendah dan dapat dijangkau oleh daya beli masyarakat.¹²¹ Namun ketika itu hanya masyarakat yang berada di tepian kota yang bisa merasakannya. Sedangkan kebanyakan penduduk pribumi yang jauh dari kota tidak merasakan hasil-hasil impor dari luar. Mereka masih mengkonsumsi tumbuhan dan makanan asli yaitu sagu dan umbi-umbian.

Penyuluhan pertanian memperkenalkan tanaman-tanaman baru yaitu jenis hortikultura serta berbagai jenis ikan air tawar dalam pertanian pedesaan. Untuk itu sebuah pusat penelitian pertanian didirikan di Manokwari pada tahun 1961 dengan nama Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pertanian Manokwari (LPPPM) yang dibiayai oleh *European Economic Community Development Fund*. Pembangunan 865 ha areal tanaman pala di Fak-Fak, 1.352 ha tanaman coklat/cacao di Manokwari, Ransiki, Serui dan Genyem. Pengembangan areal tanaman kopi di pedalaman Pegunungan Tengah (Paniai dan Jayawijaya) dan di Serui seluas 80 hektar. Pengembangan tanaman karet dan kelapa sawit dalam bentuk kebun percobaan di

¹²⁰ Repport Inzake *Nederlands Nieuw Guinea over bet Faar 1961*,.

¹²¹ Ros Garnaut dan Chris Manning, *op,cit.* hlm. 25.

Manokwari, Ransiki dan Merauke pengembangan lahan padi di Merauke dengan nama proyek kumbe. Dilakukan pemetaan di Kepala Burung serta di Pegunungan Tengah bagi kemungkinan pelaksanaan kegiatan penambangan. Namun rencana ini belum sempat diwujudkan, Belanda sudah harus meninggalkan Papua.¹²² Upaya ini tidak maksimal, karena Belanda baru mulai membangun ekonomi maupun pertanian hanya dalam waktu yang cukup singkat yaitu sejak beberapa tahun menjelang akan meninggalkan Papua Barat. Sebelumnya daerah itu sangat dilupakan dan hanya menjadi lahan subur dan gembur untuk dieksploitasi.

¹²² *Ibid*, hlm. 25

BAB IV

PENDIDIKAN DI PAPUA BARAT PADA MASA BELANDA

Pendidikan adalah alat yang paling pokok atau alat vital bagi lahir dan tumbuh berkembangnya kesadaran. Dalam bahasa lain kesadaran lahir dari proses pendidikan (Latin: e-ducare).¹²³ Orang akan semakin kritis memahami persoalan dan mulai sadar akan ketidakadilan, kekerasan langsung maupun tidak langsung,¹²⁴ yang dilakukan oleh kaum kolonialis – imperialis. Bagi daerah yang dikuasai bangsa asing, kesadaran adalah hal yang paling tinggi atau pokok bagi lahirnya nasionalisme menentang pemerintah kolonial.

Perjuangan menentang kolonialisme secara terorganisir selalu digerakkan oleh kelompok terpelajar. Berikut ini sebuah analog yang mengkisahkan refleksi kelompok terpelajar yang sadar bahwa mereka ditindas kolonialis: *”sangat menyakitkan hidup bersama bangsa kolonialis, tetapi saya bersyukur bisa sekolah dan mendapatkan pendidikan dari kolonialis, karena saya semakin mengerti bahwa kaumku sedang ditindas oleh kolonialis, sehingga saya semakin mengerti untuk melawan kaum kolonialis”*

¹²³ Educare berasal dari kata bahasa Latin artinya menggiring ke luar.

¹²⁴ Jamil Salmi, *Violence and Democratic Society*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005, hlm 32-33. Ia mengemukakan bahwa kekerasan langsung merupakan tindakan yang menyerang fisik atau psikologis seseorang secara langsung. Yang termasuk dalam kategori kekerasan ini adalah semua bentuk pembunuhan individu atau kelompok, seperti pemusnahan etnis, kejahatan perang, pembunuhan massal dan juga semua bentuk tindakan paksa atau brutal yang menyebabkan penderitaan fisik atau psikologi seseorang (pengusiran paksa terhadap suatu masyarakat, penculikan, penyiksaan, pemerkosaan dan penganiayaan, perampokan dengan pemberatan) semua tindakan tersebut merupakan tindakan yang tidak benar yang mengganggu hak-hak asasi manusia yang paling dasar, yakni hak untuk hidup. Kekerasan tidak langsung adalah tindakan yang membahayakan manusia, bahkan kadang-kadang sampai ancaman kematian, tetapi tidak melibatkan hubungan langsung antara korban dan pihak (orang, masyarakat atau institusi) yang bertanggung jawab atas tindakan kekerasan tersebut. Di sini terdapat dua sub kategori yang bisa dibedakan yakni kekerasan dengan pembiarahan dan kekerasan yang termediasi

Ketika Belanda menguasai Papua Barat, pemerintah Belanda tidak begitu banyak berperan membangun pendidikan. Hal ini lebih banyak dikerjakan oleh Misionaris Protestan (selanjutnya Zending) dan Misionaris Katolik Roma (selanjutnya Misi). Sebelum kedatangan pemerintah Belanda, dalam iktisar perkembangan pemerintahan di Papua tidak boleh dilupakan bahwa Zending sudah sejak 1855 tiba di Mansinam, Manokwari. Sedangkan Misi Katolik Roma baru tiba tahun 1905 di Merauke.¹²⁵ Zending dan Misi memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan sosial, budaya dan pendidikan. Pengaruh kedua lembaga gereja ini berpotensi terhadap lahirnya kesadaran nasional Papua Barat. Sedangkan pendidikan modern ala pemerintah Belanda mulai dibangun di Papua Barat sejak tahun 1944 pada masa periode van Eechoud. Ia melakukan upaya-upaya untuk peningkatan pemberdayaan orang Papua. Schoorl mengutip pendapat Legerberg mengenai periode van Eechoud telah menyadarkan orang Papua Barat akan kemampuan sendiri, dan usahanya mengarahkan kebijakan pemerintahan *Nieuw Guinea* Belanda agar bertolak dari orang Papua Barat sendiri.¹²⁶

Dari uraian singkat di atas tampak bahwa ada peran dari Misionaris dan juga dari pemerintah Belanda dalam melakukan dan menjalankan pendidikan di Papua Barat. Maka uraian dalam bab ini akan menjelaskan dua hal. a) *Pendidikan Misionaris*, dan b) *Pendidikan Pemerintah Belanda*.

¹²⁵ Pim Scoorl. *Belanda di Irian Jaya: Amtenar di Masa Penuh Gejolak 1942 -1962*. Jakarta: Garba Budaya. 2001. hlm. 2

¹²⁶ *Ibid.*, hlm. 4.

A. Pendidikan Misionaris¹²⁷

Tujuan kedatangan Misionaris di tanah Papua Barat adalah untuk mewartakan Injil dan mengkristenkan orang Papua Barat. Dalam melakukan pewartaan Injil dan Kristenisasi di tanah Tanah Paupa Barat, para Misionaris telah berupaya melalui pembangunan sekolah, ekonomi, sosial masyarakat Papua.

Dalam sub bab ini akan dijelaskan mengenai dua hal: 1) *Kedatangan Misionaris* dan 2) *Upaya kristenisasi dan dampaknya*.

1. Kedatangan Misionaris

Pada tanggal 5 Februari 1855 penginjil Zending dari Jerman pertama bernama Ottow dan Geisler telah mengijakkan kakinya untuk pertama kalinya di atas tanah Papua. Mereka mendarat dengan kapal laut tetapanya di Pulau Manisinam (Manukwari). Mereka menumpang kapal Fabritus, milik seorang saudagar bernama Duivenbode.¹²⁸ Ottow dan Geisler ditemui oleh seorang anak berusia 12 tahun bernama Feitz. Ottow dan Geisler tertarik pada daerah itu dan setelah 6,5 tahun lamanya berkarya, pada tanggal 9 November 1862 Ottow meninggal dunia di Kwawi (Manokwari) dan dikuburkan di sana. Persisnya di depan rumah yang dibangunnya sendiri. Sedangkan Gessler masih terus bekerja di Mansinam bersama istrinya.¹²⁹

Kemudian pada tanggal 23 Mei 1896 Misionaris Pastor Le Coog d'Armandville SJ membuka Pos Penginjilan pertama di Sekeru (dekat Fak-Fak). Peristiwa buruk menimpa pastor ini, tepat Juni 1896, Le Coog d'Armandville S.J. ditenggelamkan di Mimika Barat (Kapia-Mapar) dengan perahu yang mengantarnya dari pantai ke kapal Al-Bahanasa (masih kontroversi). Menurut data lain, sebelumnya sudah ada beberapa

¹²⁷ Yang dimaksud dengan pendidikan misionaris adalah pendidikan sekolah yang dilakukan para misionaris dengan cara mendirikan sekolah-sekolah di Papua Barat untuk kepentingan melakukan misi mereka.

¹²⁹ *Ibid.*, hlm. 8

pastor pernah singgah di Tanah Papua, yakni pastor Fernandes S.J. tahun 1563. Menurut sejarawan DR. Kamma orang Papua Barat yang Katolik sudah lebih dahulu ada di tanah Papua Barat sebab sekitar tahun 1569 orang-orang Papua Barat datang ke pastor Nunez S..J. di Papua, orang Papua Barat mau dibaptis.¹³⁰

2. Upaya Kristenisasi dan Dampaknya

Para Misionaris pembawa kabar Injil sudah berada di Papua Barat sejak tanggal 5 April 1855. Kurang lebih 45 tahun sebelum pemerintah Belanda membangun pemerintahannya di Papua Barat, dan menurut seorang *Amttenar* Belanda yang menuliskan bahwa “dalam iktisar perkembangan mengenai pemerintahan ini tidak boleh dilupakan bahwa Zending sudah sejak 1855 di Mansinam, Manokwari dan dari pada Misi yang datang 1905 di Merauke.”¹³¹ Kedua lembaga gereja ini memiliki peran sangat penting. Pemerintah Belanda mulai masuk di Papua Barat mengikuti jejak para Misionaris. Pim Schoorl dengan merujuk dari Kamma (1953) dan Verscueren (1953) menuliskan bahwa:

“Perkembangan pemerintahan ini tidak boleh dilupakan bahwa Zending Protestan sudah sejak tahun 1855 menetap di Papua Barat dengan ditugaskannya zendeling C.W. Ottow dan J.G Geissler di Mansinam Dorebai, dekat suatu tempat yang kelak disebut Manukwari di Vogelkop. Misi Katolik Roma membangun posnya yang pertama pada tahun 1905 di Merauke. Kadang-kadang pemerintah datang lebih dahulu dan Zending atau Misi menyusul, tetapi juga kadang-kadang sebaliknya yang terjadi. Kegiatan yang saling melengkapi memang ada di antara kedua aktivitas itu. Untuk pemerintah, kegiatan Zending dan Misi itu penting karena peranan mereka di bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, dan aktivitas pembangunan lainnya. Pemerintah mengusahakan keamanan dan ketertiban hukum dan prasarana tertentu yang memungkinkan berkembangnya kegiatan Zending dan Misi”¹³²

¹³⁰ *Ibid.*, 13; van Schien: 16,43)

¹³¹ *Ibi.d*, hlm. 2.

¹³² *Ibid.*, hal. 2-3.

Upaya keras dari Zending¹³³ dan Misi¹³⁴ adalah melakukan kegiatan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan aktivitas pembangunan lainnya.”¹³⁵ Pendidikan modern di Papua Barat pertama diperkenalkan oleh para Misionaris. Dalam pelayanan pengembangan masyarakat untuk tujuan kristenisasi, Zending dan Misi menghadapi banyak hambatan. Saat itu orang Papua Barat masih menganut agama asli, para Misionaris tidak mahir bahasa Melayu dan juga beberapa kelompok di daerah Raja Empat dan sekitarnya, yang telah terpengaruh Islam dari Maluku, namun eksistensinya tidak besar.

Untuk mempermudah kristenisasi, para Misionaris melibatkan orang Amboina, Sanger, Kei yang mahir berbahasa melayu. Terutama mereka yang telah mendapat pengaruh Eropa dan Kristenisasi. Mereka dilibatkan untuk membantu penyebaran Misi pewartaan injil di tanah Papua. Menurut . J. Weitjens, S.J. (1989;118-119) dalam karyanya mengatakan bahwa:

“Pada tahun 1898 sudah ada berita mengenai seorang penatua orang Papua Barat bernama, Filipus. Pada tahun 1916 barulah Jemat Mansenam sempat memilih sendiri dua orang penatua. Pada tahun 1938 jemaat seluruhnya diperkirakan 325 orang, di antaranya 239 orang yang merangkap jabatan guru jemaat dan guru sekolah. Guru-guru ini sebagian datang dari Maluku dan Sangir; guru-guru asal Papua Barat dididik di SPG Mie (mulai 1925,

¹³³Ross Garnaut., *Perubahan Sosial Ekonomi di Irian Jaya*. Jakarta: Gramedia. 1979. hlm. 15. Misalnya penyelenggaraan untuk pengembangan kemasyarakatan dan pendidikan diserahkan kepada Zending Protestan, yang lebih dahulu datang ke Papua (1855) oleh Otto dan Geiler yang berkebangsaan Jerman, menguasai bagian utara Papua. Dengan adanya hubungan kapal Koninkeljik Pakketvaarts Maatschppij (KPM) dan perhatian dari pemerintah kolonial Belanda di tahun 1892 maka dapat memperlancar penyelenggaraan pendidikan dan mendatangkan bantuan guru-guru dari Minahasa, dan Ambon sehingga pelajaran-pelajaran diberikan dalam bahasa Melayu.

¹³⁴ W. van der Veur. *Deutch New Guinea. Encyclopedia of Papua and New Guinea*. MUP. 1972, hlm, 277. Katolik Roma masuk tahun 1896 dua tahun sebelum pembukaan pos pemerintahan baru di bagian selatan Papua. Pater J. Vertente pada tahun 1914 mulai mengusaha pemukiman-pemukiman percontohan (*modeldolpen*) dalam rangka mempersiapkan pengembangan ekonomi dan pendidikan terutama pendidikan guru-guru dan Pamong Praja, maka tenaga kerjanya didatangkan dari Maluku serta dari Kei terutama di bagian selatan pada tahun 1923. Administrasi dari yayasan Zending dan Katolik lebih giat dari pada pemerintah. Aktivitas-aktivitas Zending yang dimulai pada tahun 1855 dan lebih dari 50. 000 orang tercatat sebagai penganut agama protestan pada tahun 1935 sedangkan aktivitas Misi Katolik yang sebagian yang terdapat di bagian pantai selatan Papua dan jumlah diperkirakan 7.100 telah dibaptis pada tahun 1933.

¹³⁵ Pim Scoorl, *op.cit.* hlm. 2.

sebelumnya di Mansenam). Salah seorang yang berbakat di antara guru-guru Ambon itu ialah Laurens Tanmal, yang telah merintis pekabaran Injil di pulau Numfor, Yapen, Karudu dan lain-lain.”¹³⁶

Guru yang datang dari pulau seberang itu di antaranya datang mengajar calon-calon guru orang Papua di (Sekolah Pendidikan Guru) SPG. Dengan datangnya guru-guru imigran itu berdampak terjadilah perubahan pola dan kebiasaan kehidupan masyarakat terutama di pesisir Pantai. Terjadi asimilasi sehingga saat ini agak sulit menemukan kebiasaan dan budaya asli penduduk pesisir pantai Papua Barat. Sebagai akibat dari asimilasi dan unifikasi dengan kebudayaan dari daerah Timor.

Misionaris tidak akan berhasil bilah Firman Tuhan diwartakan melalui kotbah-kotbah di gereja. Cara ini, dirasakan tidak cukup efektif. Di banyak tempat, di belahan dunia mengalami kegagalan. Masyarakat masih berbahasa daerah dari sukunya masing-masing. Cara lain dilakukan, J. Weitjens, S.J. mendokumentasikan bahwa para Zending tidak memberitakan Firman Tuhan hanya dengan mulut (kotbah) saja, akan tetapi dikatakan bahwa:

“Dari semula mereka mendirikan sekolah dan melakukan pengobatan. Belum satu tahun Ottow tinggal di Papua, sudah dikumpulkannya murid-murid sekolah. Di kemudian hari kebanyakan jemaat memilih sekolah rakyat tiga tahun pada akhir tahun 1973 ada 203 buah dengan jumlah murid 10.000 lebih, di antaranya 38% perempuan. Sekolah lanjutan (kelas IV dan V sekolah dasar!) hanya ada satu dengan 50 murid, tetapi pada tahun 1925 sekolah itu dipindahkan ke Mie, di Teluk Wandamen. Melalui para murid SPG ini, kepala Sekolah, I.S. Kijne, mempunyai pengaruh besar atas perkembangan gereja di Papua.”¹³⁷

Zending dan Misi tidak terpisahkan dalam sejarah hidup orang Papua. Kedua lembaga gereja ini telah bersama masyarakat setempat membuka hutan untuk mendirikan pos-pos pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

¹³⁶ Dr. Th. Van den End Dr. J. Weitjens, S.J. *Ragi Carita 2: Sejarah Gereja di Indonesia 1860-an – sekarang*, Jakarta: PT. BPK. Gunung Mulia. 1989. hlm. 118-119

¹³⁷ *Ibid.*, hlm. 118-119

Misionaris Katolik betah dan menetap di Merauke. Entah secara kebetulan atau tidak menjadi salah satu kota bersejarah awal hadirnya Misi katolik di tanah Papua. Seorang Pastor Heuken S.J. Mengemukakan dalam karyanya bahwa, Merauke adalah pusat keuskupan Agung pertama yang meliputi sebagian besar kabupaten Merauke. Mengenai sejarah perjuangan Misionaris membuka kota Merauke Heuken S.J. lebih menerangkan bahwa:

“Pastor memasuki hutan rimba yang belum dikenal itu dan membuka stasi di Wendu pada tahun 1909 dan Okaba pada tahun 1911 di Pantai Selatan. Tugas pertama adalah mendekati penduduk, mempelajari bahasa dan kebiasaan mereka, yang belum pernah dipelajari orang luar. Maka, para pastor menyusun kamus dan tata bahasa beberapa suku. Atas prakarsa Pastor Vertenten M.S.C. kampung-kampung baru didirikan, sekolah dibuka, dan penduduk yang sehat dikumpulkan. Lalu, pendidikan tukang kayu dimulai di Merauke, gedung-gedung dibangun, guru-guru dari kepulauan Kei didatangkan untuk membuka sekolah sederhana dan membantu masyarakat. Stasi demi stasi dibuka di pantai selatan sampai pantai Mimika dan setelah perdebatan hangat tentang ‘garis pemisah Misi-Zending’ yang ditentukan pemerintah, akhirnya di fak-fak (1929) juga boleh ditempatkan seorang pastor. Lalu para Misionaris, masuk ke dalam pedalaman, membuka sekolah dan menempatkan katakis-katakis yang berusaha mengumpulkan dan membentuk umat yang menetap...”¹³⁸

Perjuangan ini bukan hal mudah, tanpa tujuan dan tekad yang mendasari tidak mungkin bagi mereka untuk datang ke Papua Barat – Merauke (Pantai Selatan). Mereka terpanggil tergerak oleh misi pewartaan Injil (Kristenisasi) adalah tekad yang mendasari para misionaris (para suster dan pastor) itu datang ke Papua Barat. Kristenisasi telah melandasi pembangunan mental orang Papua. Vedemecum (1956), mengemukakan bahwa di Merauke pada tahun 1923 dan kurang lebih satu dasawarsa kemudian yaitu tahun 1934, sudah ada 107 sekolah Katolik tersebar di Papua Barat bagian Selatan. Jumlah itu termasuk di Agast dan Mimika.¹³⁹

¹³⁸ Heuken SJ. Jilid Khusus, *Ensiklopedi Populer Tentang Gereja Katolik di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka. 1989. hlm. 271-272.

¹³⁹ Koentjaraningrat dkk, *op.cit.* 1994, hal. 57.

Heuken SJ. menuliskan mengenai usaha dan karya Misi, dalam bidang pendidikan, kesehatan sebagai berikut:

“Pada tahun (1928) Suster-suster Putri Hati Kudus mulai merawat orang sakit, membuka asrama, memberikan kursus penjahit dan kerajinan tangan, sedangkan Bruder-Bruder M.S.C. asal Kei (1935) mendidik pemuda di sekolah dan bengkel. Di beberapa tempat para imam menyelidiki bahasa dan menulis buku-buku pertama dibahasa suku-suku. Berkat usaha ini, beberapa putra daerah Muyu sudah dapat mengajar sebelum Perang 1942.

Sesudah perang, bidang pendidikan ditingkatkan lagi: dibuka banyak SD, Opleiding Dorpsonderwijzers (semacam SPG) di Merauke (1949), Sekolah Pertukangan dan Teknik oleh Bruder-bruder S.P. Maria Tujuh Kedukaan (1950/1953) dengan beberapa kursus kejuruan, misalnya mobil, listrik dan bangunan pada tahun (1964). Sekolah Perawat Kesehatan didirikan oleh suster-suster sebagai persiapan untuk membuka poliklinik di pedalaman; Mimika dan Muyu pada tahun 1951, Tanah Merah tahun 1954, Agats tahun 1956 dan Kaimana pada tahun 1958. Pada tahun 1950 Papua Barat Selatan dan dipisahkan dari Maluku dan menjadi Viakariat apostolik Merauke. Di kelapa Lima (Merauke) dibuka Paroki kedua dan Seminari Menengah tahun 1956. Novisiat bagi calon-calon suster dibuka juga (1951) dan menarik banyak putri pribumi. Di SGA Meauke (1963) dan SGB Mendiptana (1963) dididik generasi guru-guru baru. Supaya orang tidak lagi perlu berpindah-pindah, maka rakyat diberi penerangan dan latihan oleh para Bruder tentang cara-cara menanam kelapa, sayur, pohon karet, dan cara membangun kolam ikan.”¹⁴⁰

Misi katolik rupanya berkembang pesat di Merauke kemudian dikembangkan keluar di daerah-daerah yang ada dekat Merauke. Setelah Merauke Misi katolik berkembang ke **Agats-Asmat**. Agats-Asmat meliputi lima Kecamatan, Kabupaten Merauke. Pastor Heuken S.J. Menulis bahwa:

“para pastor mempelajari bahasa dan adat; suster-suster Putri Hati Kudus (1956-1966) membuka asrama dan poliklinik di Agats (1956). Pada tahun 1958 beberapa Imam dan Bruder Ordo Salip Suci (OSC) datang dari provinsi OSC Amerika dan pada tahun 1961 menerima seluruh daerah yang berbahasa Asmat. Mereka membuka pusat latihan pertukangan kayu dan koperasi. Keuskupan memprakarsai ‘Museum Agats’ (1974) dan ‘ Hari Budaya; untuk mengembangkan budaya asli pada masa itu. Sejumlah putra suku Asmat yang dididik di STFT ‘Fajar Timur’ (Abepura) dan di Pulau Jawa disebut ‘Pastor Awam’. Mereka berusaha juga menyadarkan dan membina masyarakat hal perkembangan dan pemeliharaan lingkungan alam hidup mereka”¹⁴¹

¹⁴⁰ Heuken S.J. Jilid Khusus, *op. cit.* 1989. hlm. 268-272.

¹⁴¹ *Ibi.*, hlm. 17-19.

Jayapura (Hollandia) adalah ibu kota Propinsi Papua, menjadi pusat keuskupan yang meliputi Kabupaten Teluk Cenderawasih, Jayapura, Paniai, Yapen Waropen dan sebagian Kabupaten Fakfak, yaitu Mimika, Agimuka. Daerah ini dibuka oleh Misionaris MSC dengan bantuan guru-guru asal Kabupaten Kei. Sejak tahun 50-an Hollandia menjadi pusat pendidikan dengan sekolah-sekolah katolik seperti, HIS (1957) dan PMS (1958). Di beberapa daerah pedalaman dibuka stasi baru. Para Misionaris harus belajar bahasa-bahasa di suku-suku tempat mereka membuka stasi baru.

Pada tahun 1963 RI mengambil alih pemerintahan. Kemudian pada tahun 1966 ketiga wilayah gerejani menjadi keuskupan, yaitu Merauke, Jayapura, Manokwari. Untuk mempersiapkan umat agar mandiri, maka pada tahun 1969 dibuka Akademi Teologi Katolik di Abepura dekat Jayapura, ditambah pula PGAK 'Teruna Bakti' dan asrama mahasiswa 'Taboria' serta asrama mahasiswi 'Nurjaya'. Tahun-tahun pertama setelah integrasi Indonesia ke dalam Papua Barat, para Misionaris didampingi P.A. Hardawiwidagda O Carm, kemudian oleh P.H. Haripranata SJ, yang berjasa sebagai kepala kantor Wali Gereja Papua. Untuk melayani umat keuskupan Jayapura berkarya Suster-Suster D.S.Y. (1953) di bidang pendidikan, kesehatan dan sosial, khususnya pembinaan kaum wanita.¹⁴²

Mengenai karya Misi di Sorong. Heuken S.J. mengemukakan, bahwa Sorong-Manokwari adalah Keuskupan yang meliputi Kabupaten Manokwari, Sorong dan Fakfak atau daerah kepala burung di Papua. Baru pada tahun 1937 daerah Kepala Burung dibuka untuk karya Misi; sebelumnya hanya Zending Protestan yang boleh berkarya di seluruh Papua Barat bagian Utara. Para Misionaris Fransiskan membuka

¹⁴² *Ibid*, hlm. 175-177

15 sekolah sederhana dengan guru-guru dari kepulauan Kei. Keuskupan Sorong-Manokwari hampir seluas Pulau Jawa, (111.825 km²); Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik mengelola 51 SD, 4 SMP, 1 SMA; Rumah Sakit Katolik ‘Ayawasi’ dan beberapa poliklinik mewujudkan perhatian gereja kepada penderita.¹⁴³ Beberapa sekolah Misi terutama di daerah Selatan menekankan pendidikan kejuruan. Walaupun sangat miskin dengan alat-alat peraga, Misi katolik di sana telah memberikan sumbangan penting dalam penyebaran keahlian pertukangan sederhana, untuk mendirikan rumah.¹⁴⁴

B. Pendidikan Pemerintah Belanda

Menyadari pentingnya pendidikan, pada bagian sub bab berikut ini akan dibahas empat hal: 1) *Tradisi dalam pendidikan kolonial*; 2) *Pendidikan Belanda masa Residen J.P. van Eechoud*; 3) *Hasil dan pengaruh pendidikan Belanda*; 4) *Dampak pendidikan di bidang politik*

1. Tradisi Pendidikan Kolonial Belanda

Dalam tradisi kolonial penduduk pribumi tidak mendapat pendidikan yang layak. Penduduk Pribumi hanya sampai sekolah rakyat, selebihnya khusus hanya untuk anak dari negeri kolonial dan anak bangsawan. Agar masyarakat pribumi tidak cerdas dan tidak kritis. Mereka hanya menjadi pendukung eksploitasi kolonial. Hal seperti ini, seperti yang pernah terjadi juga di daerah kolonial Belanda lainnya di dunia. Kebijakan pendidikan Belanda dipraktekkan secara murni dan konsekuen agar univikasi dan asimilasi dapat terjadi. Dengan begitu tidak akan lahir kesadaran nasional penduduk pribumi (terjajah). Namun dalam konteks Indonesia, meskipun

¹⁴³ *Ibid.*, hlm. 433-435

¹⁴⁴ Ross Garnaut dan Chris Manning, *op.cit*, hlm. 37

demikian pendidikan Belanda di Hindia Belanda telah melahirkan kesadaran Nasional Indonesia yang berkembang dari pulau Jawa telah diawali atau dimulai kelompok terdidik pada masa politik etis. Hal itu membenarkan, praktek politik etik atau kesejateraan, saat itu yang tampak bersemboyan demi penyatuan Indonesia-Belanda (univikasi) dan pembauran orang Indonesia-Belanda menjadi warga negara Belanda (asimilasi).¹⁴⁵ Seorang Sejarawan Indonesia Moedjanto, (2003; 35) menuliskan mengenai politik etik bahwa: “Konseptor politik “etika” yang terkemuka, Snouck Hurgronje menghendaki agar univikasi dan asimilasi dipraktekkan secara murni dan konsekuen. Mereka yakin, dengan politik semacam itu Indonesia akan terikat dalam kesatuan Kerajaan Belanda secara wajar.”¹⁴⁶

2. Pendidikan Belanda Masa Residen J.P. van Eechoud

Kegiatan pendidikan yang dilakukan Zending dan Misi bertujuan Kritisasi. Sementara tujuan pendidikan Belanda tercipta asimilasi dan univikasi. Terlepas dari Zending dan Misi, pendidikan modern ala pemerintah Belanda mulai dibangun di Papua Barat sejak tahun 1944. Dilakukan pada masa periode van Eechoud yang telah berupaya-upaya peningkatan pemberdayaan orang Papua. Schoorl mengutip pendapat Legerberg “ mengenai periode van Eechoud telah menyadarkan orang Papua Barat akan kemampuan sendiri, dan usahanya mengarahkan kebijakan pemerintah agar bertolak dari orang Papua Barat sendiri.¹⁴⁷

Upaya itu telah dilakukan melalui pendidikan, di mana pada tahun 1944 Residen J.P. van Eechoud waktu itu yang terkenal dengan julukan “*vader der Papoea,s*” (Bapak orang Papua) mendirikan sebuah sekolah polisi dan sebuah

¹⁴⁵ G. Moedjanto, *Dari Pembentukan PAX NEDERLANDICA Sampai NEGARA KESATUAN REPOBLIK INDONESIA*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma. 2003, hlm. 36

¹⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 35

¹⁴⁷ Pim Scoorl, *op.cit.* 2001. hlm. 4.

sekolah Pamong Praja di *Hollandia* (Jayapura). Selain sekolah Pamong Praja di *Hollandia*, pemerintah Belanda membuka sekolah pelayaran di Hamadi, sekolah tehnik di Kotaraja Jayapura dan Abepura, sekolah Pamongpraja di Yoka. Sekolah polisi di Base G, sekolah pertanian di Manokwari. Waktu itu penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah Belanda untuk mempertahankan hegemoni Belanda, namun juga telah terjadi Papuanisasi¹⁴⁸ atau untuk menanamkan nasionalisme Papua. Kemudian dalam bulan Januari 1946, Pemerintah Belanda mendirikan sekolah Pamong Praja di Kota Nicca (Kampung Harapan, sekarang). Jumlah siswa mencapai 400 orang antara tahun 1944-1949.

Pemerintah Belanda mengirimkan sejumlah mahasiswa ke luar negeri; antara lain ke negara Belanda, Australia, dan negara-negara di Pasifik. Mereka dikirim dengan tujuan memperoleh pendidikan tinggi dan kembali memimpin bangsanya. Salah satu mahasiswa yang dikirim keluar negeri (Negara Belanda) dalam rangka Papuanisasi ialah Frits Kirihio.¹⁴⁹

3. Hasil dan Pengaruh Pendidikan Belanda.

Hasil pendidikan Belanda rupanya telah melahirkan elit-elit politik terdidik di Papua.¹⁵⁰ Pendidikan Belanda dari sekolah Pamong Praja menghasilkan para tokoh-tokoh terdidik Papua Barat yang menjadi *Amtenar*¹⁵¹. Elit politik terdidik Papua Barat telah bangkit menentang penjajah dan telah berupaya menggantikan pemerintahan

¹⁴⁸ Benny Giay, *Menuju Papua Baru: Beberapa Pokok Pikiran Seputar Emansipasi Orang Papua, Jayapura Elsham Papua*. 2000. hlm. 84-85.

¹⁴⁹ R.G., Djopari *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka*. 1993, hlm. 48 (baca juga Beny Giay, 2000: 86)

¹⁵⁰ R.G., Jopari, *op.cit.* 1993, hal. 30

¹⁵¹ Leontine E. Visser dan Amapon Jos Marey. *Bakti Pamong Praja Papua*. Jakarta: Kompas. Buku ini memperlihatkan hasil pendidikan Belanda yang melahirkan tokoh-tokoh terdidik dan mereka ada yang menjadi *Amtenar*.

yang dipegang oleh orang Belanda. Mereka berupaya untuk mengisi jabatan-jabatan dan lowongan pekerjaan di Papua.¹⁵²

Dari pendidikan Misi, Zending dan Pemerintah Belanda, van Eechoud (1951) melalui Pim Schoorl mencatat, bahwa pada tahun 1920-1940 Satpam yang bertugas menjadi penjaga dan pesuruh untuk seluruh Papua Barat berjumlah 51 dan Polisi swapraja berjumlah 183 orang Papua.¹⁵³

Pemerintah Belanda masa Residen J.P. van Eechoud memiliki sumbangan terhadap lahirnya nasionalisme Papua Barat. Rupanya untuk menanggapi radikalisasi dari Indonesia. Ia berkeinginan membuat orang Papua Barat setia kepada Pemerintah Belanda. Setiap orang yang pro-Indonesia ditahan atau dipenjarakan dan dibuang keluar Papua.¹⁵⁴ Di *Hollandia* dan Manukwari, para kader nasionalis Papua Barat dibentuk menjadi elit-politik dengan kemampuan berdiskusi dengan baik.¹⁵⁵

Beberapa orang yang telah menempuh pendidikan Belanda jaman Eechoud dan menjadi terkemuka dalam aktivitas politik antara lain: Marcus dan Frans Kaisepo, Nicolaus Joue, Herman Wajoi, Silas Papare, Albert Karubuy, Mozes Rumahinum, Baldus Mofu, Elieser Jan Bonay, Lukas Rumkorem, Maten Iundey, Johan Ariks, Heman Womsiwor dan Abdullah Arfan.¹⁵⁶ Dari sekolah Misi, Zending dan pemerintah Belanda lahirlah tokoh-toko nasionalis di antaranya mereka adalah tokoh-tokoh yang duduk dalam *Dewan New Guinea Raad*, seperti Nicolas Jouwe, P. Torey,

¹⁵²Alua Agus *Papua Barat : Dari Pangkuan ke Pangkuan*. Jayapura: Sekertariat Tim 100. 2000, hlm. 21. (Baca juga Giya, 2000: 85-86)

¹⁵³ Pim Schoorl, *op. cit.* 2001. hlm. 4

¹⁵⁴ R.G., Djopari, *op.cit.* 1993. hlm. 30

¹⁵⁵ Peter Savage, *op.cit.* Oktober 1977. hlm 2-3.

¹⁵⁶R.G., Djopari, *op.cit.* Sumber asli dari Ernest, Urecht, *Papoeas in Opstand, Uitgeverij Ordeman*, Rotterdam.1978. hlm 43-46.

Markus Kaisepo, Nicolas Tanggahma, Eliezer Jan Bonai dan ada yang belum disebut di sini. Mereka adalah kelompok nasionalis terpelajar Papua.¹⁵⁷

4. Dampak Pendidikan di Bidang Politik

Salah satu dampak dari pendidikan Belanda adalah lahirnya tokoh-tokoh elit politik terdidikan Papua Barat seperti yang telah disebutkan di atas. Lebih jauh lagi, ketika pada tahun 1951 Kabinet ke-2 dari Perdana Menteri Dress mengakui Hak Kemerdekaan Papua Barat yang sesuai dengan pasal 73 Piagam PBB, yakni *All People have the right to self determination, regardless of their state of development*.¹⁵⁸ Deklarasi hak dan rencana pemerintah Belanda itu memotivasi intelektual Papua Barat bersama masyarakat semakin mendesak Belanda untuk memberikan kemerdekaan. Mandosir (2000) mencatat bahwa pada bulan November 1957, orang Papua Barat mengadakan demonstrasi pertama di depan kantor Gubernur, Hollandia. Pada kesempatan ini, orang Papua Barat menuntut pemerintah Belanda melalui Dr. van Baal, Gubernur *Nederlands Nieuw Guinea* pada waktu itu, agar Belanda segera memenuhi tuntutan mereka, yaitu (a). Mengakui hak mengurus diri sendiri, hak berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan pemerintah

¹⁵⁷ Syamsuddin Haris dkk. *Indonesia di Ambang Perpecahan*. Jakarta: Erlangga, hal. 185. kelompok nasionalis terpelajar ini telah turut memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat lepas dari cengkraman kolonial. Melalui perantara mereka, rakyat Papua Barat menyampaikan berbagai pernyataan sikap politik untuk menolak menjadi bagian dari RI. Frans Kaisepo (almarhum), bekas gubernur Papua Barat, pada konferensi Malino 1946 di Sulawesi Selatan, menyatakan dengan jelas bahwa rakyatnya tidak ingin dihubungkan dengan sebuah negara RI (*Plunder in Paradise* oleh *Anti-Slavery Society*). Johan Ariks (alm.), tokoh populer rakyat Papua Barat pada tahun 1960-an, menyampaikan secara tegas perlawanannya terhadap masuknya Indonesia ke dalam Papua Barat (*Plunder in Paradise* oleh *Anti-Slavery Society*). Angganita Menufandu (alm.) dan Stefanus Simopiaref (alm.) dari Gerakan Koreri, Raja Ati (alm.) dari Fakfak, L.R. Jakadewa (alm.) dari *DVP-Demokratische Volkspartij*, Lodewijk Mandatjan (alm.) dan Obeth Manupandu (alm.) dari PONG-Persatuan Orang *Nieuw-Guinea*, Barend Mandatjan (alm.), Ferry Awom (alm.) dari Batalyon Papua, Permenas Awom (alm.), Jufuway (alm.), Arnold Ap (alm.), Eliezer Bonay (alm.), Adolf Menase Suwae (alm.), Dr. Thomas Wainggai (alm.), Nicolaas Jouwe, Markus Wonggor Kaisiepo dan lain-lainnya dengan cara masing-masing, pada saat yang berbeda dan kadang-kadang di tempat yang berbeda memprotes adanya penjajahan asing di Papua.

¹⁵⁸ Agus Alua, *op.cit*, hlm. 39-40.

Belanda. (b) meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan pendidikan, transportasi, dll.¹⁵⁹

Pada tahun 1957 itu juga sebagai realisasi Rencana induk pengembangan Papua, maka Belanda membentuk Dewan Daerah/Distrik (*STREEK RAAD*) di seluruh distrik keresidenan *Nieuw Guinea*. Anggota-anggotanya terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, dan tokoh-tokoh adat setempat.¹⁶⁰ Tanggal 1 Mei 1958 Gubernur DR. J. van Baal digantikan oleh PT Platteel yang sangat mendukung kemerdekaan Papua Barat.¹⁶¹

Kelompok terdidik pro-Belanda dan kemerdekaan Papua Barat mendapat dukungan Belanda mendirikan Gerakan Persatuan *Nieuw Guinea*. Ada pun tujuannya adalah untuk menentang pengaruh Indonesia. Gerakan ini dipimpin tokoh-tokoh Papua Barat yang terkenal, yaitu Markus Kaisepo, Johan Ariks Abdulla Arfan, Nicolaas Jouwe, dan Herman Womsiwor. Mereka itu kemudian menjadi pendukung kokoh pemerintah Belanda dan Nasionalisme Papua Barat Merdeka.¹⁶²

Pada tahun 1960 dibentuk suatu “uni perdagangan” pertama di *Nieuw Guinea* yang bernama *Chistelijk Werknemers Verbond Nieuw Guinea* (Serikat Kerja Kristen *Nieuw Guinea*). Pada mulanya hanya berhubungan dengan pemerintah Belanda dan pekerja-pekerja kontrak Euroasia. Dalam waktu singkat keanggotaan orang Papua Barat menjadi 3000 orang. Organisasi ini bersama Gerakan Persatuan *Nieuw Guinea* membentuk dasar dan pemimpin dari Partai Nasional.¹⁶³

¹⁵⁹ Benny Giayai, *op.cit.* 2001. hlm. 88

¹⁶⁰ Agus Alua, *op.cit.* hlm. 40.

¹⁶¹ *Ibid.*, hlm. 41. ; (baca juga Koentjaraningrat : 84).

¹⁶² Peter Savage, *op.cit.* hlm. 3.

¹⁶³ Paul van der veur, *Politick Awengking in West Nieuw Guinea*, Pacific Affairs. 1963. hlm.54-57.

Tiga bulan menjelang akhir tahun 1960, pemerintah Belanda membentuk beberapa partai dan organisasi politik¹⁶⁴ sebagai perwujudan dan kebijakan politik dari Kabinet De Quay agar mempercepat pembangunan *Nieuw Guinea Raad* melalui pemilihan Umum.¹⁶⁵ Tampak sebagai upaya realisasi dari politik dekolonisasi *Neuw Guinea* yang dilakukan secara bertahap. Adapun tujuan berbagai partai tersebut adalah: Menanggapi desakan untuk menentukan nasib negaranya sendiri. Selain itu dalam tahun itu juga, 1960 telah dibentuk sebuah batalyon sukarelawan Papua (*Papua Vrijwilligers Korps*),¹⁶⁶

Aktivitas politik dalam rangka pemilihan umum semakin tampak dan menonjol terlihat di *Hollandia* dan Manukwari. Sebab kedua tempat tersebut banyak berdominasi orang-orang Belanda, Indo-Belanda, Indonesia (Ambon, Manado, Jawa, Makassar, Bugis, Buton, dll) serta kader-kader Papua Barat yang terdidik (kader rendah dan menengah).¹⁶⁷ Pada tanggal 18 – 25 Februari 1961 dilangsungkan pemilu. Rakyat Papua Barat memilih anggota-anggota *Nieuw Guinea Raad* di *Hollandia* secara Demokrasi dan kemudian pada tanggal 5 April 1961 *Nieuw Guinea Raad* diresmikan atau disahkan oleh Th. H. Bot¹⁶⁸ untuk mulai bekerja. Jumlah anggota dewan terdiri dari 21 orang di antaranya 10 orang Papua Barat¹⁶⁹ dan ada yang berpendapat 28 orang yang terdiri dari 16 orang yang dipilih melalui Pemilu dan 12 orang diangkat oleh Gubernur Platteel. Karena anggota dewan tinggal berjauhan dan tersebar di seluruh tanah Papua, dibentuklah Dewan Pelaksana

¹⁶⁴ Sekertariat Koordinator Urusan Papua Barat, “*Papua Barat Bagian Mutlak Republik Indonesia* “ *Edisi 3*, Jakarta, 1984. hlm. 49 – 52.

¹⁶⁵ P. B.R. de Geus, *De Nieuw Guinea Kwestie*, (*Aspecten van buitenlandse beleid en militaire macht*), Martinus Nijhoff, Leiden, 1984, hlm 111.

¹⁶⁶ R.G. Djopari, *op.cit.* hlm. 35.

¹⁶⁷ P. B.R. de Geus, *op.cit.* 1984, hlm 113-137.

¹⁶⁸ Majalah *Triton*, Mei/Juni 1961.

¹⁶⁹ R.G., Djopari, *op.cit.* hlm. 34-35

Harian untuk melaksanakan tugas-tugas harian dewan.¹⁷⁰ Ada pun tugas dan kewenangan dari *Nieuw Guinea Raad* adalah; hak petisi atau mengajukan permohonan, hak interpelasi atau hak meminta keterangan, menyampaikan nasehat tentang undang-undang dan peraturan umum pemerintah yang mengikat bagi orang Papua Barat, tugas bantuan berdasarkan hak amandemen/usul perubahan terhadap ketentuan ordonansi-ordonansi, tugas bantuan terhadap pelaksanaan dari anggaran yang berhubungan dengan tinjauan dan pengamatan pada umumnya.¹⁷¹ Secara garis besar dapat dikatakan bahwa *Dewan Nieuw Gunia Raad* memiliki kekuasaan legislatif sama dengan pemerintah dan melakukan beberapa pengawasan terhadap anggaran belanja. Dalam perencanaan pembentukan *Nieuw Guinea Raad*, Belanda menyadari bahwa lembaga itu pada awalnya mempunyai sarana latihan demokrasi¹⁷²

Di *Nieuw Guinea*, sebagai jawaban akan rencana Luns yang akan didiskusikan di PBB, maka 5 (lima) dari anggota *Nieuw Guinea Raad* yang dipimpin oleh Mr. de Rijke merancang suatu manifesto dan membentuk Komite Nasional Papua (KNP) beranggotakan 21 orang. Komite ini menyelenggarakan pertemuan yang dihadiri oleh 70 orang Papua Barat terdidik. Kongres Papua Barat I yang diselenggarakan di *Hollandia* (Jayapura, atau *Port Numay*) pada tanggal 19 Oktober 1961, tampaknya sebagai wujud nyata Belanda melakukan Papuanisasi untuk mengambil hak kemerdekaan bangsa Papua Barat. Kelompok nasionalis terpelajar Papua Barat mendeklarasikan kemerdekaan Papua Barat dengan perangkat kenegaraan seperti: (a). Bendera Bintang Kejora sebagai bendera bangsa Papua. (b). Lagu, Hai Tanahku

¹⁷⁰ Agus Alua, *op.cit.* hlm. 46.

¹⁷¹ P. B.R. de Geus, *op.cit.* 1984. hlm 113.

¹⁷² *Ibid.*, hlm. 113.

Papua Barat sebagai lagu kebangsaan Papua. (c) Lambang Negara: Burung Mambruk. (d) Semboyan: *One People One Soul*, dengan Pemerintahan.¹⁷³

Pekerjaan Komite Nasional itu hasilnya kemudian diajukan kepada *Nieuw Guinea Raad* dan segera mendapatkan persetujuannya. Diakui pula di sini bahwa Mr. de Rijke mempunyai peranan yang besar dalam melahirkan hasil dari Komite Nasional tersebut di atas.¹⁷⁴ Hasil ini menyebabkan pemerintah Belanda menunjukkan simpati penuh serta dukungan atau bantuan mereka pada aliran nasional yang tumbuh di *Nieuw Guinea*. Belanda yakin bahwa dengan politik dekolonisasi semacam ini akan membuktikan kepada masyarakat dunia bahwa tuntutan-tuntutan Indonesia untuk mengembalikan *Nieuw Guinea* itu tidak berdasar, dan akan membuka jalan ke arah transisi mencapai dominasi neo-kolonialisme.¹⁷⁵

Keputusan tentang "Pengibaran Bendera pada tanggal 1 November 1961 tidak terlaksana, karena persetujuan pemerintah Belanda belum tiba pada waktu yang diharapkan. Akhirnya Pemerintah Belanda menyetujui bahwa deklarasi dan pengibaran Bendera Papua Barat akan dilakukan pada tanggal 1 Desember 1961.¹⁷⁶ Sebelum deklarasi dan pengibaran bendera, pada tanggal 18 November 1961 Pemerintah Belanda melalui Gubernur Platteel dan Sekretaris Gubernur A.Losjes menetapkan dan mengesahkan adanya Bendera Negeri *Nederlands-Neuw Guinea* dan cara-cara penggunaannya di samping Bendera kerajaan Belanda. Hal ini diatur

¹⁷³ Natalis Pigay, *op.cit.*, hlm. 217 – 220. Sebelum negara Papua Barat berjalan sesuai fungsinya, telah diinvasi militer Indonesia. Hingga sekarang, kemerdekaan Papua Barat terus diperjuangkan kelompok intelektual bersama masyarakat. Mereka menuntut pengakuan akan hak kemerdekaan bagi Papua Barat kepada dunia internasional (PBB) atas kemerdekaan yang secara secara *de yure* belum terjadi, namun secara *de facto* sudah terjadi. Perjuangan itu sesuai dengan amanat alinea pertama Pembukaan UUD 1945 negara republik Indonesia bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prikeadilan.

¹⁷⁴ R.G. Djopari, *op.cit.* hlm. 109. Hasil Wawancara Djopari, dengan A.J.F. Marey di Den Haag, 6 Mei 1989.

¹⁷⁵ Peter Savage, *op.cit.* 1977. hlm 4.

¹⁷⁶ Agus Alua, *op.cit.* hlm. 49.

di dalam Surat Keputusan Gubernur No. 362 dan No. 366 (*Gouvernementsblad van raederlands-Nieuw Guinea* No. 68 dan 69 tahun 1961). Pada hari dan tanggal yang sama dengan di atas, Gubernur dan Sekretaris yang sama menetapkan dan mengesahkan pemakaian lagu kebangsaan Papua. Hal ini diatur dalam Surat Keputusan Gubernur No. 364 (*Gouvenzerrrentsblad van nederlarzds Nieuw Guinea* No. 69).¹⁷⁷

Pada tanggal 1 Desember 1961 atas persetujuan Pemerintah Kerajaan Belanda, Komite Nasional Papua Barat (KNP) mendeklarasikan Kemerdekaan Papua Barat (*west Papua*) di *Hollandia* (kini Jaya Pura), tepatnya di Jl.Irian, I halaman Gedung Kesenian Papua Barat yang pada waktu itu adalah gedung *Nieuw Guinea Raad*, tepat pada jam 08.10. Hari itu dilakukan pengibaran Bendera Papua Barat berdampingan dengan Bendera Kerajaan Belanda dan dinyanyikan lagu kebangsaan kedua negara Belanda dan Papua Barat. Lagu Kebangsaan Papua "Hai Tanahku Papua" dikumandangkan pertama kalinya. Ketika itu semua tiang bendera di semua dinas, dibuat berbentuk palang untuk mengibarkan dua bendera, Belanda dan Papua. Demikian pula lagu kebangsaan Papua Barat "Hai Tanah Papua" dinyanyikan bersama-sama dengan lagu kebangsaan Belanda "Wilhelmus". Kedua hal itu terus berlangsung selama setahun, teks proklamasi akan dibacakan pada pada akhir tahun 1970 atau awal 1971 ketika pemerintah Kerajaan Belanda menyerahkan kedaulatan sepenuhnya,¹⁷⁸ namun upaya kelompok terdidik mempersiapkan proses demokrasi dan upaya "kemerdekaan Papua" mengalami jalan buntu.

¹⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 49.

¹⁷⁸ Agus Alua, *op.cit.* hlm. 49.

Pada tanggal 19 Desember 1961 Presiden Soekarno mengumandangkan Trikora (Tiga Komando Rakyat) di Yogyakarta.¹⁷⁹ Sebagai tindak lanjut dari Trikora, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit No. 1/1962 tentang pembentukan Komando Mandala untuk membebaskan Papua Barat. Untuk tugas itu, Pada 11 Januari 1962, Brigjen. Soeharto dipromosikan menjadi Mayjen, kemudian diangkat menjadi Panglima Mandala.¹⁸⁰

Pada tanggal 5 Agustus April 1962, Indonesia – Belanda menandatangani kesepakatan *New York (New York Agreement)*. Sesuai persetujuan di atas terjadi pengalihan administrasi dari Belanda kepada *United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA)* suatu badan internasional administrasi PBB yang bertugas melakukan *de kolonisasi* atas Papua Barat dan berkuasa sementara menjalankan kekosongan pemerintahan di Papua Barat, sekaligus bertugas mengambil alih administrasi pemerintahan di Papua Barat dari Belanda. Kemudian hari, pada tanggal 1 Mei 1963 UNTEA menyerahkan Papua Barat kepada Indonesia dengan kewajiban melaksanakan Pepera pada tahun 1969¹⁸¹ yang telah dilakukan agak manipulatif dan dalam tekanan militer. Hasilnya pada tahun 1969 secara hukum internasional Papua Barat menjadi bagian dari Republik Indonesia.

¹⁷⁹ Syamsuddin Haris dkk, *op.cit*, hlm. 186-187

¹⁸⁰ Natalis Pigay, *op.cit*, hal. 231-234. Dengan terbentuk Komando Rakyat, Komando Mandala, dan kegiatan infiltrasi militer serta kegiatan operasi militer, seperti Operasi Banteng, Operasi Garuda, Operasi Serigala, Operasi Naga, dan Operasi Lumba-Lumba. A. Tinus Uwaga SH. aktivis Papua, Ketua Aliansi Mahasiswa Papua Internasional periode 2006-2008 saat memperingati Hari HAM.10 Desember 2007 Mengatakan, "bahwa Trikora sebagai amanat penderitaan rakyat Papua Barat. Kehadiran Indonesia di Papua Barat merampas hak merdeka dan menentukan nasib sendiri. Indonesia mendirikan negara di Papua Barat melalui kekerasan militer. Dalam invasi militernya, telah terjadi kekerasan berupa intimidasi dan teror (kekerasan psikis) dan bahkan telah dilakukan pembunuhan dan pembantaian terhadap warga sipil Papua (kekerasan fisik). Sejarah awal masuknya Indonesia di Papua Barat telah diwarnai penindasan dan pembunuhan yang memperlihatkan kebiadapan militer Indonesia. Sampai saat ini pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua Barat masih terus terjadi dan telah tercatat dalam sejarah kehadiran dan perjalanan hidup Indonesia bersama orang Papua"

¹⁸¹ *Ibid.*, hlm.189-190

BAB V

KESIMPULAN

Pada tanggal 28 Juli 1828 dua kapal yaitu; Triton dan Iris yang dipimpin oleh A.J Van Delden seorang komisaris pemerintah Belanda bersama kapten-letnan J.J. Steenboom komandan kesatuan dikirim oleh Gubernur Belanda di Maluku untuk mengiringi Komisaris pemerintahan untuk mendirikan Benteng. Pada tanggal 24 Agustus 1828, Hut Raja Belanda Willem I. di adakan upacara diteluk Triton, Kaimana (Fak-fak) meresmikan benteng Belanda yang pertama di Papua Barat. hadapan sejumlah perwira, serdadu, pegawai komisi penelitian ilmiah, dan orang-orang pribumi, komisaris pemerintah Belanda van Delden membacakan suatu proklamasi yang menyatakan bahwa "atas nama dan untuk Sri Bagianda Raja Nerderland..." bagi daerahnya Nieuw Guinea serta daerah-daerah di pedalaman yang mulai pada garis 141 derajat Bujur Timur di pantai selatan sampai ke *Goede Hoop* di pantai utara dinyatakan sebagai milik Belanda. Sesudah proklamasi dibacakan, Bendera Belanda dinaikkan dengan disertai dentuman meriam sebanyak 21 kali, yang ditembakkan dari benteng pertama Belanda di Papua Barat, *Fort du Bus* di teluk Triton. Kemudian karena alam di sana tidak lagi memihak, pada tahun 1835 Benteng *Fort du Bus* dibongkar. Gubernur Maluku memerintahkan supaya mencari tempat lain yang lebih baik untuk Benteng, namun rupanya tidak mendapatkan penggantinya. Kemudian pada tahun 1899 Belanda menganggarkan sebanyak f 115.000,- untuk mendirikan perwakilan pemerintahan Belanda di Papua Barat dan menyatakan kepada Inggris dan Jerman (dari Irian Timur) bahwa daerah itu milik Belanda. Untuk merealisasikan anggaran dari parlemen Belanda, maka dibuka pos-pos

pemerintahan baru. Pada tanggal 19 Februari 1936 (dalam Lebaran Negara No. 69), *juncto* penetapan Gubernur tanggal 25 Mei 1938 No. 28 (Lembaran Negara No. 264) Mengenai Timur Besar terkecuali *Keresidenan Nieuw Guinea* yang akan ditentukan kemudian. Lembar negara tersebut menyepakati pembagian daerah teritorial Hindia Belanda yaitu Sabang sampai Amboina tidak termasuk Papua Barat atau *Nederlands Nieuw Guinea*. *Nieuw Guinea* (Papua Barat) dan Indonesia merupakan daerah jajahan Belanda, namun Adminitrasi Pemerintah Papua Barat diurus secara terpisah. Indonesia yaitu mulai dari Sabang sampai Amoboina dikendalikan dari Batavia. Sedangkan kekuasaan Belanda di Papua Barat di kendalikan dari *Hollandia* (sekarang *Port Numbay*), dengan batas kekuasaan mulai dari kepulauan Raja Ampat sampai Merauke. Sampai dengan tahun 1961 jumlah District pada saat itu sebanyak 73 buah.

Pada tahun 1944 Van Eechoud telah meningkatkan pemberdayaan orang Papua melalui pendidikan dengan mendirikan sebuah sekolah polisi dan sebuah sekolah Pamong Praja di *Hollandia* (Jayapura). Selain sekolah Pamong Praja di *Hollandia*, pemerintah Belanda membuka sekolah pelayaran di Hamadi, sekolah tehnik di Kotaraja Jayapura dan Abepura, sekolah Pamongpraja di Yoka. Sekolah polisi di Base G, sekolah pertanian di Manokwari. Waktu itu penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah Belanda di untuk samping hegemoni Belanda dan juga terjadi Papanisasi atau untuk menanamkan nasionalisme Papua. Kemudian dalam bulan Januari 1946, Pemerintah Belanda mendirikan sekolah Pamong Praja di Kota Nicca (Kampung Harapan, sekarang). Jumlah siswa mencapai 400 orang antara tahun 1944-1949.

Hasil pendidikan Belanda rupanya telah melahirkan elit-elit politik terdidik di Papua. Elit politik terdidik Papua Barat telah bangkit menentang penjajah dan telah berupaya menggantikan pemerintahan yang dipegang oleh orang Belanda. Mereka menyelenggarakan pemilu rakyat Papua untuk memilih menduduki jabatan *Nieuw Guinea Raad*. *Bewindsregeling Nieuw Guinea* pasal 72 menetapkan tentang pembentukan suatu *Nieuw Guinea Raad* yang beranggotakan 21 orang. Dengan undang-undang tanggal 10 November 1960 tersebut ditetapkan ketentuan tentang pemilihan anggota *Nieuw Guinea Raad*. *Nieuw Guinea* memiliki susunan pemerintahan sendiri.

Kemudian merancang suatu manifesto dan membentuk Komite Nasional Papua (KNP) melakukan Kongres Papua Barat I di *Hollandia* (Jayapura, atau *Port Numay*) pada tanggal 19 Oktober 1961. kemudian mendeklarasikan kemerdekaan Papua Barat dengan perangkat kenegaraan seperti: (a). Bendera Bintang Kejora sebagai bendera bangsa Papua. (b). Lagu, *Hai Tanahku Papua Barat* sebagai lagu kebangsaan Papua. (c) Lambang Negara: Burung Mambruk. (d) Semboyan: *One People One Soul*, dengan Pemerintahan sendiri. Namun Presiden Soekarno mengumandangkan Trikora pada tahun 1961 di Yogyakarta dan telah berhasil menggagalkan berdirinya negara Papua Barat. Pada tanggal 3 Mei 1963 UNTEA menyerahkan Administrasi pemerintahan di Papua Barat kepada Indonesia dengan kewajiban menyelenggarakan Pepera 1969 yang kemudian telah dilakukan di dalam tekanan militer. Hasil Pepera 1969 memperlihatkan bukti sah bahwa pada tahun itu juga menurut hukum internasional Papua Barat menjadi bagian dari Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Alua, Agus. 2002. *Seri Pendidikan Politik I: Papua Barat dari Pangkuan ke Pangkuan, Suatu Iktisar Kronologis*. Papua: Sekretariat Presidium Dewan Papua.
- Alwi, Hasan dkk. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Ania Loomba. 2003. *Kolonialisme/ Pasckolonialisme*. Jakarta: Benteng,
- Badudu J.S. 2005. *Kamus Kata-kata Serapan Asing Dalam Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Kompas
- Cholil. M. 1971. *Sejarah Operasi-Operasi Pembebasan Irian Barat*, Jakarta: Pusat sejarah ABRI – Dephankam.
- Djopari, Jhon RG. 1993. *Pemberontakan Organisasi Papua Barat Merdeka*. Jakarta: Grasindo.
- Dumupa, Yakobus. 2006. *Berburu Keadilan di Papua*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Fa'al, Fahsin M. 2005. *Negara dan Revolusi Sosial: Pokok-pokok Pikiran Tan Malak*. Yogyakarta: Resist Book.
- Flassy, Don. 1999. *Vedemecum Perjuangan dan Rendez-Vous dengan tuntutan Papua Volkem sebuah Deskripsi Psikosomatis*. Jayapura.
- Giay, Benny 2000. *Menuju Papua Barat Baru: Beberapa Pokok Pikiran Sekitar Emansipasi Orang Papua*, Jayapura: Elsham Papua.
- Gottschalk, Louis. 1981. *Mengerti Sejarah*, Jakarta UI PRESS.
- Haris Syamsuddin dkk. 1999. *Indonesia Di Ambang Perpecahan?* Jakarta: Erlangga.
- Heuken S.J. 1989. Jilid Khusus, *Ensiklopedi Populer Tentang Gereja Katolik di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka.
- Jamil Salmi. 2005. *Violence and Democratic Society*, Yogyakarta: Pilar Media.
- Junus Aditjondro, George. 2000. *Cahaya Bintang Kejora: Papua Barat dalam Kajian Sejarah, Budaya, Ekonomi, dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: ELSAM.

- Kesselbrenner. 2003. *Irian Barat Wilayah Takterpisahkan dari Indonesia*. Jakarta: Teplok.
- Koentjaraningrat. 1989. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia.
- Koentjaraningrat dkk. 1994. *Irian Jaya Membangun Masyarakat Majemuk*, Jakarta: Jambatan.
- Kuntowihoyo. 2001. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang Budaya.,
- Lenontine E. Viser dkk. 2008. *Bakti Pamong Praja Papua: Dari Era Transisi Kekuasaan Belanda ke Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Moedjanto G. 2001. 1989. *Indonesia Abad ke-20 Jilid 2: Dari Perang Kemerdekaan Pertama Sampai Pelita III*. Yogyakarta: Kanisius.
- 2003. *Dari Pembentukan PAX NEDERLANDICA Sampai NEGARA KESATUAN REPOBLIK INDONESIA*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Natanegara Soewandha. E. 1986. *Api Perjuangan Irian Barat*. Jakarta: Yayasan Badan Kontak Keluarga Besar Perintis Irian Barat.
- Paul van der veur. 1963. *Politick Awengking in West Nieuw Guinea*. Pacific Affairs.
- Paul van der Veur. 1972. *Deutch New Guinea. Encyclopedia of Papua and New Giunea*. MUP.
- Pigay Deki Natalis. 2000. *Evolusi Nasionalisme dan Sejarah Konflik Politik di Papua*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- B.R. de Geus. 1984. *De Nieuw Guinea Kwestie, (Aspecten van buitenlandse beleid en militaire macht)*, Martinus Nijhff, Leiden.
- Ross Garnaut dkk. 1979. *Perubahan Sosial Ekonomi di Irian Jaya*. Jakarta: Gramedia.
- Saleh, Djamhari Saleh dkk. 2000. *Tri Komando Rakyat: Pembebasan Irian Barat*. Jakarta: Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI.
- Sartono Kartodirdjo. 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Grmedia.

Savage, Pater. 1982. *“Irian Jaya, Reluctant Colony,”* dalam Politik in Melanesia, University of South Pacific.

Schoorl, Pim. 2001. *Belanda di Irian Jaya: Amtenar di Masa Penuh Gejolak 1942 -1962.* Jakarta: Garba Budaya.

Sekretariat Kordinator Urusan Irian Barat. *Edisi 3, 1984. “Irian Barat Bagian Mutlak Republik Indonesia”* Djakarta.

The Liang Gie dan Soengeng Istanto. 1968. *Pertumbuhan Pemerintahan Propinsi Irian Barat.* Yogyakarta: Seksi Penerbitan, Fak, Sospol Universitas Gadjah Mada.

Weitjens, S.J. dkk. 1989. *Ragi Carita 2: Sejarah Gereja di Indonesia 1860-an – Sekarang.* Jakarta: PT. BPK. Gunung Mulia.

Makalah, Modul, dan lain-lain

Repport Inzake *Nederlands Nieuw Guinea over bet Faar 1961.*

Van Schie. Diktat Kuliah: *Agama Kristen di Irian (Seri Sejarah Agama II),* Jayapura: STTK.

Surat Kabar

Majalah *Triton*, Mei/Juni 1961.

Web.

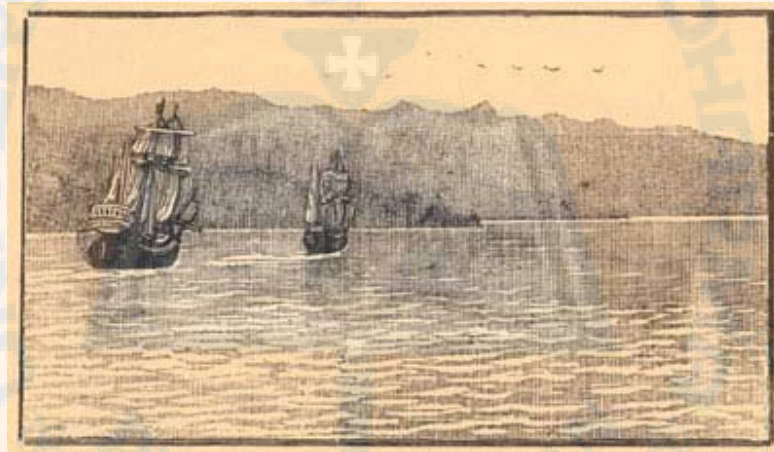
[http://: Wikipedia.org/wiki/koloni.](http://Wikipedia.org/wiki/koloni)

LAMPIRAN

Peta Sejarah - Papua - History Maps

THE FIRST MAP OF NEW GUINEA

In the year 1545 the *San Juan* was dispatched... commanded by *Inigo Ortiz de Retez*... they sailed from Tidor in the Moluccas, in the beginning of the year and made extensive discoveries on the north coast of *Os Papuas*, or Papua... [pg.41].



Spanish Ships

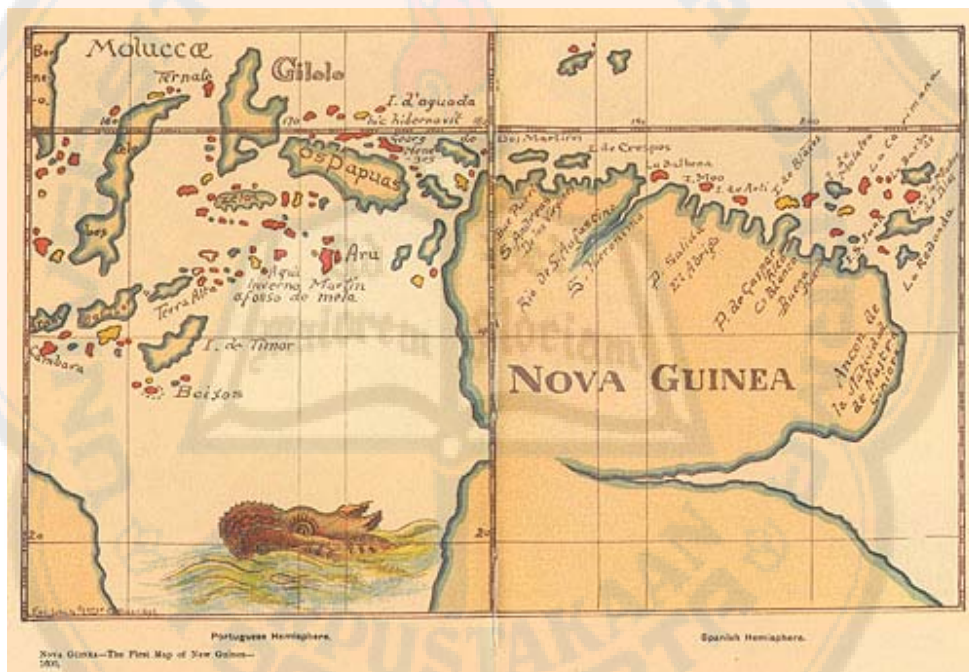
Had the Portuguese and Spanish known the map of New Guinea as we know it nowadays they would, no doubt, have described it as a Guinea fowl, Bird of Paradise or some such creature, as delineated above, in the same way as they described Java and other islands in these seas. [FN: Celebes was likened to a spider, Ceram to a caterpillar, etc., etc.]

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



[Collingridge's impression of the "bird" of New Guinea]

The map of Nova Guinea... shows, however, that their ideas were like all original ideas concerning shapes of countries - imperfect.



Nova Guinea - The First Map of New Guinea - 1600

Nevertheless, some of the principal features of the Portuguese and Spanish discoveries in Papuas and New Guinea, up to the year 1545, are clearly discernable. [FN: The original Portuguese and Spanish documents that were used in the compilation of this map have been lost or have not yet come to light. Our copy dates from the year 1600.]

It will now be noticed that Gilolo is now placed in its correct position, twenty degrees to the west of where it was placed before in Ribero's map.

It is now in the Portuguese sphere where it should be.

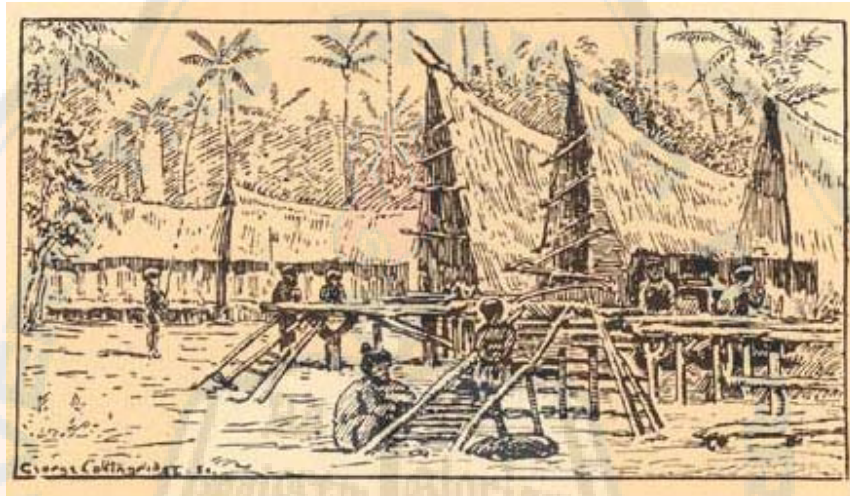
The Portuguese discoveries in New Guinea occupy what might be described as the fowl's head and neck. They come under the name of OS PAPUAS, and

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

the islands where Menezes is said to have sojourned - *hic hibernavit Georg de Menezes* - in the year 1526.

The three nameless large islands, between Os Papuas and Nova Guinea represent, no doubt, the Misory Islands and Jobi of modern charts.

The Aru Islands are also charted, and the Tenimber or Timor Laut group is indicated (although it bears no name) as having been the sojourn of Martin Alfonso de Melo [FN: *Martin alfonso de melo*, on the chart.], a Portuguese navigator, whose name has not been otherwise recorded, as far as I know, in the history of maritime discovery in these parts" [pg.42-43].



Scene in New Guinea

Note: There are a number of controversies surrounding the European discovery of Australia and New Guinea. However argued or skilful its blend of art with history, Collingridge's book should not be considered the only (or most authoritative) account of these events. For other perspectives on this history, readers are advised to consider more recent texts as well as others from the period that are already online such as [A Short History of Australia](#) by Ernst Scott (available through the [Nalanda](#) Library at the National Institute of Technology Calicut, Kerala State, India).

The definitive history of early exploration and discovery in New Guinea (to 1902) remains:

Wichmann, Arthur 1909-1912 *Entdeckungsgeschichte von Neu Guinea*, [Nova Guinea I](#) and [Nova Guinea II](#), Leiden: E.J. Brill (387pp. and 1026 pp. respectively, both volumes in German).

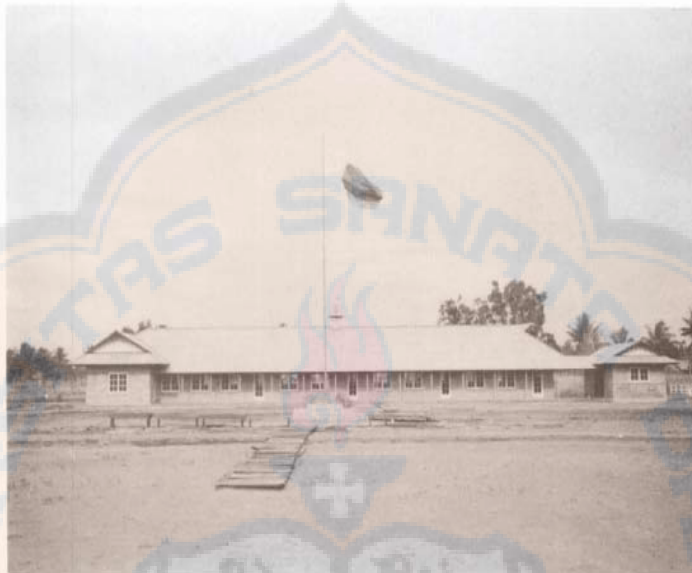
For further information about George Collingridge, visit the George Collingridge Society (<http://www.georgecollingridgesociety.org/>). If you are interested in doing research work on this fascinating Australian, see his

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

biography and collection of unpublished manuscripts held by the National Library of Australia (<http://nla.gov.au/nla.ms-ms9395>).



EDUCATION



Roman Catholic Initial Secondary School at Merauke.



Course for Lower Administrative Staff.

SOCIAL DEVELOPMENT

PADVINDERIJ

SCOUTING



Zangemonstratie

Demonstration of singing



Cursus e. h. b. o.

A course in first-aid

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



CULTURELE ONTWIKKELING



Evangelisatie-arbeid in de Vogelkop

Spreading the Gospel in the Vogelkop



Zesjarige lagere school te Manokwari

Six-year primary school at Manokwari

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

CULTURAL DEVELOPMENT



Ambachtsonderwijs

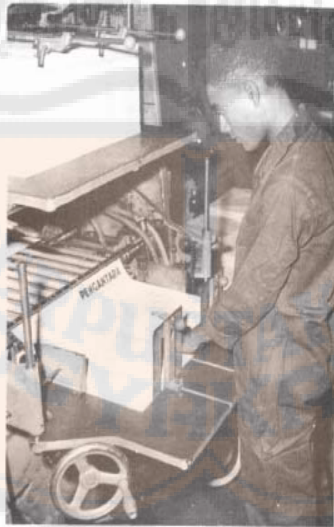
Junior technical training



Huishoudonderwijs

Domestic science instruction

ENIGE ASPECTEN VAN DE INSCHAKELING VAN DE PAPOEA
IN DE MODERNE TECHNIEK



De landsdrukkerij

The State Printing House

CULTURELE ONTWIKKELING

KADER-TRAINING



Opleidingassistent-opnemer (Instrumentenleer)

Teaching assistant surveyors the use of instruments



P.T.T. - Opleiding tot bedrijfsbeambte

A junior technical officer training for the Post Office

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

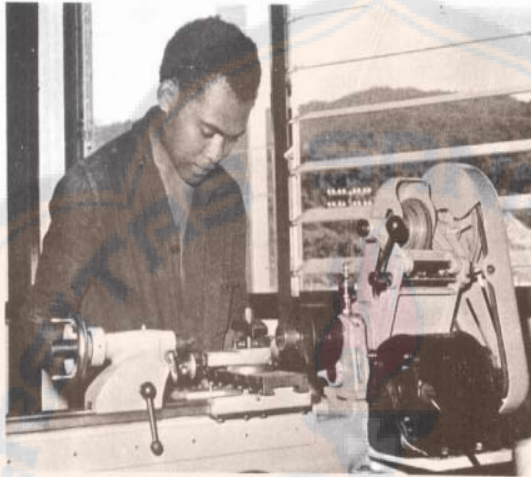
SOME ASPECTS OF THE INTRODUCTION OF THE PAPUAN TO MODERN
TECHNOLOGY



Scheepvaart

Shipping

CULTURAL DEVELOPMENT
VOCATIONAL TRAINING OF KEY PERSONNEL



P.T.T. - Opleiding tot bedrijfsbeambte

A junior technical officer training
for the Post Office



Botenbouw

Boat-building

SOCIALE ONTWIKKELING



Tehuis voor werkende vrouwen te Hollandia

Home for working women at Hollandia

ECONOMISCHE ONTWIKKELING



Verlenging van de startbaan van het vliegveld te Biak

Lengthening the runway at Biak Airport

ENIGE ASPECTEN VAN DE INSCHAKELING VAN DE PAPOEA
IN DE MODERNE TECHNIEK

SOME ASPECTS OF THE INTRODUCTION OF THE PAPUAN
TO MODERN TECHNOLOGY



Gezondheidszorg
Laboratorium - assistent

Public Health
laboratory assistant

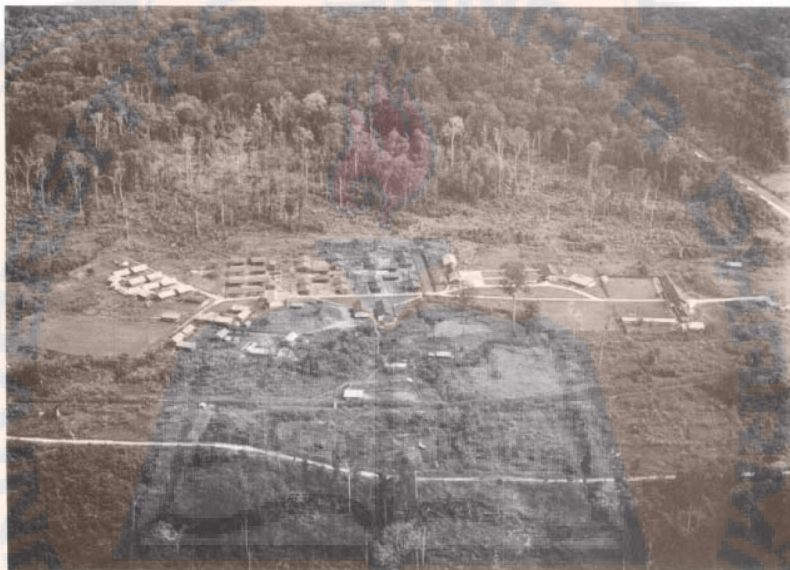


Gezondheidszorg
Verpleegster bij couveuse

Public Health
nurse with incubator

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PUBLIC HEALTH



Leper colony at Sorong.

PARADE KVP

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

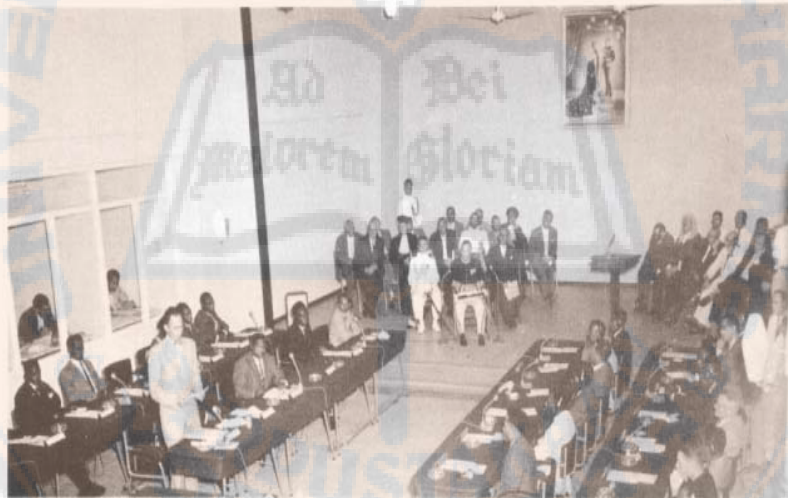


PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

POLITICAL DEVELOPMENT

DE PLECHTIGE INSTALLATIE VAN DE NIEUW-GUINEA RAAD
OP 5 APRIL 1961

THE OFFICIAL INSTALLATION OF THE NEW GUINEA COUNCIL
ON 5 APRIL, 1961



Overzicht van de opening-zitting

The opening session

POLITIEKE ONTWIKKELING

DE PLECHTIGE INSTALLATIE VAN DE NIEUW-GUINEA RAAD OP 5 APRIL 1961



Een groep leden

A group of members



Rede van de tweede vice-voorzitter van de raad, de Heer N. Jouwe

Mr. N. Jouwe, the second vice-chairman of the Council, holds a speech.

POLITIEKE ONTWIKKELING



De verkiezingen voor de Nieuw-Guinea Raad
(sommigen brengen hun stem "fluisterend," uit)

The elections for the New Guinea Council,
employing in part the "whispering ballot".

INTERNATIONAL COOPERATION



Papoea's uit Australisch Nieuw Guinea voor opleiding aan de zeevaartschool te Hollandia



Papuans from Australian New Guinea train at the school of Navigation, at Hollandia

INTERNATIONALE SAMENWERKING



Vertrek van P.T.T. - technici (links) en medische studenten (rechts) voor opleiding te Port-Moresby (Australisch Nieuw Guinea)

Post Office technicians (left) and medical students (right) leaving to train in Port Moresby. (Australian New Guinea)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

POLITIEKE ONTWIKKELING

POLITICAL DEVELOPMENT



Vertrek van een groep Papoea-ambtenaren voor een studiebezoek aan Nederland.

A group of Papuan officials leaving for a study visit to the Netherlands

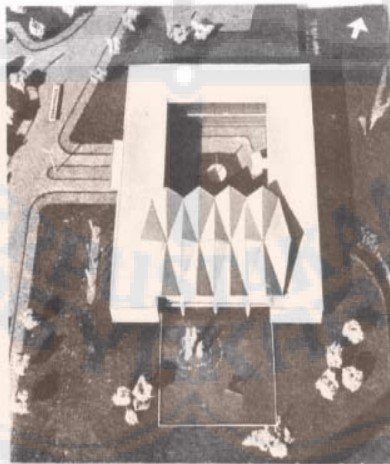
POLITICAL DEVELOPMENT

THE OFFICIAL INSTALLATION OF THE NEW GUINEA COUNCIL ON 5 APRIL, 1961



Aankomst van de groep autochtone vertegenwoordigers uit Australisch Nieuw-Guinea ter bijwoning van de installatie-plechtigheden.

Arrival of the group of Papuan representatives from Australian New Guinea to attend the installation ceremonies.



Maquette van het voor de Nieuw-Guinea Raad ontworpen gebouw

Model of the building planned for the New Guinea Council.

POLITICAL DEVELOPMENT



Constituents eagerly awaiting result of local council election in "Dafonsoro", Hollandia.

UNIVERSITAS
PERPUSTAKAAN
YOGYAKARTA

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Bendera, Lagu, Lambang dan Semboyan Negara Bangsa Papua

Barat

(1). Bendera Bintang kejora sebagai bendera bangsa Papua



(2). lagu, Hai Tanahku Papua Barat sebagai lagu kebangsaan Papua.

No. 69

3

HAI TANAHKU PAPUA

do = g $\frac{1}{4}$

5 | 3 . 2 | 1 2 | 1 . 7 ' 6 | 4 . 3 | 2 1 | 2 . . .

Hai ta - nah ku Pa - poe - a, Kau ta - nah la - hir - ku,

2 | 5 . 4 | 3 2 | 6 5 1 | 2 | 3 5 | 2 . 3 | 1 . . . ||

Ku ka - sih a - kan di - kau se - hing - ga a - djal - ku.

HAI TANAHKU PAPUA

1. Hai tanah ku Papoea,
Kau tanah lahirku,
Ku kasih akan dikau sehingga adjalku.
2. Kukasih pasir putih
Dipantaimu senang
Dimana Lautan biru
Berkilat dalam trang.
3. Kukasih gunung-gunung
Besar mulialah
Dan awan jang melajang
Keliling puntjaknja.
4. Kukasih dikau tanah
Jang dengan buahmu
Membajar keradjinan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

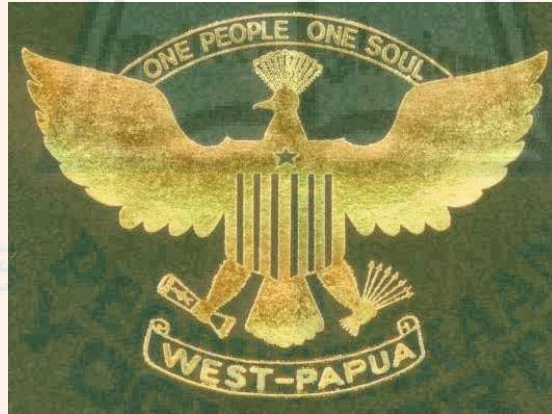
Dan pekerdjaanku.

5. Kukasih bunji ombak
Jang pukul pantaimu
Njanjian jang selalu
Senangkan hatiku.
6. Kukasih hutan-hutan
Selimut tanahku
Kusuka mengembara
Di bawa naungmu.
7. Sjukur bagimu, Tuhan,
Kau brikkan tanahku
Bri aku radjin djuga
Sampaikan maksudMu.

Behoort bij de ordonnantie van 18 november 1961 (besluit van de Gouverneur van Nederlands-Nieuw-Guinea van 18 november 1961 No. 364, Gouvernementsblad 1961 No. 69).

Mij bekend
De Gouvernementssecretaris,
A. LOOSJES.

(3) Lambang Negara : Burung Mambruk,



(4) semboyan: *One People One Soul*, dengan Pemerintahan

SILABUS

Mata Pelajaran : Sejarah
 Satuan Pendidikan : SMA
 Kelas/Semester : XI IPS/ Semester I
 Tahun Pelajaran : 2008/2009
 Alokasi Waktu : 2 x 45 menit
 Standar Kompetensi : Memahami perjalanan sejarah Papua Barat pada masa Belanda mulai dari upaya menguasai Papua Barat, keadaan ketertindasan rakyat Papua Barat, pendidikan masa Belanda dan dampaknya terhadap politik.

Komperensi Dasar	Materi Pokok	Kegiatan Pembelajaran	Indikator	Penilaian	Alokasi Waktu	Media dan Sumber	Sumber Buku
A. Mendiskripsikan Usaha Belanda menguasai Papua Barat	1.Masa awal pelayaran Belanda ke Papua Barat.	<ul style="list-style-type: none"> Menjelaskan usaha awal pelayaran Belanda ke Papua Barat melalui membaca buku secara individu. 	Mendeskripsikan usaha awal Belanda melakukan pelayaran ke Papua Barat.	<ul style="list-style-type: none"> Teknik <ul style="list-style-type: none"> Ulangan harian. Tugas Kelompok 	2 X 45 Menit	Papan Tulis Viewer/ OHP, LCD foto-foto dan flim.	<ul style="list-style-type: none"> Koentjaraningrat dkk. 1994. <i>Irian Jaya Membangun Masyarakat Majemuk</i>, Jakarta: Jambatan. Lenontine E. Viser dkk. 2008. <i>Bakti Pamong Praja Papua: Dari Era Transisi Kekuasaan Belanda ke Indonesia</i>. Jakarta: Kompas. Pigay Deki Natalis. 2000. <i>Evolusi Nasionalisme dan Sejarah Konflik Politik di Papua</i>. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Schoorl, Pim. 2001. <i>Belanda di Irian Jaya: Amtenaar di Masa Penuh</i>
	2.Usaha VOC menguasai Papua Barat.	<ul style="list-style-type: none"> Menjelaskan upaya VOC menguasai Papua Barat, melalui membaca buku secara individu 	•Mendeskripsikan upaya VOC menguasai Papua Barat	<ul style="list-style-type: none"> Bentuk <ul style="list-style-type: none"> Tes tertulis Laporan hasil diskusi kelompok Keantivan siswa 	I X 45 Menit		
	3.Papua Barat Resmi dikuasai Pemerintah Belanda.	<ul style="list-style-type: none"> Menjelaskan Papua Barat resmi menjadi kekuasaan Belanda dengan 	• Mendeskripsikan Papua Barat resmi menjadi kekuasaan Belanda		I X 45 Menit		

	4. Upaya perluasan kekuasaan Pemerintah Belanda di Papua Barat	<p>diskusi kelompok</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menjelaskan upaya perluasan kekuasaan Pemerintah Belanda di Papua Barat dengan diskusi kelompok 	<ul style="list-style-type: none"> • Mendeskripsikan upaya perluasan kekuasaan Pemerintah Belanda di Papua Barat 		2 X 45 Menit		<p><i>Gejolak 1942 -1962.</i> Jakarta: Garba Budaya.</p>
B. Menjelaskan situasi ketertindasan masyarakat Papua Barat masa Pemerintahan Belanda.	<p>1. Perampasan tanah bangsa Papua Barat</p> <p>2. Kerja paksa dan diskriminasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menjelaskan perampasan tanah masyarakat Papua Barat oleh Pemerintah Belanda, dengan diskusi kelompok dan presentasi • Menjelaskan kerja paksa dan diskriminasi terhadap masyarakat Papua Barat 	<ul style="list-style-type: none"> • Mendeskripsikan cara-cara perampasan tanah masyarakat Papua Barat oleh Pemerintah Belanda • Mendeskripsikan bentuk-bentuk kerja paksa dan diskriminasi terhadap masyarakat Papua 		<p>2 X 45 Menit</p> <p>I X 45 Menit</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Kesselbrenner. 2003. <i>Irian Barat Wilayah Takterpisahkan dari Indonesia.</i> Jakarta: Teplok. • Ross Garnaut dkk. 1979. <i>Perubahan Sosial Ekonomi di Irian Jaya.</i> Jakarta: Gramedia. • The Liang Gie dan Soegeng Istanto. 1968. <i>Pertumbuhan Pemerintahan Propinsi Irian Barat.</i> Yogyakarta: Seksi Penerbitan, Fak, Sospol Universitas Gadjah

		<p>masa Pemerintah Belanda dengan diskusi kelompok dan presentasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menjelaskan pangan dan Kesehatan masyarakat Papua pada masa kekuasaan Belanda dengan diskusi kelompok dan presentasi 	<p>Barat masa Pemerintah Belanda.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mendeskripsikan kondisi pangan dan kesehatan masyarakat Papua pada masa kekuasaan Belanda 						Mada.
	3.Kondisi pangan dan kesehatan								I X 45 Menit
	4.Kondisi budaya dan pendidikan.	<ul style="list-style-type: none"> • Menjelaskan budaya dan pendidikan dengan diskusi kelompok dan presentasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mendeskripsikan kondisi budaya dan pendidikan 						I X 45 Menit
	5.Kondisi ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Menjelaskan keadaan ekonomi orang Papua masa Pemerintahan Belanda 	<ul style="list-style-type: none"> • Mendeskripsikan kondisi ekonomi orang Papua masa Pemerintahan Belanda 						I X 45 Menit

C. Menganalisis pendidikan di Papua Barat masa Pemerintah Belanda dan dampaknya	1. Pendidikan Misionaris:	<ul style="list-style-type: none"> • Menjelaskan pendidikan yang dilakukan para misionaris 	<ul style="list-style-type: none"> • Mendeskripsikan upaya pendidikan yang dilakukan para misionaris untuk membangun orang Papua Barat 		2 X 45 Menit	<ul style="list-style-type: none"> • Djopari, Jhon RG. 1993. <i>Pemberontakan Organisasi Papua Barat Merdeka</i>. Jakarta: Grasindo. • Junus Aditjondro George. 2000. <i>Cahaya Bintang Kejora: Papua Barat dalam Kajian Sejarah, Budaya, Ekonomi, dan Hak Asasi Manusia</i>, Jakarta: ELSAM. • Saleh, Djamhari Saleh dkk. 2000. <i>Tri Komando Rakyat: Pembebasan Irian Barat</i>. Jakarta: Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI.
	2 Pendidikan Pemerintah Belanda dan dampaknya dalam bidang politik:	<ul style="list-style-type: none"> • Menjelaskan Pendidikan yang dilakukan Pemerintah Belanda dan dampaknya dalam bidang politik 	<ul style="list-style-type: none"> • Mendeskripsikan upaya pendidikan yang dilakukan pemerintah Belanda dan dampak politik dari pendidikan Belanda terhadap perkembangan orang Papua. 		2 X 45 Menit	

Yogyakarta, Juni 2009

Mengetahui
Kepala Sekolah

Guru Bidang Studi

Drs. A.K. Wiharyanto, M.M.

Logimus Pekey

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Mata Pelajaran : Sejarah
Satuan Pendidikan : SMA
Kelas/Semester : XI IPS/Semester I
Tahun Pelajaran : 2008/2009
Alokasi Waktu : 2 x 45 menit

I Standar Kompetensi

Memahami sejarah Papua Barat pada masa Belanda, mulai dari upaya menguasai Papua Barat, keadaan ketertindasan rakyat Papua Barat, pendidikan di Papua Barat masa Belanda dan dampaknya terhadap politik .

II Kompetensi Dasar

Menganalisis sejarah kehidupan masyarakat Papua Barat pada masa Pemerintahan Belanda dan dampak adanya terhadap sejarah kehidupan masyarakat Papua Barat.

III Materi Pokok

- A. Usaha Belanda menjajah Papua Barat
- B. Situasi ketertindasan masyarakat Papua Barat masa Pemerintahan Belanda
- C. Pendidikan di Papua Barat masa Pemerintahan Belanda

IV Indikator

1. Menjelaskan usaha Pemerintah Belanda menguasai Papua Barat
2. Menjelaskan situasi ketertindasan masyarakat Papua Barat masa Pemerintah Belanda
3. Menjelaskan pendidikan di Papua Barat masa Pemerintah Belanda.

V Tujuan Pembelajaran

1. Siswa mampu menjelaskan latar latar belakang kedatangan Belanda di Papua Barat.
2. Siswa mampu menjelaskan upaya Belanda menguasai Papua Barat.
3. Siswa mampu mengidentifikasi ketertindasan masyarakat Papua Barat masa Pemerintah Belanda.
4. Siswa mampu menjelaskan bentuk keterindasan masyarakat Papua Barat masa Pemerintah Belanda.
5. Siswa mampu menjelaskan dampak pendidikan Belanda terhadap kemajuan masyarakat Papua Barat.
6. Sisiwa mampu menjelaskan situasi politik Papua Barat menjelakng akhir kekuasaan Pemerintah Belanda di Papua Barat.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

VI Langkah-Langkah Pembelajaran

A. Pendahuluan (Apresiasi 10 menit)

- Guru mengecek kembali materi minggu lalu dengan tanya jawab kepada siswa.
- Guru menjelaskan Standar Kompetensi Dasar yang akan dibahas hari ini dan dihubungkan dengan materi ajaran sebelumnya.

B. Kegiatan Inti (75 menit)

- 1.a. Guru membagi siswa ke dalam kelompok- kelompok dimana setiap kelompok terdiri dari 5 siswa yang mana setiap kelompok harus membentuk ketua dan sekretaris.
- b. Setiap kelompok diberi tugas yang sama yaitu membahas permasalahan-permasalahan berikut ini:
 1. Jelaskan usaha-usaha apa yang dilakukan Belanda untuk menguasai Papua Barat!
 2. Jelaskan situasi ketertindasan masyarakat Papua Barat masa Pemerintah Belanda!
 3. Menjelaskan pendidikan di Papua Barat masa Pemerintah Belanda!
2. Kelompok mendiskusikan masalah tersebut selama 30 menit.
3. Setelah 30 menit guru menunjuk perwakilan kelompok (2-3 kelompok) untuk mempresentasikan hasil laporannya.
4. Presentasi dalam Pleno dan tanya jawab selama dua puluh menit.
5. Guru mengajak siswa merefleksikan nilai-nilai baik yang dapat diambil manfaatnya dan oleh siswa dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari selama 5 menit.
6. Guru memberi pengakuan tentang materi yang sudah dibahas untuk melengkapi bahan siswa selama 10 menit.

C. Penutup (5 menit)

- Guru menyimpulkan isi materi yang dibahas secara keseluruhan.
- Guru memberi tugas untuk menyusun laporan yang lebih baik (revisi) dari hasil diskusi mereka hari ini.
- Guru menginformasikan materi untuk pertemuan berikut.

VIII Metode Belajar

- Ceramah
- Diskusi
- Tanya Jawab
- Presentasi

IX Media dan Sumber Belajar

A. Media

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Viewer/OHP, foto-foto, flim.

B. Sumber Belajar

- Alua, Agus. 2002. *Seri Pendidikan Politik I: Papua Barat dari Pangkuan ke Pangkuan, Suatu Iktisar Kronologis*. Papua: Sekretariat Presidium Dewan Papua.
- Djopari, Jhon RG. 1993. *Pemberontakan Organisasi Papua Barat Merdeka*. Jakarta: Grasindo.
- Junus Aditjondro George. 2000. *Cahaya Bintang Kejora: Papua Barat dalam Kajian Sejarah, Budaya, Ekonomi, dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: ELSAM.
- Kesselbrenner. 2003. *Irian Barat Wilayah Takterpisahkan dari Indonesia*. Jakarta: Teplok.
- Koentjaraningrat dkk. 1994. *Irian Jaya Membangun Masyarakat Majemuk*, Jakarta: Jambatan.
- Lenontine E. Viser dkk. 2008. *Bakti Pamong Praja Papua: Dari Era Transisi Kekuasaan Belanda ke Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Natanegara Soewandha. E. 1986. *Api Perjuangan Irian Barat*. Jakarta: Yayasan Badan Kontak Keluarga Besar Perintis Irian Barat.
- Pigay Deki Natalis. 2000. *Evolusi Nasionalisme dan Sejarah Konflik Politik di Papua*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Ross Garnaut dkk. 1979. *Perubahan Sosial Ekonomi di Irian Jaya*. Jakarta: Gramedia.
- Saleh, Djamhari Saleh dkk. 2000. *Tri Komando Rakyat: Pembebasan Irian Barat*. Jakarta: Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI.
- Schoorl, Pim. 2001. *Belanda di Irian Jaya: Amtenaar di Masa Penuh Gejolak 1942 -1962*. Jakarta: Garba Budaya.
- The Liang Gie dan Soegeng Istanto. 1968. *Pertumbuhan Pemerintahan Propinsi Irian Barat*. Yogyakarta: Seksi Penerbitan, Fak, Sospol Universitas Gadjah Mada.

X Penilaian

1. Penilaian Proses Belajar

Alat penilaian : Lembar observasi

Bentuk : Format Penilaian.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kegiatan yang diamati Nama	Orientasi				Mengemukakan Pendapat				Kerja Sama				Presentase Hasil				Pengajuan Pernyataan				Tanggapi Pernyataan				Tanggung Jawab				Jumlah Skor	Keterangan
Skala Nilai	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1																														
2																														
3																														
4																														
5																														
6																														
7																														
8																														
9																														
10																														

Keterangan Skala nilai

4= Sangat Baik

3= Baik

2=Cukup

2. Penilaian Hasil Belajar

a. Alat Penilaian : Non Tes

Bentuk penilaian: Laporan Hasil Diskusi

Butir-butir pernyataan diskusi